BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.
(3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
    a. Pendapatan Daerah Rp882.480.955.551,00
    b. Belanja Daerah Rp1.040.859.314.973,00 _
       surplus/(defisit) -Rp96.116.284.786,00
    c. Pembiayaan Daerah
       1. penerimaan Pembiayaan Rp158.378.359.422,00
       2. pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 _
       Pembiayaan *netto* Rp158.378.359.422,00
    d. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp882.480.955.551,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp53.491.122.423,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh dua ribuempat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak Daerah;
    b. retribusi Daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.122.015.531,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta lima belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.824.360.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.044.746.892,00 (dua puluh miliar empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp828.820.943.352,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp786.212.377.100,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.608.566.252,00 (empat puluh dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp168.889.776,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp784.449.005.089,76 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp514.949.159.286,14 (lima ratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam koma empat belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.260.065.122,62 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma enam puluh dua rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.091.985.681,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.795.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp142.215.982.235,72 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus lima belas juta smbilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.808.975.640,00 (tiga miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.919.005.881,97 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.619.649.701,74 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus satu koma tujuh puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.907.124.696,01 (delapan puluh lima miliar

sembilan ratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam koma satu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp924.305.280,00 sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.921.036,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.981.012.988,52 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah).

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp105.213.314.659,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.096.467.249,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.116.847.410,00 (seratus dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp158.378.359.422,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp158.378.359.422,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya; dan
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.878.359.422,00 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp158.378.359.422,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

(2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp158.378.359.422,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau;
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:

Lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;
Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025;
Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;
Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2025;
Lampiran VII	sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan APBD tahun anggaran 2025;
Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025;
Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;
Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 104

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 6,49 /2024;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Daerah” adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “pendapatan transfer” adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “belanja operasi” adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “belanja modal” adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “belanja tidak terduga” adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “belanja transfer” adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1454 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;

b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/2381/SD.I/DIT.I/XII/KEUDA/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bupati Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Kepulauan Riau dan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Desember 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1454 Tahun 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI GUBERNUR	KETERANGAN
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan	

dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-		bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12	

	Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;		
Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	
		Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Konsideran mengingat angka 2 tetap
		3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Angka 3 tetap
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	Angka 4 tetap
		5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008	Angka 5 tetap

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,	tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun	Angka 6 tetap Angka 7 tetap Angka 8 tetap Angka 9 tetap

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan	2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara	 Angka 10 tetap Angka 11 tetap

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);	Republik Indonesia Nomor 6827);	
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Angka 12 tetap
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	Angka 13 tetap
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);	Angka 14 tetap
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);	Angka 15 tetap
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	Angka 16 tetap
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara	Angka 17 tetap

2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi	Angka 18 tetap Angka 19 tetap Angka 20 tetap

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Angka 21 tetap Angka 22 tetap Angka 23 tetap

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);	tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN	Angka 24 tetap Angka 25 tetap Angka 26 tetap

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan	2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Pasal 1 ayat (4) diambil ~~dari~~ dari Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal ...ayat (..) Pasal 1 ayat (5) diambil dari dari Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) Pasal 1 ayat (6) diambil ~~dari~~ dari Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (13) Pasal 1 ayat (7) diambil ~~dari~~ dari Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (14) Pasal 1 ayat (8) diambil ~~dari~~ dari Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (22) Pasal 1 ayat (9) diambil dari ~~dari~~ Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (23)

dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh	satuan kerja perangkat Daerah. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp799.758.952.551,00 b. Belanja Daerah Rp895.875.237.337,00 - surplus/(defisit) Rp96.116.284.786,00 c. Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan Pembiayaan Rp96.116.284.786,00 2) pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 - Pembiayaan *netto* Rp96.116.284.786,00 d. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) Rp0 Pasal 3 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp799.758.952.551,00 (tujuh ratus sembilan puluh	Pasal 1 ayat (10) diambil dari dari Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (24) Pasal 2 muatan lokal Pasal 3 diambil dari Peraturan Pemerintah Pasal 30 12 Tahun 2019

rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp799.758.952.551,00 b. Belanja Daerah Rp895.875.237.337,00 surplus/(defisit) Rp96.116.284.786,00 c. Pembiayaan Daerah 1) penerimaan Pembiayaan Rp96.116.284.786,00 2) pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 Pembiayaan *netto* Rp96.116.284.786,00 d. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) Rp0 Pasal 3 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp799.758.952.551,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam	sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp52.120.873.660,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam oiratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.584.202.489,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.824.360.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.212.311.171,00 (dua puluh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh	Pasal 4 diambil dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp52.120.873.660,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.584.202.489,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.824.360.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.212.311.171,00 (dua puluh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp747.469.189.115,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:	satu rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp747.469.189.115,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.046.478.100,00 (tujuh ratus empat miliar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.422.711.015,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima belas rupiah). Pasal 6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp168.889.776,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Pasal 7 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 5 diambil dari Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 6 diambil dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 7 diambil dari Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.046.478.100,00 (tujuh ratus empat miliar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.422.711.015,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima belas rupiah). Pasal 6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp168.889.776,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Pasal 7 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasional; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Pasal 8 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam	a. belanja operasional; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Pasal 8 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp725.864.848.530,33 (tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.076.808.719,77 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh tujuh rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.869.505.809,56 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh enam rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.786.439.001,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu satu rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.095.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah).	Pasal 8 diambil dari Pasal 56 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp725.864.848.530,33 (tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.076.808.719,77 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh tujuh rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.869.505.809,56 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh enam rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.786.439.001,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu satu rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.095.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Pasal 9 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp96.453.898.569,63 (sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam puluh	Pasal 9 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp96.453.898.569,63 (sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.736.700.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.319.180.881,80 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.329.003.842,94 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.092.808,89 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh sembilan rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.921.036,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).	Pasal 9 diambil dari Pasal 65 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.736.700.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.319.180.881,80 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.329.003.842,94 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.092.808,89 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh sembilan rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.921.036,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah). Pasal 10 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp839.342.158,04 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma empat	Pasal 10 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp839.342.158,04 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma empat rupiah). Pasal 11 (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp72.717.148.079,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.096.466.648,90 (tiga miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.620.681.430,10 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma sepuluh rupiah). Pasal 12 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. Pasal 13 (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 10 diambil dari Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 11 diambil dari Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 12 diambil dari Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

rupiah). Pasal 11 (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp72.717.148.079,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.096.466.648,90 (tiga miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.620.681.430,10 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma sepuluh rupiah). Pasal 12 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan. Pasal 13 (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar	Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.616.284.786,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 14 (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus	Pasal 13 diambil dari Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 14 diambil dari Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) diambil dari Peraturan Pasal 83 ayat (1) Pemerintah 12 Tahun 2019

seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.616.284.786,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 14 (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)	delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	Pasal 16 diambil dari Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pasal 17 Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,	Pasal 17 Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain: Lampiran I — ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; Lampiran II — ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025; Lampiran III — rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; Lampiran IV — rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025; Lampiran V — rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025; Lampiran VI — rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2025;	Pasal 17 di ambil dari Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

antara lain:				
Lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;	Lampiran VII	sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan APBD tahun anggaran 2025;	
Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;	Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	
Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;	Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025;	
Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025;	Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;	
Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;	Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025.	
Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2025;	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.		Pasal 18 Muatan Lokal
Lampiran VII	sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan APBD tahun anggaran 2025;	BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Pasal 19 Muatan Lokal

Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.	
Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025;	Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 20254 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	
Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;	ABDUL HARIS	
Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025.	Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 20254	
Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR	
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: /2024;	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: /2024;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Daerah" adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "pendapatan transfer" adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan "belanja operasi" adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "belanja modal" adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Daerah" adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pendapatan transfer" adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "belanja operasi" adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "belanja modal" adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "belanja tidak terduga" adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "belanja transfer" adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "belanja tidak terduga" adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "belanja transfer" adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR

Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR		

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1454 Tahun 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RANCANGAN PERBUP	HASIL EVALUASI GUBERNUR	KETERANGAN
  BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Angka 2 tetap
	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Angka 3 tetap
	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	Angka 4 tetap
	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di		5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di	Angka 5 tetap

	Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);	Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);	
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Angka 6 tetap
7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Angka 7 tetap
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000	8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000	Angka 8 tetap

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	Angka 9 tetap
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	Angka 10 tetap
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),	11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),	Angka 11 tetap

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);	sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);	
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Angka 12 tetap
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	Angka 13 tetap
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	Angka 14 tetap
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan	15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan	Angka 15

Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);	Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);	
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	Angka 16 tetap
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Angka 17 tetap

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);	
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);	18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);	Angka 18 tetap
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	Angka 19 tetap
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);	20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);	Angka 20 tetap
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020	21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020	Angka 21 tetap

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);	tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);	
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	Angka 22 tetap
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);	23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);	Angka 23 tetap
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);	24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);	Angka 24 tetap

	25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor .....Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor...); MEMUTUSKAN:			25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor .....Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor...); MEMUTUSKAN:	Angka 25 tetap
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.		Menetapkan	: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.	

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal 2 (1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua	Pasal 1 ayat (4) diambil dari Peraturan Pasal 1 ayat (4) Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5) diambil dari Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) Pasal 1 ayat (6) diambil dari Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (13) Pasal 1 ayat (7) diambil dari Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (14) Pasal 2 muatan lokal

puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp799.758.952.551,00 b. Belanja Daerah Rp895.875.237.337,00 _ surplus/(defisit) Rp96.116.284.786,00 c. Pembiayaan Daerah 1) penerimaan Pembiayaan Rp96.116.284.786,00 2) pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 _ Pembiayaan *netto* Rp96.116.284.786,00 d. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) Rp0 Pasal 3 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp799.758.952.551,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar	ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp799.758.952.551,00 b. Belanja Daerah Rp895.875.237.337,00 _ surplus/(defisit) c. Pembiayaan daerah Rp96.116.284.786,00 1) penerimaan Pembiayaan Rp96.116.284.786,00 2) pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 _ Pembiayaan *netto* Rp96.116.284.786,00 d. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) Rp0 Pasal 3 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp799.758.952.551,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud	Pasal 3 diambil dari Pasal 30 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 4 diambil dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

Rp52.120.873.660,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.584.202.489,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.824.360.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.212.311.171,00 (dua puluh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp747.469.189.115,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan	dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp52.120.873.660,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.584.202.489,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.824.360.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.212.311.171,00 (dua puluh miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah). Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp747.469.189.115,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 5 diambil dari Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.046.478.100,00 (tujuh ratus empat miliar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.422.711.015,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima belas rupiah).	a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.046.478.100,00 (tujuh ratus empat miliar empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.422.711.015,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima belas rupiah).	
Pasal 6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp168.889.776,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).	Pasal 6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp168.889.776,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).	Pasal 6 diambil dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019
Pasal 7 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasional; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.	Pasal 7 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp895.875.237.337,00 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasional; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.	Pasal 7 diambil dari Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 8 diambil dari Pasal 56 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019
Pasal 8 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar	Pasal 8 (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam	

Rp725.864.848.530,33 (tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.076.808.719,77 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh tujuh rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.869.505.809,56 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh enam rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.786.439.001,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu satu rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.095.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Pasal 9 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp96.453.898.569,63 (sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp725.864.848.530,33 (tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.076.808.719,77 (lima ratus dua puluh satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh tujuh rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.869.505.809,56 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh enam rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.786.439.001,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu satu rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.095.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Pasal 9 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp96.453.898.569,63 (sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam puluh	Pasal 9 diambil dari Pasal 65 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.736.700.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.319.180.881,80 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.329.003.842,94 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.092.808,89 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh sembilan rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.921.036,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah). Pasal 10 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp839.342.158,04 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat	tiga rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.736.700.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.319.180.881,80 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.329.003.842,94 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.092.808,89 (enam puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh sembilan rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.921.036,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah). Pasal 10 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp839.342.158,04	Pasal 10 diambil dari Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma empat rupiah).	(delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma empat rupiah).	
Pasal 11 (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp72.717.148.079,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.096.466.648,90 (tiga miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.620.681.430,10 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma sepuluh rupiah).	Pasal 11 (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp72.717.148.079,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.096.466.648,90 (tiga miliar sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.620.681.430,10 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma sepuluh rupiah).	Pasal 11 diambil dari Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019
Pasal 12 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan.	Pasal 12 Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan.	Pasal 12 diambil dari Pasal 70 ayat (1)Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019
Pasal 13 (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud		

dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.616.284.786,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 14 Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar	Pasal 13 (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.616.284.786,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 14 ~~Anggaran~~ ~~p~~Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal 15 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih	Pasal 13 diambil dari Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 14 diambil dari Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) diambil dari P Pasal 83 ayat (1) eraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp96.116.284.786,00 (sembilan puluh enam miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Pasal 16 (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau	Pasal 16 diambil dari Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

Pasal 17 Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini antara lain: Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; Lampiran II : rincian APBD Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; Lampiran IIIa : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025; Lampiran IIIb : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun	masyarakat. Pasal 17 Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini antara lain: Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; Lampiran II : rincian APBD Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; Lampiran IIIa : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025; Lampiran IIIb : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima	Pasal 17 di ambil dari Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

	anggaran 2025;		serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;	
Lampiran IVa :	daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;	Lampiran IVa :	daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;	
Lampiran IVb :	daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;	Lampiran IVb :	daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;	
Lampiran Va :	daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;	Lampiran Va :	daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;	
Lampiran Vb :	daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;	Lampiran Vb :	daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;	
Lampiran VIa :	daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil			

	pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2025;	Lampiran VIa :	daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2025;	
Lampiran VIb :	daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kota tahun anggaran 2025;	Lampiran VIb :	daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kota tahun anggaran 2025;	
Lampiran VIc :	daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa tahun anggaran 2025;	Lampiran VIc :	daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa tahun anggaran 2025;	
Lampiran VII :	rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;	Lampiran VII :	rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;	
Lampiran IX :	rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;	Lampiran IX :	rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan	

	tahun anggaran 2025;	
Pasal 18 Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 Muatan Lokal
Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 19 Muatan Lokal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2024 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ABDUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR ...	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan di Tarempa pada tanggal Desember 2024 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ABDUL HARIS Diundangkan di Tarempa pada tanggal Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SAHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR ...	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1454 Tahun 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. kepentingan umum;
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebelum ditetapkan Bupati Kepulauan Anambas, meliputi:

A. Fokus kebijakan pembangunan daerah tahun 2025:

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

   Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,09-5,09%.

2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

   Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 2,42%.

3. Proyeksi Kemiskinan

   Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 5,7%.

4. Proyeksi Gini Rasio

   Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,25%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/RPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel. 1

Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisaai		Target	Realisasi s.d. 30 September 2024					
PENDAPATAN DAERAH	869.056.860.530,00	824.553.991.952,51	94,888	1.149.685.355.791,00	998.370.281.042,73	86,84	984.762.634.724,00	614.554.874.309,06	62,41	1,32	0,86	0,90	1,03
Pendapatan Asli Daerah	41.450.650.040,00	29.686.658.850,51	71,62	41.958.839.490,00	29.362.242.093,73	69,98	39.179.339.491,00	18.708.108.017,06	47,75	1,01	0,93	1,34	1,09
Pendapatan Transfer	815.808.870.490,00	783.315.186.389,00	96,02	1.107.726.516.301,00	969.008.038.949,00	87,48	942.803.795.233,00	595.710.127.868,00	63,18	1,36	0,85	0,88	1,03
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.797.340.000,00	11.552.146.713,00	97,92	0,00	0,00	0,00	2.779.500.000,00	136.638.424,00	4,92	-	-	0,06	0,02

Berdasarkan tabel di atas, untuk tren target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,03%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

   Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

   Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

   Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

   Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 September 2024					
BELANJA DAERAH	916.647.866.316,00	865.767.979.709,20	94,45	1.250.230.911.389,00	980.270.183.929,64	78,41	1.009.126.863.684,00	569.814.015.003,00	56,47	1,36	0,81	1,03	1,07
Belanja Operasi	683.927.636.741,00	640.801.958.959,20	93,69	803.457.038.265,00	683.833.368.630,64	85,11	752.976.624.135,00	448.748.211.474,00	59,60	1,17	0,94	1,00	1,04
Belanja Modal	123.853.270.356,00	120.401.935.455,00	97,21	251.278.933.169,00	184.291.542.980,00	73,34	141.992.627.668,00	46.712.489.525,00	32,90	2,03	0,57	0,98	1,19
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	-	68.799.839.255,00	0,00	-	2.357.203.001,00	0,00	-	126,70	0,02	17,32	28,72
Belanja Transfer	107.866.959.219,00	104.564.085.295,00	96,94	126.695.100.700,00	112.145.272.319,00	88,52	111.800.408.879,00	74.353.314.004,00	66,51	1,17	0,88	0,94	1

Berdasarkan tabel di atas untuk tren target belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,07%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

   Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. *E-Government* dan *E-Procurement*

   Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

5. *Monitoring* dan Evaluasi Program

   Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3

Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 September 2024					
PEMBIAYAAN DAERAH	47.591.005.786,00	48.198.574.587,26	101,28	100.545.555.597,00	5.849.631.846,59	5,82	24.449.728.959,00	24.504.894.978,35	100,23	2,11	0,24	6,48	2,95
Penerimaan Pembiayaan	48.591.005.786,00	49.198.574.587,26	101,25	102.545.555.597,00	7.849.631.846,59	7,65	24.449.728.959,00	24.504.894.978,35	100,23	2,11	0,24	6,48	2,95
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas untuk tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,95%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.

2. Biaya per Layanan Publik

   Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

3. Evaluasi Kinerja Program

   Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah	B/900.1.1/291/Setda.BPKPD/SD/07/2024	16 Juli 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	B/900.1.1/260/KDH/SD/07/2024	16 Juli 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3	Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	100.3.7/008/Kdh.KKA/MoU/VIII/2024 dan 100.3.7/01/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024	22 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	100.3.7/009/Kdh.KKA/MoU/VIII/2024 dan 100.3.7/02/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024	22 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	B/900.1.1/411/KDH/SD/10/2024	29 Oktober 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	05/BA/DPRD.KKA/XI/2024 dan 06/BA/Kdh.KKA/XI/2024	25 November 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	B/900.1.1/442/KDH/SD/11/2024	28 November 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Ranperda tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selanjutnya agar dapat konsisten pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.

A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025.

1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*.

   Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp12.292.912.055,48 atau 1,42% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

   Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp400.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp18.712.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran pengendalian inflasi Rp59.497.079.237,75 atau 5,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Rp920.000.000,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;

b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp405.000.000,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp113.567.931,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

   Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan Rp22.907.026.770,07 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp9.356.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

   b. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp189.687.650,01 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

   Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

   Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:

   a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat dan lengkap (tuna wisma);
   b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah sebagai acuan seluruh *stakeholder*;
   c. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk penerapan hunian berimbang;
   d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR);
   e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
   f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;
   g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;
   h. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

   sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

   Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

   Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:

   a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
   b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
   c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;

   berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

   Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp16.742.017.484,00 atau 4,47% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp374.139.617.522,76 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang

APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan pemanfaatan Sumber daya ekonomi unggulan daerah	17.644.928.529,70	1,70
2.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berbudaya	98.111.370.731,00	9,43
3.	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	129.581.601.858,00	12,45
4.	Optimalisasi reformasi birokrasi	773.744.553.356,61	74,34
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.019.082.454.475,31	97,91
Total Belanja Daerah		1.040.859.314.973,00	

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(mandatory spending)*, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

   Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan Rp233.240.856.005,00 atau 22,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan:

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp3.710.949.816,00;

   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp5.232.541.889,61

   c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.340.446.968,42

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp1.890.800.800,00;

   e. Sub Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Rp6.927.285.544,77;

   f. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp1.303.983.449,00;

   g. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp943.435.085,20.

   telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat mempertahankan/mengupayakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memformulasikan kembali uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp248.287.728.130,58 atau 26,54% dari total belanja daerah diluar belanja dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan:

a. Sub kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Rp6.927.285.544,77;

b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp5.232.541.889,61

c. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp19.531.484.500,00;

d. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;

e. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp11.809.992.000,03;

f. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp23.435.039.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

   Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp514.315.237.424,14 atau 49,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp496.849.030.003,14 atau 47,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

   Alokasi anggaran tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

   Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran Penandaan Rincian Belanja Untuk Pemenuhan Belanja Wajib

   a. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah

      Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak air tanah harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

c. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp9.429.117.584,42 atau 4,28% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp220.396.483.089,93. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah Rp7.222.801.194,42, yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.131.359.210,00;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp500.000,00;

3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Rp500.000,00;

4) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp267.876.780,00;

5) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Rp3.982.339.900,00;

6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.340.446.968,42;

7) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp499.778.336,00;

b. Literasi dan Numerasi Rp1.525.058.026,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp200.000.000,00;

   2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp247.905.000,00;

   3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp499.300.000,00;

   4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp379.218.703,00;

   5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp171.085.900,00;

c. Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Rp185.652.084,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp182.352.000,00;

   2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp3.300.084,00;

d. Kekhususan PAUD Rp495.606.280,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp98.904.560,00;

   2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rp369.385.720,00;

   3) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp27.316.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp119.900.000,00 atau 0,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp165.748.024.720,80. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp4.050.000,00;
b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp100.000.000,00;
c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp100.000,00;
d. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp100.000,00;
e. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000,00;
f. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tidak dianggarkan;
g. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp3.950.000,00;
h. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Rp3.850.000,00;
i. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp2.000.000,00;
j. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.800.000,00;
k. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000,00;
l. Pelayanan Kesehatan Balita Rp3.850.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, alokasi anggaran kesehatan dimaksud juga diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
    1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
    2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
    3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
    4) konsumsi TTD ibu hamil;
    5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
    6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
    7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
    8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
    9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *stunting*);
    10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
    11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita;
c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
    1) Tuberkulosis (TBC);
    2) Human Immunodeficiency Virus (HIV);
    3) Malaria;
    4) Penyakit menular lainnya;

d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
   1) Diabetes Melitus;
   2) Hipertensi;
   3) Penyakit tidak menular lainnya;
e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
   1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
   2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu;
   3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
   4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
   5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
   1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
   2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
   3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology);
   4) tenaga kesehatan di Labkesda;
   5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
   6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.280.731.000,00 atau 3,81% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp86.168.244.926,07. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rp3.113.711.000,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.000.000.000,00;

   2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp400.000.000,00;

   3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.597.369.000,00;

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp167.020.000,00, yang tercantum antara lain pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp167.020.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

a. 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

b. 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten Kepulauan Anambas;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp75.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp37.720.817.840,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota Rp25.000.000,00, yang tercantum pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp25.000.000,00;

   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00;

   harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

   Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. SPM Sosial

   Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp180.245.458,00 atau 2,78% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp6.485.967.058,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti Rp180.245.458,00;

b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp501.568.446,00 atau 1,46% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp34.433.070.408,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota Rp105.186.096,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp105.186.096,00;

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp96.903.200,00 yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp4.400.100,00;

2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp87.514.500,00;

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp86.400.100,00, yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp9.800.100,00;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp6.600.000,00;

3) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp70.000.000,00;

d. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp186.685.230,00 yang tercantum pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Rp186.685.230,00;

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Rp26.393.820,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp26.393.820,00:

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

   Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Rp15.337.001.351,00 atau 1,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

   a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp4.078.558.831,77 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025;

   b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada SKPD Inspektorat Rp5.696.880.000,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025.

   Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp5.561.562.519,23 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp350.000.000,00;

b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp283.500.152,13;

c. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Rp111.882.089,00.

Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

   1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;

   2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;

   3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

   4) Reviu Laporan Keuangan;

   5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

   6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp9.664.383.006,00 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp6.731.459.135,98 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp2.932.923.870,02 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Rp192.463.911,00;

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp944.375.812,00;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp76.154.500,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Alokasi Anggaran untuk penguatan Posyandu.

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengalokasikan penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

   Untuk mendukung pelaksanaan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas:

      1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

      2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

      3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

   b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa; dan

   c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

   berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalokasikan anggaran untuk penguatan posyandu dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

   Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

   telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

   Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas Rp428.611.520,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp200.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Anambas, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

   Penyediaan anggaran untuk TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp438.612.785,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas melalui:

a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.

b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.

c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian.

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga.

e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.

f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

   1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
   2) gotong royong;
   3) pangan;
   4) sandang;
   5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
   6) pendidikan dan keterampilan;
   7) kesehatan;
   8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
   9) kelestarian lingkungan hidup; dan
   10) perencanaan sehat.

g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas, serta kegiatan lainnya.

i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp10.000.000,00;

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp25.080.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp512.450.000,00;

b. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp253.266.680,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp458.115.572,93, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

10. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp100.000.000,00;

b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp1.303.983.449,00;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp442.071.589,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

11. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

    Penyediaan anggaran untuk BAZNAS sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasi anggaran untuk BAZNAS dengan berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

12. Alokasi anggaran dari BLUD.

    Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

    a. Belanja Pegawai BLUD Rp3.978.528.712,50 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Pegawai BLUD Rp3.978.528.712,50 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

    b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp4.285.115.721,50 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

        1) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp4.275.115.721,50 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

        2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp10.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

    c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp954.953.332,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp954.953.332,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

    dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

13. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran yang bersumber dari Dana BOS, antara lain tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp0,00 atau 0% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

a. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;

b. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;

Tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Uraian	RKPD		KUA dan PPAS		Rancangan APBD	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	Program	134 245	1.395.871.930.542,00	129 228	895.875.237.337,00	129 224	1.040.859.314.973,00
2	Kegiatan	234 597		227 545		227 534	
3	Sub kegiatan	687 1743		659 1410		659 1384	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS yang diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan KUA serta PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada:

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp55.510.094,00;

Selanjutnya, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

   Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

   Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.

8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp882.480.955.551,00, sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	**882.480.955.551,00**	
Pendapatan Asli Daerah	**52.676.977.660,00**	**5,97**
Pajak Daerah	24.140.306.489,00	2,74
Retribusi Daerah	6.824.360.000,00	0,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.500.000.000,00	0,17
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.212.311.171,00	2,29
Pendapatan Transfer	**829.635.088.115,00**	**94,01**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.212.377.100,00	89,09
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.422.711.015,00	4,92
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**168.889.776,00**	**0,02**

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp52.676.977.660,00 atau 5,97% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi PAD per tanggal 30 September 2024 Rp39.179.339.491,00 atau 47,75% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp18.708.108.017,06;

b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp29.362.242.093,73 atau 69,98% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp41.958.839.490,00;dan

c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp29.686.658.850,51 atau 71,62% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp41.450.650.040,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.140.306.489,00 atau 2,74% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

      a) Pajak Hotel Rp5.000.000.000,00 atau 0,57% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

      b) Pajak Restoran Rp11.572.998.115,00 atau 1,31% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

d) Pajak Reklame Rp79.500.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

e) Pajak Penerangan Jalan Rp5.450.590.067,00 atau 0,62% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

f) Pajak Sarang Burung Walet Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00 atau 0,07% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp556.104.000,00 atau 0,06% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp567.630.000,00 atau 0,06% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.824.360.000,00 atau 0,77% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum Rp6.424.360.000,00 atau 0,73% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

b) Retribusi Jasa Usaha Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp300.000.000,00 atau 0,03% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.500.000.000,00 atau 0,17% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp20.212.311.171,00 atau 2,29% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 30 September 2024 Rp4.122.590.874,06 atau 38,71% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp10.651.035.000,00;

2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp13.430.535.000,00 atau 32,16% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp13.430.535.000,00;

3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp8.113.430.067,54 atau 51,25% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp15.829.942.385,00.

Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 atau 0,12% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp299.300.000,00 atau 0,03% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 atau 0,002% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan kembali atas Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi serta realisasi atas target penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Rp36.720.000,00 atau 0,004% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5) Pendapatan Dari Pengembalian Rp9.304.564.279,00 atau 1,054% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6) Pendapatan BLUD Rp9.494.606.892,00 atau 1,08% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 atau 0,004% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun

Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp829.635.088.115,00 atau 94,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan:

a Transfer Pemerintah Pusat Rp786.212.377.100,00 atau 89,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp225.034.315.100,00 terdapat selisih Rp100.008.669.100,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025, Rp125.025.646.000,00;

2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp411.148.179.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp411.148.179.000,00;

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp42.360.093.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp42.360.093.000,00;

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp61.863.312.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp61.863.312.000,00;

5) Insentif Fiskal Rp7.307.880.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp7.307.880.000,00;

6) Dana Desa Rp38.498.598.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp38.498.598.000,00;

b Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp43.422.711.015,00 atau 4,92% dari pendapatan daerah dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan;

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp3.776.846.244,00;

2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp2.926.145.243,00;

3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp25.258.857.245,00;

4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp41.291.965,00;

5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp11.419.570.318,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF),

pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai serta ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp168.889.776,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

   Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.2.1.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Berkaitan dengan itu, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Kabupaten/Kota digunakan:

   a. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ;

   b. kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ;

   c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   d. mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Tabel. 8
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja APBD TA 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**427.492.652.765,85**	**123.459.955.276,95**	**0,00**	**0,00**	**550.952.608.042,80**	**52,93**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.159.656.194,19	12.236.826.895,74	0,00	0,00	220.396.483.089,93	21,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	143.523.623.732,32	22.224.400.988,48	0,00	0,00	165.748.024.720,80	15,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.745.174.687,26	55.423.070.238,81	0,00	0,00	86.168.244.926,07	8,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.362.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	37.720.817.840,00	3,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.459.710.600,08	973.359.807,92	0,00	0,00	34.433.070.408,00	3,31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.242.351.552,00	243.615.506,00	0,00	0,00	6.485.967.058,00	0,62
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**84.672.713.136,70**	**11.469.289.071,39**	**0,00**	**0,00**	**96.142.002.208,09**	**9,24**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.411.100.420,37	0,00	0,00	0,00	1.411.100.420,37	0,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	523.000.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000.000,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	208.393.531,00	0,00	0,00	0,00	208.393.531,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	111.818.000,00	0,00	0,00	0,00	111.818.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.013.437.411,23	602.574.661,62	0,00	0,00	1.616.012.072,85	0,16%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.454.343.816,00	356.751.012,00	0,00	0,00	10.811.094.828,00	1,04%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.421.113.326,00	249.268.797,00	0,00	0,00	5.670.382.123,00	0,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	541.900.000,00	0,00	0,00	0,00	541.900.000,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.471.596.746,81	9.804.683.253,39	0,00	0,00	29.276.280.000,20	2,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.301.653.781,85	331.716.502,38	0,00	0,00	14.633.370.284,23	1,41

Urusan Pemerintahan	Belanja APBD TA 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.059.552.842,67	70.452.082,00	0,00	0,00	10.130.004.924,67	0,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.760.080.421,00	0,00	0,00	0,00	5.760.080.421,00	0,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.408.330.956,77	0,00	0,00	0,00	9.408.330.956,77	0,90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	188.132.000,00	0,00	0,00	0,00	188.132.000,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	196.431.896,00	0,00	0,00	0,00	196.431.896,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	865.716.680,00	0,00	0,00	0,00	865.716.680,00	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.574.484.146,00	53.842.763,00	0,00	0,00	4.628.326.909,00	0,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	161.627.161,00	0,00	0,00	0,00	161.627.161,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**30.654.975.153,27**	**169.443.655,50**	**0,00**	**0,00**	**30.824.418.808,77**	**2,96**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.325.753.147,50	131.413.507,50	0,00	0,00	21.457.166.655,00	2,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.984.020.138,00	34.598.664,00	0,00	0,00	7.018.618.802,00	0,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.253.927.430,00	3.431.484,00	0,00	0,00	1.257.358.914,00	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	562.498.845,00	0,00	0,00	0,00	562.498.845,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	528.775.592,77	0,00	0,00	0,00	528.775.592,77	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**84.846.742.106,00**	**1.298.169.186,00**	**0,00**	**0,00**	**86.144.911.292,00**	**8,28**
SEKRETARIAT DAERAH	49.238.099.380,00	900.244.715,00	0,00	0,00	50.138.344.095,00	4,82
SEKRETARIAT DPRD	35.608.642.726,00	397.924.471,00	0,00	0,00	36.006.567.197,00	3,46
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**60.492.590.200,24**	**1.121.925.315,00**	**40.832.174.778,10**	**105.213.314.659,00**	**207.660.004.952,34**	**19,95**
PERENCANAAN	14.194.515.740,25	534.697.149,00	0,00	0,00	14.729.212.889,25	1,42
KEUANGAN	30.749.182.161,99	399.887.864,00	40.832.174.778,10	105.213.314.659,00	177.194.559.463,09	17,02
KEPEGAWAIAN	8.658.219.898,00	61.787.296,00	0,00	0,00	8.720.007.194,00	0,84
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	944.375.812,00	0,00	0,00	0,00	944.375.812,00	0,09
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.809.114.613,00	0,00	0,00	0,00	1.809.114.613,00	0,17
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	4.137.181.975,00	125.553.006,00	0,00	0,00	4.262.734.981,00	0,41
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**14.946.889.241,87**	**390.112.109,13**	**0,00**	**0,00**	**15.337.001.351,00**	**1,47**
INSPEKTORAT DAERAH	14.946.889.241,87	390.112.109,13	0,00	0,00	15.337.001.351,00	1,47
UNSUR KEWILAYAHAN	**45.519.037.854,82**	**737.094.277,18**	**0,00**	**0,00**	**46.256.132.132,00**	**4,44**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.519.037.854,82	737.094.277,18	0,00	0,00	46.256.132.132,00	4,44
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**7.379.933.849,84**	**162.302.336,16**	**0,00**	**0,00**	**7.542.236.186,00**	**0,72**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.379.933.849,84	162.302.336,16	0,00	0,00	7.542.236.186,00	0,72
Total	756.005.534.308,59	138.808.291.227,31	40.832.174.778,10	105.213.314.659,00	1.040.859.314.973,00	100
Total Belanja Daerah	**1.040.859.314.973,00**					

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.040.859.314.973,00, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	**1.040.859.314.973,00**	**100**
Belanja Operasi	**756.005.534.308,59**	**72,63**
Belanja Pegawai	514.315.237.424,14	49,41
Belanja Barang dan Jasa	238.710.496.203,45	22,93
Belanja Hibah	2.819.705.681,00	0,27
Belanja Bantuan Sosial	160.095.000,00	0,02
Belanja Modal	**138.808.291.227,31**	**13,34**
Belanja Modal Tanah	3.821.080.000,00	0,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.323.515.793,56	2,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.819.649.701,74	2,48
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.807.124.696,01	8,24
Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00	0,001
Belanja Tidak Terduga	**40.832.174.778,10**	**3,92**
Belanja Transfer	**105.213.314.659,00**	**10,11**
Belanja Bagi Hasil	3.096.467.249,00	0,30
Belanja Bantuan Keuangan	102.116.847.410,00	9,81

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi 756.005.534.308,59 atau Rp72,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran unutuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp280.264.034.035,51 atau 26,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.215.875.109,04, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp40.874.000,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS

Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp20.000.000,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp265.000.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp735.000.000,00;

belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp553.326.825,57, atau terdapat selisih kurang Rp288.326.825,57;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp1.659.980.476,72, atau terdapat selisih kurang Rp924.980.476,72.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.000.000,00;

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

(2) Pelaksanaan *Medical Check Up* Rp200.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp2.292.556,00 yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

   a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.809.124.125,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

      (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp493.290.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp696.370.500,00 dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp89.096.700,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp630.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.001.200.000,00;

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.042.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp236.800.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun

Anggaran 2025, dianggrakan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp217.790.625,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp52.676.977.660,00 yaitu Rp79.015.466,49,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp218.528.762.391,13 atau 21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp105.597.338.441,47;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp2.899.240.076,86;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp10.324.465.145,88;

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp9.603.217.842,96;

e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp71.183.378.721,96;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambasmengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

a) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;

b) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

c) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem *Monitoring* Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan

d) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp18.921.122.162,00atau 1,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp10.871.482.421,00;

   b) Belanja Tambahan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp5.696.225.000,00;

   c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp898.500.000,00.

   Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

   a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

      Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.5)Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

      Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

   b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, honorarium tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp238.710.496.203,45 atau 22,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp77.851.402.662,09 atau 7,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp75.719.167.961,14 atau 7,27% dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp1.587.560.177,85, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp624.878.700,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

(2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.547.972.397,87, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp577.801.224,41 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

(3) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp1.145.113.857,00 yang tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp770.920.510,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;

(4) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp854.357.694,17, yang antara lain tercantum pada Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp910.479.544,79, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp89.735.986,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.407.259.545,52, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp151.220.850,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

(7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.902.365.781,31 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar;

(b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp197.832.300,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

(8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.078.229.993,57, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp83.771.093,00 pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;

(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp4.198.153.266,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp2.083.694.150,00

pada Sub Pengadaan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan;

(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.953.724.643,17 yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp243.082.049,49 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;

(11) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.850.000.000,00 yang tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.850.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(12) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp5.550.061.118,60 yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp5.407.492.500,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(13) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp2.089.774.172,11 yang antara lain tercantum pada Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;

(14) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.797.787.962,84 yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp358.800.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;

(15) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.645.031.284,56 yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp372.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;

(16) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp7.226.084.923,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp2.000.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;

(17) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp997.042.843,25 yang antara lain tercantum pada Belanja Pakaian Adat Daerah Rp197.383.978,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp470.362.023,35 atau 0,05% dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp465.967.601,35 yang antara lain tercantum pada Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp465.929.476,35 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.661.872.677,60 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya Rp560.000.000,00 yang tercantum pada Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya Rp560.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan local;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp24.996.766.667,09 yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.108.581.109,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

(2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.664.370.030,77 pada Sub Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan;

(3) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.610.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

(4) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.557.953.050,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;

(5) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.190.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;

(6) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.064.335.275,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai

siap diserahkan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.332.089.002,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp825.589.002,00 atau 0,08% dari belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp545.840.000,00;

   (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp506.500.000,00 atau 0,05% dari belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp506.500.000,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;

b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

c) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan

d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp91.468.116.565,15 atau 8,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp53.665.447.983,64 atau 5,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.300.473.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp691.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp6.026.906.622,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp540.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.268.400.000,00 yang antara lain tercantum pada Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

(4) Honorarium Rohaniwan Rp827.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Rohaniwan Rp819.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;

(5) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp800.400.000,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp400.200.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

(b) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp400.200.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

(6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp8.351.093.396,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp8.298.526.276,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

(7) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp5.267.742.522,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.033.503.120,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

(b) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.199.808.780,00 pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;

(8) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp4.549.343.978,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp3.421.343.978,00 pada Sub Kegiatan Relasi Media;

(9) Belanja Tagihan Listrik Rp4.662.696.586,64 yang antara lain tercantum pada Belanja Tagihan Listrik Rp1.410.764.640,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

(10) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp3.235.730.627,42 yang antara lain tercantum pada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp2.694.341.952,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;

(11) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp10.438.115.600,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

(b) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.308.300.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

(c) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.061.760.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp10.393.071.600,00 atau 1% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp1.012.598.400,00;

(2) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp7.980.000.000,00;

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp705.600.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp46.027.200,00;

(5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp385.656.000,00;

(6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp263.190.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.449.442.562,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.677.394.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp1.657.344.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp4.511.707.007,27 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp2.699.557.309,97 yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp353.105.325,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp978.969.450,86 yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp225.302.445,36 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp17.622.305.412,24 atau 1,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

  (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp4.961.430.112,69, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp2.546.888.727,19 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

  (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp1.480.000.000,00, yang antara lain tecantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp820.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;

  (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp3.704.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp3.245.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;

  (d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp2.685.700.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp1.170.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan,

Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp3.552.449.499,55, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp1.450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp1.206.842.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Bimbingan Teknis Rp44.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bimbingan Teknis Rp44.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp790.306.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ *workshop*/ kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Pemeliharaan Rp5.794.068.827,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.453.462.190,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp1.106.522.722,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp330.575.120,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

      (2) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp900.100.000,00 yang antara lain tercantum pada:

         (a) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;

         (b) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

   b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.340.606.637,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp724.046.460,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp322.960.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Perjalanan Dinas Rp57.894.553.425,71 atau 5,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp57.878.137.201,71 ataa 5,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp39.564.860.288,19, yang antara lain tercantum pada:

      (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.264.072.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;

      (b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.923.680.809,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

      (c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.867.104.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

      (d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.996.241.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

      (e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.496.728.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;

   (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp18.166.611.913,52 yang antara lain tercantum pada:

      (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.253.200.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;

      (b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.157.978.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp16.416.224,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp16.416.224,00, yang tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp16.416.224,00 pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya

dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat Daerah Rp1.264.072.000,00 atau 2,52% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp50.138.344.095,00;

b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat Daerah Rp1.923.680.809,00 atau 3,84% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp50.138.344.095,00;

c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD Rp1.867.104.000,00 atau 5,19% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;

d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sekretariat DPRD Rp1.253.200.000,00 atau 3,48% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;

e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sekretariat DPRD Rp1.157.978.000,00 atau 3,22% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;

f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD Rp2.996.241.000,00 atau 8,32% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;

g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD Rp2.496.728.000,00 atau 6,93% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp2.819.705.681,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 10, sebagai berikut:

Tabel. 10
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	12.187.692.396,00	10.234.147.577,00	83,97	916.647.866.316,00	1,33
APBD 2023	18.616.010.962,00	17.149.119.101,00	92,12	1.250.230.911.389,00	1,49
APBD 2024	23.314.479.156,00	21.432.592.712,00	91,93	1.009.126.863.684,00	2,31
Rancangan APBD 2025	2.819.705.681,00	0,00	-	1.040.859.314.973,00	0,27

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp23.184.368.581,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.009.126.863.684, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp18.616.010.962,00 atau 1,49% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD

Tahun Anggaran 2023 Rp1.250.230.911.389,00, dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp12.187.692.396,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.400.198.092,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.708.288.000,00 yang antara lain pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;

2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp691.910.092,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp441.910.092,00 yang tercantum pada sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp253.266.680,00 pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi

urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp419.507.589,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp160.095.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel. 11
Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	2.556.981.500,00	134.715.000,00	5,27	916.647.866.316,00	0,28
APBD 2023	1.446.084.030,00	161.614.000,00	11,18	1.250.230.911.389,00	0,12
APBD 2024	682.796.000	339.453.000,00	49,72	1.009.126.863.684,00	0,01
Rancangan APBD 2025	160.095.000,00	0,00	-	1.040.859.314.973,00	0,02

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun

Anggaran 2024 Rp682.796.000 atau 0,01% dari total belanja daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.009.126.863.684,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.446.084.030,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.250.230.911.389,00, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.556.981.500,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00;

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp138.808.291.227,31 atau 13,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah Rp3.821.080.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp3.821.080.000,00, yang diuraikan ke rincian objek belanja:

    1) Belanja Modal Tanah Persil Rp622.700.000,00, atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

        a) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp386.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

        b) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp236.700.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp186.700.000,00 pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

    2) Belanja Modal Lapangan Rp3.198.380.000,00, atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp3.198.380.000,00, pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

    dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp23.323.515.793,56 atau 2,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Alat Besar Rp1.373.399.868,30 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp62.219.095,30, atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mesin Proses Rp62.219.095,30, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Mesin Proses Rp18.043.896,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat DPRD;

b) Belanja Modal Alat Besar Apung Rp587.929.660,00, atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Besar Apung Rp360.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c) Belanja Modal Alat Bantu Rp723.251.113,00, atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Electric Generating Set* Rp722.232.133,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp4.854.549.093,70 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.451.443.509,90 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp400.000.000,00, pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp664.856.056,90, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp43.629.216,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp43.338.372,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp154.460.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.269.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp3.105.583,80 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp3.105.583,80;

c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp2.400.000.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Rp2.400.000.000,00;

3) Belanja Modal Alat Pertanian Rp13.164.941,82 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Belanja Modal Alat Pengolahan Rp13.164.941,82 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp10.877.291,82;

b) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan Rp2.287.650,00;

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.359.671.282,89 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kantor Rp240.169.237,20 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp232.126.507,20;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.355.201.730,45 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Mebel Rp2.856.689.322,00;

(2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp644.601.268,90;

c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp764.300.315,24 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp227.693.652,63;

(2) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp302.450.457,61;

(3) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp97.959.503,00;

5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp23.721.145,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp13.011.250,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp13.011.250,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

b) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp10.709.895,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System* Rp10.709.895,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Jemaja;

6) Belanja Modal Komputer Rp5.113.660.382,25 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Komputer Unit Rp3.644.802.005,91 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Computer Rp3.644.802.005,91, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Modal Personal Computer Rp746.833.066,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(2) Belanja Modal Personal Computer Rp469.922.660,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(3) Belanja Modal Personal Computer Rp133.255.962,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

(4) Belanja Modal Personal Computer Rp352.349.803,90 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(5) Belanja Modal Personal Computer Rp202.772.518,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Inspektorat Daerah;

b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.468.858.376,34 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp203.360.370,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp278.993.025,68;

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp986.504.980,66;

7) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp35.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Rp35.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp35.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

8) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp54.981.772,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas DaratRp54.981.772,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp54.981.772,00, pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

9) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp13.934.032,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp13.934.032,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Permainan Rp13.934.032,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp25.819.649.701,74 atau 2,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp25.609.649.701,74 atau 2,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp25.609.649.701,74 atau 2,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp8.507.341.456,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp9.228.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp8.353.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp7.874.308.245,74, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp199.677.558,12 pada Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp391.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp158.107.801,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.870.312.790,60 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp210.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp210.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp85.807.124.696,01 atau 8,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp82.777.048.176,01 atau 7,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan Rp73.076.949.440,00atau 7,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp40.718.267.600,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp10.881.490.800,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

(b) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp350.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

(c) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp7.255.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

(2) Belanja Modal Jalan Desa Rp32.358.681.840,00 pada Sub Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b) Belanja Modal Jembatan Rp9.700.098.736,01 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp9.700.098.736,01, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jembatan Rp9.610.098.736,01 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

2) Belanja Modal Bangunan Air Rp3.030.076.520,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp860.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp860.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp910.444.565,00 atau 0,09%dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp910.444.565,00, yang tercantum pada:

(1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

(2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Breakwater pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp310.444.565,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1.259.631.955,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Rp1.259.631.955,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Belanja Modal Aset Lainnya Rp36.921.036,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp36.921.036,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp36.921.036,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel

dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp5.312.710.868,60 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    1) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.226.336.852,60 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.026.840.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
        b) Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy Rp3.199.496.852,60, pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp86.374.016,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        a) Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp10.374.016,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
        b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp76.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp213.769.075,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran

2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp213.769.075,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Photo and Film Equipment* Rp213.769.075,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

   Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp40.832.174.778,10 atau 3,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan.

   Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

   1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp443.768.531,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek antara lain "Belanja Modal Mebel" Rp71.665.965,00 pada Sekretariat DPRD;
   2. Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD Rp658.874.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp458.874.000,00 pada Sekretariat DPRD;

3. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp1.642.970.588,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp416.052.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp1.890.800.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website" Rp105.000.000,00 dan "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp102.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp229.626.960,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp80.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Rp484.101.808,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp47.100.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp1.279.276.487,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek antara lain:
   a. Belanja Modal Mesin Proses Apung Rp227.929.660,00;
   b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp58.162.889,00;
   c. Belanja Modal Mebel Rp17.136.960,00;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing

substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp2.147.687.529,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.867.104.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
2. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Rp124.010.000,00 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp103.500.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp360.878.000,00 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp291.878.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan Rp360.878.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp291.878.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
5. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.011.480.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp711.480.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
6. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD Rp576.012.649,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp560.129.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
7. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Rp1.280.257.800,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan" Rp990.000.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
8. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp1.266.100.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp1.253.200.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

9. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Rp355.478.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp291.878.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Rp1.535.648.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.157.978.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp3.035.721.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp2.996.241.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Rp2.520.099.258,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp2.496.728.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

F. Pendanaan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp10.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp10.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp161.736.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp161.736.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp16.428.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp16.428.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp112.440.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp112.440.000,00 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
5. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp7.308.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp7.308.000,00 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
6. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp257.280.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp257.280.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp40.200.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp40.200.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
8. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp33.564.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp33.564.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar tetap mempertahankan dan konsisten terhadap pendanaan sub kegiatan tersebut mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

G. Penggunaan Alokasi Pagu Belanja yang Tidak Sesuai Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Paket/Pengiriman" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp35.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos" Rp18.410,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp41.834.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos" Rp282.600,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp9.800.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos" Rp100,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Sub Kegiatan dari aspek teknis penganggaran, penyediaan alokasi pagu belanja dimaksud belum disusun berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan alokasi pagu belanja dimaksud berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

H. Sub Rincian Obyek yang Tidak Menggambarkan Satuan Terkecil Sub Rincian Obyek Belanja Daerah yang Akan Ditransaksikan Sesuai Anggaran Berbasis Kinerja

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp69.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp69.000.000,00 pada Sekretariat DPRD;
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp60.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp60.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp4.400.100,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan" Rp4.400.100,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp2.700.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp2.700.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

tidak menggambarkan satuan terkecil sub rincian obyek belanja daerah yang akan ditransaksikan sesuai anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

I. Pendanaan Sub Kegiatan dan Uraian Belanja yang Tidak Menggambarkan Keluaran Sesuai Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja yang Diharapkan Apabila Ditinjau Dari Aspek Indikator, Tolok Ukur dan Target Kinerja

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp500.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp500.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp1.408.220,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak" Rp16.124,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp50.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp50.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp100.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp100.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp150.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp150.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyediaan anggaran pada sub kegiatan dan uraian belanja dimaksud tidak menggambarkan keluaran sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja yang diharapkan, apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Pembiayaan Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	**158.378.359.422,00**	**15,22**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**158.378.359.422,00**	**15,22**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.878.359.422,00	15,17
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	0,05
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	-

C. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Rp158.378.359.422,00 atau 15,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp157.878.359.422,00 atau 15,17% dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp500.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.040.859.314.973,00, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD Tahun Anggaran 2022	48.091.005.786,00	6.984.586.830,57	14,52	916.647.866.316,00	5,25
APBD Tahun Anggaran 2023	102.045.555.597,00	23.949.728.959,68	23,47	1.250.230.911.389,00	8,16
APBD Tahun Anggaran 2024 (Realisasi s.d. 30 September 2024)	23.949.728.959,00	69.245.754.284,41	289,13	1.009.126.863.684,00	2,37

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025	157.878.359.422,00	0,00	-	1.040.859.314.973,00	15,17

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp23.949.728.959,00 atau 2,37% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.009.126.863.684,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp102.045.555.597,00 atau 8,16% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.250.230.911.389,00, dan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp48.091.005.786,00 atau 5,25% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;

8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

J. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi

pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
2. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
      1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
      2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
      3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
      4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
      5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
      6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
      7) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
      8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
   b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
      1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
      2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten Kepulauan Anambas;

3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;

5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;

6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;

7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;

8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;

9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Kepulauan Anambas terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana

dimaksud pada butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.

5. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

P. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, untuk:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Q. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;

6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

R. Alokasi Anggaran untuk Konektivitas Transportasi Perhubungan Udara
Dalam rangka mendukung konektivitas transportasi perhubungan udara ke daerah DPN, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk:

1. mendukung konektivitas perhubungan udara pada rute penerbangan yang belum memiliki akses penerbangan rutin;
2. dukungan akses penerbangan ke daerah DPN melalui penyiapan anggaran berupa belanja subsidi tiket penerbangan atau belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain berupa penyediaan jaminan *block seat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk kelancaran dukungan konektivitas penerbangan yang bersumber dari APBD dimaksud;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.24.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

S. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan

6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;

T. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menformulasikan kembali sinkronisasi alokasi anggaran kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

U. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp97.000.000,00.

V. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BERDASARKAN HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

b. bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1454 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dibahas bersama oleh Kepala Daerah yang melalui TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tenang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Persetujuan Penetapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA : Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RIAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JHON AQUARIUS PUTRA, S.E., M.Si.
NIP. 19730122 200312 1 007

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

PEMBAHASAN HASIL EVALUASI GUBERNUR TENTANG RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	HASIL EVALUASI	HASIL PEMBAHASAN / PENYEMPURNAAN
1	2	3
I.	**TUJUAN EVALUASI** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.	
II.	**GAMBARAN UMUM EVALUASI** Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	**II. Gambaran Umum Evaluasi** Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan

	dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebelum ditetapkan Bupati Kepulauan Anambas, meliputi: A. Fokus kebijakan pembangunan daerah tahun 2025: 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,09-5,09%. 2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 2,42%. 3. Proyeksi Kemiskinan Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 5,7%. 4. Proyeksi Gini Rasio Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,25%. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/RPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target	Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel. 1

Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 September 2024					
PENDAPATAN DAERAH	869.056.860.530,00	824.553.991.952,51	94,888	1.149.685.355.791,00	998.370.281.042,73	86,84	984.762.634.724,00	614.554.874.309,06	62,41	1,32	0,86	0,90	1,03
Pendapatan Asli Daerah	41.450.650.040,00	29.686.658.850,51	71,62	41.958.839.490,00	29.362.242.093,73	69,98	39.179.339.491,00	18.708.108.017,06	47,75	1,01	0,93	1,34	1,09
Pendapatan Transfer	815.808.870.490,00	783.315.186.389,00	96,02	1.107.726.516.301,00	969.008.038.949,00	87,48	942.803.795.233,00	595.710.127.868,00	63,18	1,36	0,85	0,88	1,03
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.797.340.000,00	11.552.146.713,00	97,92	0,00	0,00	0,00	2.779.500.000,00	136.638.424,00	4,92	-	-	0,06	0,02

Berdasarkan tabel di atas, untuk tren target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,03%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya

	berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersumber dari retribusi. 3. Pengembangan Infrastruktur Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan. 4. Kerjasama dan Kemitraan Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. 5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor. 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 7. Pengawasan dan Akuntabilitas Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. C. Belanja Daerah	

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 September 2024					
BELANJA DAERAH	916.647.866.316,00	865.767.979.709,20	94,45	1.250.230.911.389,00	980.270.183.929,64	78,41	1.009.126.863.684,00	569.814.015.003,00	56,47	1,36	0,81	1,03	1,07
Belanja Operasi	683.927.636.741,00	640.801.958.959,20	93,69	803.457.038.265,00	683.833.368.630,64	85,11	752.976.624.135,00	448.748.211.474,00	59,60	1,17	0,94	1,00	1,04
Belanja Modal	123.853.270.356,00	120.401.935.455,00	97,21	251.278.933.169,00	184.291.542.980,00	73,34	141.992.627.668,00	46.712.489.525,00	32,90	2,03	0,57	0,98	1,19
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	-	68.799.839.255,00	0,00	-	2.357.203.001,00	0,00	-	126,70	0,02	17,32	28,72
Belanja Transfer	107.866.959.219,00	104.564.085.295,00	96,94	126.695.100.700,00	112.145.272.319,00	88,52	111.800.408.879,00	74.353.314.004,00	66,51	1,17	0,88	0,94	1

	Berdasarkan tabel di atas untuk tren target belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,07%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan antara lain: 1. Perencanaan Anggaran yang Tepat Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran. 2. Anggaran Berbasis Kinerja Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja. 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 4. *E-Government* dan *E-Procurement* Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien. 5. *Monitoring* dan Evaluasi Program Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang	

direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 September 2024					
PEMBIAYAAN DAERAH	47.591.005.786,00	48.198.574.587,26	101,28	100.545.555.597,00	5.849.631.846,59	5,82	24.449.728.959,00	24.504.894.978,35	100,23	2,11	0,24	6,48	2,95
Penerimaan Pembiayaan	48.591.005.786,00	49.198.574.587,26	101,25	102.545.555.597,00	7.849.631.846,59	7,65	24.449.728.959,00	24.504.894.978,35	100,23	2,11	0,24	6,48	2,95
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas untuk tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan rata-rata

sebesar 2,95%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.

2. Biaya per Layanan Publik

   Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

3. Evaluasi Kinerja Program

   Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah	B/900.1.1/291/Setda.BPKPD/SD/07/2024	16 Juli 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	B/900.1.1/260/KDH/SD/07/2024	16 Juli 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3	Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	100.3.7/008/Kdh.KKA/MoU/VIII/2024 dan 100.3.7/01/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024	22 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	100.3.7/009/Kdh.KKA/MoU/VIII/2024 dan 100.3.7/02/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024	22 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	B/900.1.1/411/KDH/SD/10/2024	29 Oktober 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	05/BA/DPRD.KKA/XI/2024 dan 06/BA/Kdh.KKA/XI/2024	25 November 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)

7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	B/900.1.1/442/KDH/SD/11/2024	28 November 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Ranperda tentang APBD)	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selanjutnya agar dapat konsisten pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk tahapan proses penyusunan APBD ada yang tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal yang seharusnya dikarenakan adanya dinamika penyusunan dari pembahasan serta penyesuaian belanja.

	2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan 4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
III.	**SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH** A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025. 1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*. Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp12.292.912.055,48 atau 1,42% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor	

	050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp400.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp18.712.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

		Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran pengendalian inflasi Rp59.497.079.237,75 atau 5,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Rp920.000.000,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan; b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp405.000.000,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan; c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp113.567.931,00 pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun	

	2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan Rp22.907.026.770,07 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp9.356.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp189.687.650,01 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	

	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:	4. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka makan bergizi sehat belum dianggarkan dikarnakan aturan yang jelas terkait besaran anggaran makan bergizi belum ada. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan permendagri 15 Tahun 2024 akan menyesuaikan penganggaran makan bergizi dengan mekanisme pergeseran anggaran Tahun 2025.

	a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat dan lengkap (tuna wisma); b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah sebagai acuan seluruh *stakeholder*; c. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk penerapan hunian berimbang; d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR); e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan; g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah; h. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain: a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan; b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;	

	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah. Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp16.742.017.484,00 atau 4,47% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp374.139.617.522,76 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	7. Penggunaan produk dalam negeri Kabupaten Kepulauan anambas belum memberi taging pada sandar satuan harga di sipd, selanjutnya Kabupaten Kepulauan anambas akan menyesuaikan sandar satuan harga pada sipd dengan p3dn yang seharusnya.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan pemanfaatan Sumber daya ekonomi unggulan daerah	17.644.928.529,70	1,70
2.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berbudaya	98.111.370.731,00	9,43
3.	Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas	129.581.601.858,00	12,45
4.	Optimalisasi reformasi birokrasi	773.744.553.356,61	74,34
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.019.082.454.475,31	97,91
Total Belanja Daerah		1.040.859.314.973,00	

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(mandatory spending)*, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

   Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan Rp233.240.856.005,00 atau 22,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan:

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp3.710.949.816,00;

   ~~b.~~ Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp5.232.541.889,61

   c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.340.446.968,42

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp1.890.800.800,00;

	e. Sub Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Rp6.927.285.544,77; f. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp1.303.983.449,00; g. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp943.435.085,20. telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat mempertahankan/mengupayakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya. Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51	

	Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memformulasikan kembali uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp248.287.728.130,58 atau 26,54% dari total belanja daerah diluar belanja dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan: a. Sub kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Rp6.927.285.544,77;	2. Alokasi infrakstruktur Kabupaten Kepulauan Anambas akan secara bertahap meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan sebagaimama amanat Undang-Undang Dasar Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

	b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp5.232.541.889,61 c. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp19.531.484.500,00; d. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00; e. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp11.809.992.000,03; f. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp23.435.039.000,00; belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas	

	fiskal daerah, sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
	3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp514.315.237.424,14 atau 49,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp496.849.030.003,14 atau 47,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	3. Pemerintah daerah Kabupaten Anambas akan terus mendorong penyesuaian belanja pegawai secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini terjadinya peningkatan belanja pegawai dikarenakan pemerintah telah menganggarkan belanja pppk untuk formasi penerimaan Tahun 2024-2025.

	Alokasi anggaran tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Alokasi Anggaran Penandaan Rincian Belanja Untuk Pemenuhan Belanja Wajib a. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak air tanah harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.	a. Pemerintah Kabupaten Anambas telah melakukan pengecekan kembali di SIPD dan telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2025.

	b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.	b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan pengecekan kembali di SIPD untuk hasil penerimaan Opsen Pajak kendaraan bermotor dan telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
	c. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.	c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan pengecekan kembali di SIPD untuk Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
	D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut: 1. SPM Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp9.429.117.584,42 atau 4,28% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp220.396.483.089,93. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:	

	a. Angka Partisipasi Sekolah Rp7.222.801.194,42, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.131.359.210,00; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp500.000,00; 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Rp500.000,00; 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp267.876.780,00; 5) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Rp3.982.339.900,00; 6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.340.446.968,42; 7) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp499.778.336,00; b. Literasi dan Numerasi Rp1.525.058.026,00, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp200.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp247.905.000,00; 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp499.300.000,00; 4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp379.218.703,00; 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp171.085.900,00; c. Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Rp185.652.084,00, yang antara lain tercantum pada:	

	1) Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp182.352.000,00; 2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp3.300.084,00; d. Kekhususan PAUD Rp495.606.280,00, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp98.904.560,00; 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rp369.385.720,00; 3) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp27.316.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.	

	Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp119.900.000,00 atau 0,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp165.748.024.720,80. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp4.050.000,00; b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp100.000.000,00; c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp100.000,00; d. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp100.000,00; e. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000,00; f. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tidak dianggarkan; g. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp3.950.000,00; h. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Rp3.850.000,00; i. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp2.000.000,00; j. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.800.000,00; k. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000,00;	

		l. Pelayanan Kesehatan Balita Rp3.850.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, alokasi anggaran kesehatan dimaksud juga diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;	

	b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*: 1) peningkatan skrining anemia remaja putri; 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; 3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*); 4) konsumsi TTD ibu hamil; 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *stunting*); 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita; c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Tuberkulosis (TBC); 2) Human lmmunodeficiency Virus (HIV); 3) Malaria; 4) Penyakit menular lainnya; d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; 2) Hipertensi;	

	3) Penyakit tidak menular lainnya; e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu; 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda); f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); 4) tenaga kesehatan di Labkesda; 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan	

6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.280.731.000,00 atau 3,81% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp86.168.244.926,07. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rp3.113.711.000,00, yang antara lain tercantum pada:
   1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.000.000.000,00;
   2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp400.000.000,00;
   3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.597.369.000,00;
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp167.020.000,00, yang tercantum antara lain pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp167.020.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

a. 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

	b. 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp75.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp37.720.817.840,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:	

	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota Rp25.000.000,00, yang tercantum pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp25.000.000,00; b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota Rp50.000.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

	5. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp180.245.458,00 atau 2,78% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp6.485.967.058,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti Rp180.245.458,00; b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja	

kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. SPM Trantibumlinmas

   Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp501.568.446,00 atau 1,46% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp34.433.070.408,00.

   Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

   a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota Rp105.186.096,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp105.186.096,00;
   b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp96.903.200,00 yang antara lain tercantum pada:
      1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp4.400.100,00;
      2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp87.514.500,00;
   c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp86.400.100,00, yang antara lain tercantum pada:
      1) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp9.800.100,00;
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp6.600.000,00;

	3) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp70.000.000,00; d. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp186.685.230,00 yang tercantum pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Rp186.685.230,00; e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Rp26.393.820,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp26.393.820,00: harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja	

	kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan. Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Rp15.337.001.351,00 atau 1,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

		Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp4.078.558.831,77 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025; b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada SKPD Inspektorat Rp5.696.880.000,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp5.561.562.519,23 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp350.000.000,00; b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp283.500.152,13; c. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Rp111.882.089,00. Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan secara bertahap meningkatkan penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penguatan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan.

	Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: a. kegiatan pengawasan, yaitu: 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja; 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	

	b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP. c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton; sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp9.664.383.006,00 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp6.731.459.135,98 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp2.932.923.870,02 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	

	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Rp192.463.911,00; b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp944.375.812,00; c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp76.154.500,00. Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Alokasi Anggaran untuk penguatan Posyandu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengalokasikan penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Untuk mendukung pelaksanaan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas: 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;	

	2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa. b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa; dan c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalokasikan anggaran untuk penguatan posyandu dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	

	telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas Rp428.611.520,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp200.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

	sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Anambas, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Penyediaan anggaran untuk TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp438.612.785,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas melalui: a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar. b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual. c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian. d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan	

	pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga. e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat. f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat.	

	g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas, serta kegiatan lainnya. i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran	

belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

   Penyediaan anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp10.000.000,00;
   b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp25.080.000,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

   Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

   a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp512.450.000,00;
   b. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp253.266.680,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir

	5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 9. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum. Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp458.115.572,93, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 10. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp100.000.000,00; b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp1.303.983.449,00; c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp442.071.589,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

11. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

    Penyediaan anggaran untuk BAZNAS sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasi anggaran untuk BAZNAS dengan berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

12. Alokasi anggaran dari BLUD.

    Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

    a. Belanja Pegawai BLUD Rp3.978.528.712,50 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Pegawai BLUD Rp3.978.528.712,50 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

    b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp4.285.115.721,50 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

        1) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp4.275.115.721,50 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

        2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp10.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

    c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp954.953.332,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp954.953.332,00

	pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
	13. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas belum mengalokasi anggaran yang bersumber dari Dana BOS, antara lain tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp0,00 atau 0% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada: a. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; b. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama; Tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana	13. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan kembali pada Sub Kegiatan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Dan pada Sub Kegiatan pengelolaan Dana BOS Sekolah menengah Pertama sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Uraian	RKPD		KUA dan PPAS		Rancangan APBD	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	Program	134 245	1.395.871.930.542,00	129 228	895.875.237.337,00	129 224	1.040.859.314.973,0
2	Kegiatan	234 597		227 545		227 534	
3	Sub kegiatan	687 1743		659 1410		659 1384	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS yang diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan KUA serta PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada:

- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp55.510.094,00; Selanjutnya, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata	Kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang diuraikan pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengalami mal-aplikasi atau error aplikasi karena pada tampilan antarmuka SIPD pada RKPD diatas, sub kegiatan ini sudah termuat, namun di dokumen manual, pagunya ter-rekam nol.

		Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub	

	kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
V.	**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH** A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah 1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 202l tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun	

	2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan	

	serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. 6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan	

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp882.480.955.551,00, sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	**882.480.955.551,00**	
Pendapatan Asli Daerah	**52.676.977.660,00**	**5,97**
Pajak Daerah	24.140.306.489,00	2,74
Retribusi Daerah	6.824.360.000,00	0,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.500.000.000,00	0,17
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.212.311.171,00	2,29
Pendapatan Transfer	**829.635.088.115,00**	**94,01**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.212.377.100,00	89,09
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.422.711.015,00	4,92
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**168.889.776,00**	**0,02**

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp52.676.977.660,00 atau 5,97% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

   Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

   a. Realisasi PAD per tanggal 30 September 2024 Rp39.179.339.491,00 atau 47,75% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp18.708.108.017,06;
   b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp29.362.242.093,73 atau 69,98% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp41.958.839.490,00;dan
   c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp29.686.658.850,51 atau 71,62% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp41.450.650.040,00.

   Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.140.306.489,00 atau 2,74% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel Rp5.000.000.000,00 atau 0,57% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

b) Pajak Restoran Rp11.572.998.115,00 atau 1,31% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

d) Pajak Reklame Rp79.500.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

e) Pajak Penerangan Jalan Rp5.450.590.067,00 atau 0,62% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

f) Pajak Sarang Burung Walet Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00 atau 0,07% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp556.104.000,00 atau 0,06% dari pendapatan daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp567.630.000,00 atau 0,06% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.824.360.000,00 atau 0,77% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum Rp6.424.360.000,00 atau 0,73% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

b) Retribusi Jasa Usaha Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp300.000.000,00 atau 0,03% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan

		makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.500.000.000,00 atau 0,17% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian	

		Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

	Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp20.212.311.171,00 atau 2,29% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 30 September 2024 Rp4.122.590.874,06 atau 38,71% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp10.651.035.000,00; 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp13.430.535.000,00 atau 32,16% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp13.430.535.000,00;	

		3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp8.113.430.067,54 atau 51,25% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp15.829.942.385,00. Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: 1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 atau 0,12% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp299.300.000,00 atau 0,03% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4)	

		huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 atau 0,002% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan kembali atas Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi serta realisasi atas target penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Rp36.720.000,00 atau 0,004% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun	

		2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5) Pendapatan Dari Pengembalian Rp9.304.564.279,00 atau 1,054% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 6) Pendapatan BLUD Rp9.494.606.892,00 atau 1,08% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 atau 0,004% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan	

	Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp829.635.088.115,00 atau 94,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan: a Transfer Pemerintah Pusat Rp786.212.377.100,00 atau 89,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp225.034.315.100,00 terdapat selisih Rp100.008.669.100,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025, Rp125.025.646.000,00; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp411.148.179.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp411.148.179.000,00;	a. Terhadap selisih DBH sebesar Rp100.008.669.100,00 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengasumsikan adanya alokasi Kurang Bayar DBH Tahun 2024.

	3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp42.360.093.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp42.360.093.000,00; 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp61.863.312.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp61.863.312.000,00; 5) Insentif Fiskal Rp7.307.880.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp7.307.880.000,00; 6) Dana Desa Rp38.498.598.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024, Rp38.498.598.000,00; b Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp43.422.711.015,00 atau 4,92% dari pendapatan daerah dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan; 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp3.776.846.244,00; 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp2.926.145.243,00; 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp25.258.857.245,00; 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp41.291.965,00; 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp11.419.570.318,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun	

		2023 sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF), pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai serta ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana	

	Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp168.889.776,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.2.1.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan itu, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Kabupaten/Kota digunakan: a. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ; b. kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ;	

	c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
VI.	**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH** A. Kebijakan Umum Belanja Daerah 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. 3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri	

	Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. B. Urusan Pemerintah Daerah	

Tabel. 8
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja APBD TA 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**427.492.652.765,85**	**123.459.955.276,95**	**0,00**	**0,00**	**550.952.608.042,80**	**52,93**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.159.656.194,19	12.236.826.895,74	0,00	0,00	220.396.483.089,93	21,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	143.523.628.732,32	22.224.400.988,48	0,00	0,00	165.748.024.720,80	15,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.745.174.687,26	55.423.070.238,81	0,00	0,00	86.168.244.926,07	8,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.362.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	37.720.817.840,00	3,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.459.710.600,08	973.359.807,92	0,00	0,00	34.433.070.408,00	3,31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.242.351.552,00	243.615.506,00	0,00	0,00	6.485.967.058,00	0,62
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**84.672.713.136,70**	**11.469.289.071,39**	**0,00**	**0,00**	**96.142.002.208,09**	**9,24**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.411.100.420,37	0,00	0,00	0,00	1.411.100.420,37	0,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	523.000.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000.000,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	208.393.531,00	0,00	0,00	0,00	208.393.531,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	111.818.000,00	0,00	0,00	0,00	111.818.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.013.437.411,23	602.574.661,62	0,00	0,00	1.616.012.072,85	0,16%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.454.343.816,00	356.751.012,00	0,00	0,00	10.811.094.828,00	1,04%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.421.113.326,00	249.268.797,00	0,00	0,00	5.670.382.123,00	0,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	541.900.000,00	0,00	0,00	0,00	541.900.000,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.471.596.746,81	9.804.683.253,39	0,00	0,00	29.276.280.000,20	2,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.301.653.781,85	331.716.502,38	0,00	0,00	14.633.370.284,23	1,41

Urusan Pemerintahan	Belanja APBD TA 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.059.552.842,67	70.452.082,00	0,00	0,00	10.130.004.924,67	0,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.760.080.421,00	0,00	0,00	0,00	5.760.080.421,00	0,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.408.330.956,77	0,00	0,00	0,00	9.408.330.956,77	0,90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	188.132.000,00	0,00	0,00	0,00	188.132.000,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	196.431.896,00	0,00	0,00	0,00	196.431.896,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	865.716.680,00	0,00	0,00	0,00	865.716.680,00	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.574.484.146,00	53.842.763,00	0,00	0,00	4.628.326.909,00	0,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	161.627.161,00	0,00	0,00	0,00	161.627.161,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**30.664.976.163,27**	**169.443.666,50**	**0,00**	**0,00**	**30.824.418.808,77**	**2,96**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.325.753.147,50	131.413.507,50	0,00	0,00	21.457.166.655,00	2,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.984.020.158,00	34.598.664,00	0,00	0,00	7.018.618.802,00	0,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.253.927.450,00	3.431.464,00	0,00	0,00	1.257.358.914,00	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	562.498.845,00	0,00	0,00	0,00	562.498.845,00	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	528.775.592,77	0,00	0,00	0,00	528.775.592,77	0,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**84.846.742.106,00**	**1.298.169.186,00**	**0,00**	**0,00**	**86.144.911.292,00**	**8,28**
SEKRETARIAT DAERAH	49.238.099.380,00	900.244.715,00	0,00	0,00	50.138.344.095,00	4,82
SEKRETARIAT DPRD	35.608.642.726,00	397.924.471,00	0,00	0,00	36.006.567.197,00	3,46
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**60.492.590.200,24**	**1.121.926.316,00**	**40.832.174.778,10**	**105.213.314.659,00**	**207.660.004.962,34**	**19,95**
PERENCANAAN	14.194.515.740,25	534.697.149,00	0,00	0,00	14.729.212.889,25	1,42
KEUANGAN	30.749.182.161,99	399.887.864,00	40.832.174.778,10	105.213.314.659,00	177.194.559.463,09	17,02
KEPEGAWAIAN	8.658.219.898,00	61.787.296,00	0,00	0,00	8.720.007.194,00	0,84
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	944.375.812,00	0,00	0,00	0,00	944.375.812,00	0,09
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.809.114.613,00	0,00	0,00	0,00	1.809.114.613,00	0,17
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	4.137.181.975,00	125.553.006,00	0,00	0,00	4.262.734.981,00	0,41
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**14.946.889.241,87**	**390.112.109,13**	**0,00**	**0,00**	**15.337.001.351,00**	**1,47**
INSPEKTORAT DAERAH	14.946.889.241,87	390.112.109,13	0,00	0,00	15.337.001.351,00	1,47
UNSUR KEWILAYAHAN	**45.519.037.854,82**	**737.094.277,18**	**0,00**	**0,00**	**46.256.132.132,00**	**4,44**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.519.037.854,82	737.094.277,18	0,00	0,00	46.256.132.132,00	4,44
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**7.379.933.849,84**	**162.302.336,16**	**0,00**	**0,00**	**7.542.236.186,00**	**0,72**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.379.933.849,84	162.302.336,16	0,00	0,00	7.542.236.186,00	0,72
Total	756.005.534.308,59	158.808.291.227,31	40.832.174.778,10	105.213.314.659,00	1.040.859.314.973,00	100
Total Belanja Daerah	**1.040.859.314.973,00**					

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.040.859.314.973,00, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	**1.040.859.314.973,00**	**100**
Belanja Operasi	**756.005.534.308,59**	**72,63**
Belanja Pegawai	514.315.237.424,14	49,41
Belanja Barang dan Jasa	238.710.496.203,45	22,93

Belanja Hibah	2.819.705.681,00	0,27
Belanja Bantuan Sosial	160.095.000,00	0,02
Belanja Modal	**138.808.291.227,31**	**13,34**
Belanja Modal Tanah	3.821.080.000,00	0,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.323.515.793,56	2,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.819.649.701,74	2,48
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.807.124.696,01	8,24
Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00	0,001
Belanja Tidak Terduga	**40.832.174.778,10**	**3,92**
Belanja Transfer	**105.213.314.659,00**	**10,11**
Belanja Bagi Hasil	3.096.467.249,00	0,30
Belanja Bantuan Keuangan	102.116.847.410,00	9,81

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Penyediaan anggaran Belanja Operasi 756.005.534.308,59 atau Rp72,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran unutuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:

   a. Belanja Pegawai

		Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp280.264.034.035,51 atau 26,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.215.875.109,04, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun	Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian dianggarkan dengan memperhitungkan tagihan bulanan, jika terjadi kekurangan penganggaran maka akan dilakukan penyesuaian pada mekanisme pergeseran anggaran atau perubahan APBD.

		Anggaran 2025, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp40.874.000,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan	

		Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp20.000.000,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.	

		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp265.000.000,00;	

		(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp735.000.000,00; belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp553.326.825,57, atau terdapat selisih kurang Rp288.326.825,57; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp1.659.980.476,72, atau terdapat selisih kurang Rp924.980.476,72. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan	

		Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada: (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.000.000,00; (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.500.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa: (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025; (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* Rp200.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, kepada: (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami	

		dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp2.292.556,00 yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016	

tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.809.124.125,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp493.290.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp696.370.500,00 dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

		Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD. (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp89.096.700,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.	

		(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp630.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.001.200.000,00; (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.042.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan	

		Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp236.800.000,00, dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggrakan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas	

		manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. 5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp217.790.625,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp52.676.977.660,00 yaitu Rp79.015.466,49,00. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp218.528.762.391,13 atau 21% dari total belanja daerah dalam	

		Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp105.597.338.441,47; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp2.899.240.076,86; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp10.324.465.145,88; d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp9.603.217.842,96; e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp71.183.378.721,96; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambasmengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: a) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;	

		b) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS; c) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem *Monitoring* Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan d) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp18.921.122.162,00atau 1,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp10.871.482.421,00; b) Belanja Tambahan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp5.696.225.000,00; c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp898.500.000,00.	

		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada: a. Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.5)Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.	

	b. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, honorarium tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp238.710.496.203,45 atau 22,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp77.851.402.662,09 atau 7,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp75.719.167.961,14 atau 7,27% dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp1.587.560.177,85, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp624.878.700,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

(2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.547.972.397,87, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp577.801.224,41 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

(3) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp1.145.113.857,00 yang tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp770.920.510,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;

(4) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp854.357.694,17, yang antara lain tercantum pada Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat,

		Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp910.479.544,79, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp89.735.986,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.407.259.545,52, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp151.220.850,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.902.365.781,31 yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar; (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp197.832.300,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.078.229.993,57, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp83.771.093,00 pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan; (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp4.198.153.266,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp2.083.694.150,00 pada Sub Pengadaan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan,	

		pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan; (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.953.724.643,17 yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp243.082.049,49 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota; (11) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.850.000.000,00 yang tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.850.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; (12) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp5.550.061.118,60 yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp5.407.492.500,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; (13) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp2.089.774.172,11 yang antara lain tercantum pada Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; (14) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.797.787.962,84 yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp358.800.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses; (15) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.645.031.284,56 yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	

		Rp372.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat; (16) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp7.226.084.923,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp2.000.000.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar; (17) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp997.042.843,25 yang antara lain tercantum pada Belanja Pakaian Adat Daerah Rp197.383.978,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat; b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp470.362.023,35 atau 0,05% dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp465.967.601,35 yang antara lain tercantum pada Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp465.929.476,35 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.661.872.677,60 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya Rp560.000.000,00 yang tercantum pada Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya Rp560.000.000,00 pada Sub	

	Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan local; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp24.996.766.667,09 yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.108.581.109,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.664.370.030,77 pada Sub Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan;	

		(3) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.610.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; (4) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.557.953.050,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; (5) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.190.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual; (6) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.064.335.275,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	

		Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.332.089.002,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp825.589.002,00 atau 0,08% dari belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp545.840.000,00; (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp506.500.000,00 atau 0,05% dari belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp506.500.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan	

		efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan: a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD; b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;	

c) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan

d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp91.468.116.565,15 atau 8,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp53.665.447.983,64 atau 5,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.300.473.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp691.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp6.026.906.622,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp540.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.268.400.000,00 yang antara lain tercantum pada

		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; (4) Honorarium Rohaniwan Rp827.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Rohaniwan Rp819.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual; (5) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp800.400.000,00 yang antara lain tercantum pada: (a) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp400.200.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; (b) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp400.200.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; (6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp8.351.093.396,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp8.298.526.276,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; (7) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp5.267.742.522,00 yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.033.503.120,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.199.808.780,00 pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;	

		(8) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp4.549.343.978,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp3.421.343.978,00 pada Sub Kegiatan Relasi Media; (9) Belanja Tagihan Listrik Rp4.662.696.586,64 yang antara lain tercantum pada Belanja Tagihan Listrik Rp1.410.764.640,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; (10) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp3.235.730.627,42 yang antara lain tercantum pada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp2.694.341.952,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota; (11) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp10.438.115.600,00 yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; (b) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.308.300.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; (c) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.061.760.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan	

		waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp10.393.071.600,00 atau 1% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp1.012.598.400,00; (2) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp7.980.000.000,00; (3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp705.600.000,00;	

		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, butir	

		3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	

		15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp46.027.200,00; (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp385.656.000,00; (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp263.190.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.449.442.562,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.677.394.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp1.657.344.000,00 pada Sub	

		Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp4.511.707.007,27 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp2.699.557.309,97 yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp353.105.325,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; (b) Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp978.969.450,86 yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp225.302.445,36 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta	

		ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp17.622.305.412,24 atau 1,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp4.961.430.112,69, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp2.546.888.727,19 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp1.480.000.000,00, yang antara lain tecantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp820.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana	

		Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp3.704.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp3.245.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; (d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp2.685.700.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp1.170.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; (e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp3.552.449.499,55, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp1.450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata	

pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp1.206.842.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Bimbingan Teknis Rp44.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bimbingan Teknis Rp44.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
    - Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp790.306.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Kursus

		Singkat/Pelatihan Rp300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.	

		Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ *workshop*/ kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3) Belanja Pemeliharaan Rp5.794.068.827,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.453.462.190,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

	(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp1.106.522.722,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp330.575.120,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp900.100.000,00 yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi; (b) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.340.606.637,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp724.046.460,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp322.960.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	

		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada: a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman	

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Perjalanan Dinas Rp57.894.553.425,71 atau 5,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp57.878.137.201,71 ataa 5,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp39.564.860.288,19, yang antara lain tercantum pada:

         (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.264.072.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;

         (b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.923.680.809,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

         (c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.867.104.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

         (d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.996.241.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

         (e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.496.728.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;

      (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp18.166.611.913,52 yang antara lain tercantum pada:

         (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.253.200.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;

		(b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.157.978.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses; b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp16.416.224,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp16.416.224,00, yang tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp16.416.224,00 pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain telah	

		memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat Daerah Rp1.264.072.000,00 atau 2,52% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp50.138.344.095,00; b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat Daerah Rp1.923.680.809,00 atau 3,84% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp50.138.344.095,00; c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD Rp1.867.104.000,00 atau 5,19% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00; d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sekretariat DPRD Rp1.253.200.000,00 atau 3,48% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00; e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sekretariat DPRD Rp1.157.978.000,00 atau 3,22% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00; f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD Rp2.996.241.000,00 atau 8,32% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;	

g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sekretariat DPRD Rp2.496.728.000,00 atau 6,93% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp36.006.567.197,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp2.819.705.681,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 10, sebagai berikut:

Tabel. 10
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	12.187.692.396,00	10.234.147.577,00	83,97	916.647.866.316,00	1,33
APBD 2023	18.616.010.962,00	17.149.119.101,00	92,12	1.250.230.911.389,00	1,49
APBD 2024	23.314.479.156,00	21.432.592.712,00	91,93	1.009.126.863.684,00	2,31
Rancangan APBD 2025	2.819.705.681,00	0,00	-	1.040.859.314.973,00	0,27

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp23.184.368.581,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.009.126.863.684, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp18.616.010.962,00 atau 1,49%

dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.250.230.911.389,00, dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp12.187.692.396,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.400.198.092,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.708.288.000,00 yang antara lain pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp691.910.092,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp441.910.092,00 yang tercantum pada sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp253.266.680,00 pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan

		Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan	

		kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal	

dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp419.507.589,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Bantuan Sosial
Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp160.095.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel. 11
Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	2.556.981.500,00	134.715.000,00	5,27	916.647.866.316,00	0,28
APBD 2023	1.446.084.030,00	161.614.000,00	11,18	1.250.230.911.389,00	0,12
APBD 2024	682.796.000	339.453.000,00	49,72	1.009.126.863.684,00	0,01
Rancangan APBD 2025	160.095.000,00	0,00	-	1.040.859.314.973,00	0,02

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp682.796.000 atau 0,01% dari total belanja daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.009.126.863.684,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.446.084.030,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.250.230.911.389,00, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.556.981.500,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00;

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp138.808.291.227,31 atau 13,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah Rp3.821.080.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp3.821.080.000,00, yang diuraikan ke rincian objek belanja:
    1) Belanja Modal Tanah Persil Rp622.700.000,00, atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
        a) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp386.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
        b) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp236.700.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp186.700.000,00 pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

	Penanganan Sampah pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 2) Belanja Modal Lapangan Rp3.198.380.000,00, atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp3.198.380.000,00, pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp23.323.515.793,56 atau 2,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar Rp1.373.399.868,30 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp62.219.095,30, atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mesin Proses Rp62.219.095,30, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Mesin Proses Rp18.043.896,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat DPRD;

b) Belanja Modal Alat Besar Apung Rp587.929.660,00, atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Besar Apung Rp360.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c) Belanja Modal Alat Bantu Rp723.251.113,00, atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Electric Generating Set* Rp722.232.133,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp4.854.549.093,70 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.451.443.509,90 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun

Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp400.000.000,00, pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp664.856.056,90, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp43.629.216,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp43.338.372,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp154.460.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.269.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp3.105.583,80 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp3.105.583,80;

c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp2.400.000.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Rp2.400.000.000,00;

3) Belanja Modal Alat Pertanian Rp13.164.941,82 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Belanja Modal Alat Pengolahan Rp13.164.941,82 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   a) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp10.877.291,82;

   b) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan Rp2.287.650,00;

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.359.671.282,89 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Modal Alat Kantor Rp240.169.237,20 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp232.126.507,20;

   b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.355.201.730,45 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Modal Mebel Rp2.856.689.322,00;

      (2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp644.601.268,90;

	c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp764.300.315,24 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp227.693.652,63; (2) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp302.450.457,61; (3) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp97.959.503,00; 5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp23.721.145,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp13.011.250,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp13.011.250,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; b) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp10.709.895,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen *Landing System* Rp10.709.895,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Jemaja; 6) Belanja Modal Komputer Rp5.113.660.382,25 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	

		Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Komputer Unit Rp3.644.802.005,91 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Computer Rp3.644.802.005,91, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Modal Personal Computer Rp746.833.066,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (2) Belanja Modal Personal Computer Rp469.922.660,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (3) Belanja Modal Personal Computer Rp133.255.962,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; (4) Belanja Modal Personal Computer Rp352.349.803,90 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (5) Belanja Modal Personal Computer Rp202.772.518,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Inspektorat Daerah; b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.468.858.376,34 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp203.360.370,00; (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp278.993.025,68;	

	(3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp986.504.980,66; 7) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp35.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Rp35.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp35.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 8) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp54.981.772,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas DaratRp54.981.772,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp54.981.772,00, pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 9) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp13.934.032,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp13.934.032,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Permainan Rp13.934.032,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp25.819.649.701,74 atau 2,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp25.609.649.701,74 atau 2,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	

		Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp25.609.649.701,74 atau 2,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp8.507.341.456,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp9.228.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp8.353.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp7.874.308.245,74, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp199.677.558,12 pada Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp391.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp158.107.801,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;	

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.870.312.790,60 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp210.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp210.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp85.807.124.696,01 atau 8,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp82.777.048.176,01 atau 7,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan Rp73.076.949.440,00atau 7,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp40.718.267.600,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp10.881.490.800,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

		(b) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp350.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (c) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp7.255.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (2) Belanja Modal Jalan Desa Rp32.358.681.840,00 pada Sub Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; b) Belanja Modal Jembatan Rp9.700.098.736,01 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp9.700.098.736,01, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jembatan Rp9.610.098.736,01 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup; 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp3.030.076.520,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp860.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp860.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	

		b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp910.444.565,00 atau 0,09%dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp910.444.565,00, yang tercantum pada: (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Breakwater pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp310.444.565,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1.259.631.955,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Rp1.259.631.955,00, pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	

	e. Belanja Modal Aset Lainnya Rp36.921.036,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp36.921.036,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp36.921.036,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman	

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp5.312.710.868,60 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   1) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.226.336.852,60 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.026.840.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

      b) Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy Rp3.199.496.852,60, pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

   2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp86.374.016,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      a) Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp10.374.016,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp76.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp213.769.075,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp213.769.075,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Photo and Film Equipment* Rp213.769.075,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp40.832.174.778,10 atau 3,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

	Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
	D. Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp443.768.531,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek antara lain “Belanja Modal Mebel” Rp71.665.965,00 pada Sekretariat DPRD; 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD Rp658.874.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp458.874.000,00 pada Sekretariat DPRD; 3. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp1.642.970.588,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp416.052.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 4. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp1.890.800.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website” Rp105.000.000,00 dan ”Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan” Rp102.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;	D. Telah dilakukan pengecekan kembali di SIPD RI dan telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap Sub Kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran Sub Kegiatan pada setiap SKPD tersebut.

	5. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp229.626.960,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa“ Rp80.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 6. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Rp484.101.808,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota“ Rp47.100.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp1.279.276.487,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek antara lain: a. Belanja Modal Mesin Proses Apung Rp227.929.660,00; b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp58.162.889,00; c. Belanja Modal Mebel Rp17.136.960,00; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program	

	Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp2.147.687.529,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.867.104.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 2. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Rp124.010.000,00 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp103.500.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Rp360.878.000,00 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp291.878.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan Rp360.878.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp291.878.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;	E. Telah dilakukan pengecekan kembali di SIPD RI dan telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap Sub Kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja Sub Kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD tersebut.

	5. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.011.480.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp711.480.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 6. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD Rp576.012.649,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp560.129.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 7. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Rp1.280.257.800,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan” Rp990.000.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 8. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp1.266.100.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp1.253.200.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 9. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Rp355.478.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp291.878.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Rp1.535.648.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp1.157.978.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp3.035.721.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp2.996.241.000,00 pada Sekretariat DPRD	

	diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; 12. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Rp2.520.099.258,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp2.496.728.000,00 pada Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
	F. Pendanaan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 2. Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp10.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp10.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 3. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp161.736.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp161.736.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	F. Telah dilakukan pengecekan kembali di SIPD RI dan telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap Sub Kegiatan pada setiap SKPD tersebut.

	4. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp16.428.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan” Rp16.428.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp112.440.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan” Rp112.440.000,00 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah; 6. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp7.308.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan” Rp7.308.000,00 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah; 7. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp257.280.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan” Rp257.280.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp40.200.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan” Rp40.200.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 9. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp33.564.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan” Rp33.564.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar tetap mempertahankan dan konsisten terhadap pendanaan sub kegiatan tersebut mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan	

	Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
	G. Penggunaan Alokasi Pagu Belanja yang Tidak Sesuai Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Paket/Pengiriman" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	G. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan pengecekan kembali di SIPD RI dan telah dilakukan penyesuaian terhadap sandar harga satuan pada sipd pada masing-masing SKPD dimaksud.

	7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp100.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp35.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos” Rp18.410,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp41.834.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek	

	“Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos” Rp282.600,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 15. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp9.800.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos” Rp100,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sub Kegiatan dari aspek teknis penganggaran, penyediaan alokasi pagu belanja dimaksud belum disusun berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan alokasi pagu belanja dimaksud berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. H. Sub Rincian Obyek yang Tidak Menggambarkan Satuan Terkecil Sub Rincian Obyek Belanja Daerah yang Akan Ditransaksikan Sesuai Anggaran Berbasis Kinerja Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp69.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Makanan dan Minuman Rapat” Rp69.000.000,00 pada Sekretariat DPRD; 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp60.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp60.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 3. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp4.400.100,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja	

	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan" Rp4.400.100,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp2.700.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman Rapat" Rp2.700.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; tidak menggambarkan satuan terkecil sub rincian obyek belanja daerah yang akan ditransaksikan sesuai anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. I. Pendanaan Sub Kegiatan dan Uraian Belanja yang Tidak Menggambarkan Keluaran Sesuai Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja yang Diharapkan Apabila Ditinjau Dari Aspek Indikator, Tolok Ukur dan Target Kinerja Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp500.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp500.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;	

	3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp1.408.220,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak" Rp16.124,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp50.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp50.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp100.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp100.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp150.000.000,00, hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp150.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyediaan anggaran pada sub kegiatan dan uraian belanja dimaksud tidak menggambarkan keluaran sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja yang diharapkan, apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam	

	Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
VII.	**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH** A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah 1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Pembiayaan Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	**158.378.359.422,00**	**15,22**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**158.378.359.422,00**	**15,22**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.878.359.422,00	15,17
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	0,05
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**-**

c. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Rp158.378.359.422,00 atau 15,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Penerimaan pembiayaan

tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp157.878.359.422,00 atau 15,17% dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp500.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.040.859.314.973,00, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD Tahun Anggaran 2022	48.091.005.786,00	6.984.586.830,57	14,52	916.647.866.316,00	5,25
APBD Tahun Anggaran 2023	102.045.555.597,00	23.949.728.959,68	23,47	1.250.230.911.389,00	8,16
APBD Tahun Anggaran 2024 (Realisasi s.d. 30 September 2024)	23.949.728.959,00	69.245.754.284,41	289,13	1.009.126.863.684,00	2,37
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025	157.878.359.422,00	0,00	-	1.040.859.314.973,00	15,17

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp23.949.728.959,00 atau 2,37% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.009.126.863.684,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp102.045.555.597,00 atau 8,16% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.250.230.911.389,00, dan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp48.091.005.786,00 atau 5,25% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
VIII.	**REKOMENDASI** Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:	**VIII. REKOMENDASI** Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang

	A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu: 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

	B. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. C. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan anggaran untuk: 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang	

	Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. F. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025. G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja	

	dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. J. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15	

	Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*; 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik	

	berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau	

4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
2. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
      1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
      2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
      3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
      4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
      5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
      6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

	7) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; dan 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti; 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti; 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti; 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti; 8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti; 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten Kepulauan Anambas; dan 11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	

	c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Kepulauan Anambas terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kepulauan Anambas; dan 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan	

	kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI. 5. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1. nama kegiatan; 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3. jumlah anggaran; dan 4. alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional,	

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. P. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, untuk: 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya. Q. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:	

	1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah; 6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. R. Alokasi Anggaran untuk Konektivitas Transportasi Perhubungan Udara Dalam rangka mendukung konektivitas transportasi perhubungan udara ke daerah DPN, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk: 1. mendukung konektivitas perhubungan udara pada rute penerbangan yang belum memiliki akses penerbangan rutin; 2. dukungan akses penerbangan ke daerah DPN melalui penyiapan anggaran berupa belanja subsidi tiket penerbangan atau belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain berupa penyediaan jaminan *block seat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk kelancaran dukungan konektivitas penerbangan yang bersumber dari APBD dimaksud;	

	sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.24.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. S. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah; 5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan 6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; T. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menformulasikan kembali sinkronisasi alokasi anggaran kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional,	

	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. U. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp97.000.000,00. V. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. X. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.	

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA,

RIAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

JHON AQUARIUS PUTRA, S.E., M.Si
NIP. 19730122 200312 1 007

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**53.491.122.423,00**
4.1.01	Pajak Daerah	25.122.015.531,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.824.360.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.044.746.892,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**828.820.943.352,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.212.377.100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.608.566.252,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**168.889.776,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	168.889.776,00
	Jumlah Pendapatan	**882.480.955.551,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**784.449.005.089,76**
5.1.01	Belanja Pegawai	514.949.159.286,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.260.065.122,62
5.1.05	Belanja Hibah	5.091.985.681,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	147.795.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**142.215.982.235,72**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.808.975.640,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.919.005.881,97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.619.649.701,74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.907.124.696,01
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	924.305.280,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.981.012.988,52**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.981.012.988,52
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**105.213.314.659,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.096.467.249,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.116.847.410,00
	Jumlah Belanja	**1.040.859.314.973,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	**-158.378.359.422,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**158.378.359.422,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.878.359.422,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**158.378.359.422,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**158.378.359.422,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	453.019.850.300,43	126.470.969.541,95	0,00	0,00	579.490.819.842,38
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	219.227.329.482,19	15.611.715.791,74	0,00	0,00	234.839.045.273,93
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	219.227.329.482,19	15.611.715.791,74	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	157.574.146.382,42	21.810.526.357,48	0,00	0,00	179.384.672.739,90
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	139.349.584.454,71	20.501.842.672,75	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.1	RSUD Tarempa	0,00	3.746.556.652,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.10	Puskesmas Siantan Timur	0,00	1.142.307.163,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.11	Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	0,00	168.536.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.12	Puskesmas Jemaja Barat	0,00	576.571.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.13	Puskesmas Siantan Utara	0,00	502.026.976,00	11.681.085,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.14	Puskesmas Kute Siantan	0,00	763.651.800,00	19.392.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.2	RSUD Jemaja	0,00	821.080.109,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.3	RSUD Palmatak	0,00	2.743.106.740,27	418.510.862,73	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.4	Puskesmas Siantan Tengah	0,00	1.296.352.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.5	Puskesmas Letung	0,00	1.156.588.474,00	80.787.642,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.6	Puskesmas Jemaja Timur	0,00	757.607.010,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.7	Puskesmas Palmatak	0,00	1.448.376.184,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.8	Puskesmas Tarempa	0,00	1.725.223.820,00	210.391.059,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.2.14.0.00.01.9	Puskesmas Siantan Selatan	0,00	1.376.576.174,44	36.921.036,00	0,00	0,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	31.154.176.383,74	55.473.070.238,81	0,00	0,00	86.627.246.622,55
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	30.058.161.502,55	55.414.724.120,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD SPAM SIANTAN	0,00	1.096.014.881,19	58.346.118,81	0,00	0,00	0,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.362.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	37.720.817.840,00
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.362.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	0,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	33.459.710.500,08	973.359.807,92	0,00	0,00	34.433.070.308,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	8.268.950.742,08	953.160.797,92	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	12.406.999.543,00	20.199.010,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.8.01.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	12.783.760.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	6.242.351.552,00	243.615.506,00	0,00	0,00	6.485.967.058,00
1	06	1.06.2.08.0.00.03.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.242.351.552,00	243.615.506,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	87.668.816.865,29	11.818.169.332,80	0,00	0,00	99.486.986.198,09
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	1.411.100.420,37	0,00	0,00	0,00	1.411.100.420,37
2	07	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	1.411.100.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.025.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.690.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	08	1.06.2.08.0.00.03.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	1.025.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08	1.06.2.08.0.00.03.0001	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	208.393.531,00	0,00	0,00	0,00	208.393.531,00
2	09	3.25.3.27.2.09.01.0000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	208.393.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	237.974.350,00	373.895.640,00	0,00	0,00	611.869.990,00
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	237.974.350,00	373.895.640,00	0,00	0,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.332.429.349,03	602.574.661,62	0,00	0,00	1.935.004.010,65
2	11	2.15.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	810.163.872,03	192.574.661,62	0,00	0,00	0,00
2	11	2.15.2.11.0.00.01.2	UPT PENGELOLAAN SAMPAH	0,00	522.265.477,00	410.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	10.479.359.194,59	331.735.633,41	0,00	0,00	10.811.094.828,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	10.479.359.194,59	331.735.633,41	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.421.113.326,00	249.268.797,00	0,00	0,00	5.670.382.123,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.421.113.326,00	249.268.797,00	0,00	0,00	0,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.884.142.000,00	0,00	0,00	0,00	2.884.142.000,00
2	14	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.884.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0,00	19.152.604.809,01	9.804.683.253,39	0,00	0,00	28.957.288.062,40
2	15	2.15.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	18.560.558.270,39	9.788.658.587,43	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.2.11.0.00.01.1	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI	0,00	592.046.538,62	16.024.665,96	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	14.301.653.781,85	331.716.502,38	0,00	0,00	14.633.370.284,23
2	16	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	14.301.653.781,85	331.716.502,38	0,00	0,00	0,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	10.059.552.842,67	70.452.082,00	0,00	0,00	10.130.004.924,67
2	17	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	9.819.502.759,00	70.452.082,00	0,00	0,00	0,00
2	17	2.17.2.07.3.30.01.0001	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR	0,00	240.050.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	5.760.080.421,00	0,00	0,00	0,00	5.760.080.421,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	5.760.080.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	9.408.330.956,77	0,00	0,00	0,00	9.408.330.956,77
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	9.408.330.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	188.132.000,00	0,00	0,00	0,00	188.132.000,00
2	20	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	188.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	196.431.896,00	0,00	0,00	0,00	196.431.896,00
2	21	2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	196.431.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	865.716.680,00	0,00	0,00	0,00	865.716.680,00
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	865.716.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	4.574.484.146,00	53.842.763,00	0,00	0,00	4.628.326.909,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	4.574.484.146,00	53.842.763,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	161.627.161,00	0,00	0,00	0,00	161.627.161,00
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	161.627.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	30.654.975.153,27	169.443.655,50	0,00	0,00	30.824.418.808,77
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	21.325.753.147,50	131.413.507,50	0,00	0,00	21.457.166.655,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.0000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	21.325.753.147,50	131.413.507,50	0,00	0,00	0,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	6.984.020.138,00	34.598.664,00	0,00	0,00	7.018.618.802,00
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	6.984.020.138,00	34.598.664,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	1.253.927.430,00	3.431.484,00	0,00	0,00	1.257.358.914,00
3	27	3.25.3.27.2.09.01.0000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	1.253.927.430,00	3.431.484,00	0,00	0,00	0,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	562.498.845,00	0,00	0,00	0,00	562.498.845,00
3	30	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	463.135.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30	2.17.2.07.3.31.01.0002	UPT METROLOGI LEGAL	0,00	99.363.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	528.775.592,77	0,00	0,00	0,00	528.775.592,77
3	31	2.17.2.07.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	528.775.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	84.766.911.624,00	1.345.965.668,00	0,00	0,00	86.112.877.292,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	49.190.302.898,00	948.041.197,00	0,00	0,00	50.138.344.095,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	49.190.302.898,00	948.041.197,00	0,00	0,00	0,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	35.576.608.726,00	397.924.471,00	0,00	0,00	35.974.533.197,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0,00	35.576.608.726,00	397.924.471,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	882.480.955.551,00	60.492.590.200,24	1.121.925.315,00	8.981.012.988,52	105.213.314.659,00	175.808.843.162,76

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	01		PERENCANAAN	0,00	14.194.515.740,25	534.697.149,00	0,00	0,00	14.729.212.889,25
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	14.194.515.740,25	534.697.149,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	882.480.955.551,00	30.749.182.161,99	399.887.864,00	8.981.012.988,52	105.213.314.659,00	145.343.397.673,51
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	882.480.955.551,00	30.749.182.161,99	399.887.864,00	8.981.012.988,52	105.213.314.659,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	8.658.219.898,00	61.787.296,00	0,00	0,00	8.720.007.194,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	8.658.219.898,00	61.787.296,00	0,00	0,00	0,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	944.375.812,00	0,00	0,00	0,00	944.375.812,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	944.375.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.809.114.613,00	0,00	0,00	0,00	1.809.114.613,00
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	1.809.114.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN	0,00	4.137.181.975,00	125.553.006,00	0,00	0,00	4.262.734.981,00
5	06	5.06.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0,00	4.137.181.975,00	125.553.006,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	14.946.889.241,87	390.112.109,13	0,00	0,00	15.337.001.351,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	14.946.889.241,87	390.112.109,13	0,00	0,00	15.337.001.351,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	14.946.889.241,87	390.112.109,13	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	45.519.037.854,82	737.094.277,18	0,00	0,00	46.256.132.132,00
7	01		KECAMATAN	0,00	45.519.037.854,82	737.094.277,18	0,00	0,00	46.256.132.132,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SIANTAN	0,00	6.017.376.234,00	6.673.001,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN TAREMPA	0,00	2.213.542.644,00	19.987.152,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN JEMAJA	0,00	6.141.834.815,00	46.700.201,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.01	KELURAHAN LETUNG	0,00	881.452.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PALMATAK	0,00	5.722.815.551,00	78.143.234,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	0,00	3.477.529.667,00	124.247.419,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	0,00	3.033.678.243,00	114.005.830,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0,00	3.559.415.819,82	127.481.486,18	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	0,00	3.814.313.314,00	23.545.286,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SIANTAN UTARA	0,00	3.278.527.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN JEMAJA BARAT	0,00	3.149.827.639,00	86.221.223,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KUTE SIANTAN	0,00	4.228.724.291,00	110.089.445,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	7.379.933.849,84	162.302.336,16	0,00	0,00	7.542.236.186,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	7.379.933.849,84	162.302.336,16	0,00	0,00	7.542.236.186,00
8	01	1.05.8.01.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	7.379.933.849,84	162.302.336,16	0,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0015	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.1	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.2	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.3.27.2.09.01.3	UPT PERBENIHAN IKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**882.480.955.551,00**	**784.449.005.089,76**	**142.215.982.235,72**	**8.981.012.988,52**	**105.213.314.659,00**	**0,00**

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4	PENDAPATAN DAERAH	882.480.955.551,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.491.122.423,00	
4.1.01	Pajak Daerah	25.122.015.531,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	6.824.360.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.044.746.892,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	828.820.943.352,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	786.212.377.100,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.608.566.252,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	168.889.776,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	168.889.776,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.670.525,20	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.107.801,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.123.009,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.510.196.739,97	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.856.835,40	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.213.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.544.970,10	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.953.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.621.410,25	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.410.370,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	598.104.558,22	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.498.146,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.789.481.082,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.774.705,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.085.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.218.703,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.084,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.279.444.880,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.218.840,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	462.143.280,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.498.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.876.780,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.566.145,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.429.923,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.352.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.404.320,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.374.016,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.905.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.212.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.104.234.468,42	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.982.339.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.300.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	391.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.677.558,12	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.106.090,01	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.210.116.050,63	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.584.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	483.011.372,10	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	793.170.588,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.800.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.211.935,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.354.910,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.621.081,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.221.477.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	915.840.500,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	462.162.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.583.311,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.042.290,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.698.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.626.960,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.544.970,33	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.600.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengelolaan PAUD		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.110.749,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	795.691.511,20	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.831,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482.922.977,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.845.313,20	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.589.772,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	1.958.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.316.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.904.560,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.359.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.385.720,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.820.469,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	314.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kurikulum		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.633.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.674.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Kegiatan Pengelolaan pendidikan dan sarana prasarana penunjang lainnya		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Program	: 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat		
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat		
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.760.500,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.271.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	181.376.369.459,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Operasional Kantor		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.033.971,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	731.504.491,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.882.326,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.430.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.664.911,78	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.774.937,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.027.602,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.061.756,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.739.600,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.034.469,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.466.056.585,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.707.341.456,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	860.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.428.907,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.226.336.852,60	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.998.178.622,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.075.930,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.599.337.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.486.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.171.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.013.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.042.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.774.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.133.131.125,22	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.268.074,13	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	68.550.952,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.866.798,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.607.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.268.108,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: - Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.901.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.940.213,93	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	95.045.333.035,30	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.300.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.545.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.375.480,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.031.849,15	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.028.636,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.624.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.846.753,88	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.313.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.186.380,33	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.488.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.735.742.526,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.834.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.994.333,92	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.522.800,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.1 RSUD Tarempa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.621.552,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.308.686.704,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.549.548.396,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.10 Puskesmas Siantan Timur		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.205.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.565.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.498.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.098.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.856.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.164.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.785.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.240.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	167.283.581,50	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.283.581,50	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.11 Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.408.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.928.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.851.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.591.208,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.12 Puskesmas Jemaja Barat		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.678.800,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.894.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.989.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.883.060,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.053,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.054.987,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.010.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.13 Puskesmas Siantan Utara		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.231.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.328.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.735.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.325,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.681.085,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.011,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.275.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.962.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.14 Puskesmas Kute Siantan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		

Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.045.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	37.902.372,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.954.428,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.392.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.840.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.2 RSUD Jemaja		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.748.984,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.188.224,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.692.901,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.3 RSUD Palmatak		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.577.864,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.489.137,27	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.510.862,73	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.289.739,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.676.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.024.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.234.425.168,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.574.832,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.4 Puskesmas Siantan Tengah		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.956.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.199.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	84.042.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.535.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.785.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.771.694,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.787.133,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undefined		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.901.870,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	85.390.584,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.034.376,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.5 Puskesmas Letung		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	63.767.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.198.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.991.116,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.570.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	270.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.212.358,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.787.642,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.6 Puskesmas Jemaja Timur		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.756.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.349.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.148.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.479.600,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	91.178.631,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.225.779,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.7 Puskesmas Palmatak		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.910.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.271.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.192.886,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.822.298,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	382.850.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.8 Puskesmas Tarempa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.450.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.604.820,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.888.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.626.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	452.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.391.059,00	
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.9 Puskesmas Siantan Selatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.647.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.755.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.460.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.689.765,44	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.245,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	198.864.044,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.149.120,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0068 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater		
Indikator Keluaran	: Panjang Breakwater yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.650.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310.444.565,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.506.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.198.380.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.699.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		

Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan ketersediaan sarpras pengelolaan persampahan		
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.778.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.228.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.05	Belanja Hibah	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.259.631.955,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun		
Kegiatan	: 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.07.2.01.0009 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.07.2.01.0019 Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	675.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.537.656.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.303.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.263.613,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.141.298,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana trasportasi darat		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.289.200,03	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.881.490.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.262.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.231.776.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.858.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.255.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	450.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah data SHP Peta Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.671.413,50	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.050.683.317,02	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.874.773,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.476.700,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.323.264,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.900.324,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD SPAM SIANTAN		
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Meningkatkan cakupan distribusi air bersih;		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.700.432,70	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.660.567,30	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.074.448,49	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.685.551,51	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.240.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman		
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.137.136.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.358.681.840,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran		
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.393.820,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.629.971,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.395.059.246,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.788.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.475.648,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.384.165,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.981.434,08	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.238.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.780.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.105.592,92	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.424.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.222.685,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.085.505,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.068.129,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.586.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.997.180,00	
Organisasi	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.685.230,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.988.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.211.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.509.359,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.514.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.100,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.173.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.930.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	119.795.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.021.500,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.538.764.897,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.068.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.465.130,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.904.715,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.310.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.219.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.324.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.461.188,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.064.004,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.210.510,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Peersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.367.410,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.083.103,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.186.096,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.493.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase PPNS yang aktif		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.104.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.650.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.877.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.324.853.534,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.280.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.564.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.678.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.924,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.645.031,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.270.284,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.560.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.887.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.715.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.105.325,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.906.378,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.245.458,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.687.650,01	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.754.542,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan undefined		
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.619.632,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.556.427.024,96	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.760.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.278.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.615.506,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.875.822,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.423.424,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.411.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.400.313,03	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.226.330,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.781.236,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.270.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.070.000,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja		
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: persentase jumlah masyarakat masyarakat pencari kerja yang terlayani dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase besaran kasus yang diselesaikan		
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya regulasi yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.618.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.682.420,37	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.240.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.050.000,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.03.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan		
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.265.700,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan kerawanan pangan		
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.567.931,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar		

Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.559.900,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.156.350,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	373.895.640,00	
Program	: 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.06.2.02.0002 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.02.0003 Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.818.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah aksi pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.412.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.276.829,08	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.874.661,62	

Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan penaatan lingkungan hidup yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.967.017,80	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penghargaan sekolah Adiwiyata yang diberikan		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.620.025,15	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup		
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Pengaduann Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaduan Lingkungan Hidup		

Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Berwawasan Lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah aksi pengelolaan sampah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.051.178,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.836.822,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	186.700.000,00	
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.2 UPT PENGELOLAAN SAMPAH		
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.270,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.432.390,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.281.751,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.017.756,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.732.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.427.360,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.345.750,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.390.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.240.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.906.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.378.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.300.000,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.518.900,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0 -18 Tahun (%)		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.105.000,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase publikasi Profil Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.986.400,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.473.406.230,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.169.780,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.964.048,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.263.846,59	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.735.633,41	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.998.922,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.801.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.623.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.227.658,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.838.060,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.830.740,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Persentase Penataan Desa		
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.168.733,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang melakukan kerjasama		
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase pembinaan pemerintahan desa		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.498.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.428.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.428.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.612.785,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.477.896.368,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.948.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.494,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.268.797,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.588.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.788.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.854.602,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.881.944,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.200.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peserta KB aktif modern		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.332.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.600.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.800.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang dilengkapi Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.178.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.981.772,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.038.228,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Manajemen Rekayasa lalu Lintas		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Angkutan Sekolah		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.965.000,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut		
Kegiatan	: 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.553.734.669,39	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.610.098.736,01	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.494.064,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.208.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.451.711.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.904.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.420.985,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.970.212,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.578.079,42	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.853.511,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.978.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.771.581,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.935.715,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.686.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.442.315,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.267.530,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.920.000,00	
Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.15.2.11.0.00.01.1 UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI		
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.243.479,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.859.540,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.024.665,96	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.104.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.379.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.360.479,62	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.306.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.918.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.834.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.660.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: PERSENTASE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media		
Indikator Keluaran	: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.647.299.627,20	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.384.308,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.908.081,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.110.857,09	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.138.142,91	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.995.922,44	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: PERSENTASE LAYANAN SPBE PEMERINTAH DAERAH YANG DITERAPKAN OLEH PERANGKAT DAERAH		
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.028.367,77	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.095.152,66	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.842.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.734.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.551.236.292,69	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.434.224,23	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, DOKUMEN LAPORAN KINERJA DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU DAN HASIL PENGENDALIAN EVALUASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.404.566.759,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.564.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.934.962,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.684.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.752.152,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.118.632,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.768.854,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.278.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.654.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.223.712,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.490.135,24	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.948.295,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.701.546,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.782.081,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Indikator Hasil	: Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif		
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP		
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.307.500,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan		
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.781.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil		
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.632.975,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.506.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.954.595.436,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.652.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum kantor		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.401.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.441.705,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.084.713,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.996.915,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.020.540,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.763.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan BMD		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.452.082,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.170.010,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.361.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan BMD		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.697.785,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0001 UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR		
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan		
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.061.968,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum kantor		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.115,67	
Kegiatan	: 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase tingkat pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.381.500,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.762.057,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.316.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.138.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.940.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.951.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.388.506.315,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.056.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.290.919,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.036.592,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.520.052,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.396.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.803.100,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.203.535,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.723.392,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.205.959,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.190.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.571.675,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		
Indikator Keluaran	: Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.197.629,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.443.105,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.632.920,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.903.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.357.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.171.403,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.385.070,00	

Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.927.285.544,77	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.712.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	307.288.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.383.110,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: PERSENTASE LAJU PEMANFAATAN DATA SEKTORAL		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.905.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.732.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: PERSENTASE PELAKSANAAN KEAMANAN DIGITAL PERANGKAT DAERAH		

Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.340.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.091.896,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.450.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan		
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.05	Belanja Hibah	253.266.680,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola		
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan Keperpustakaan		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Perpustakaan		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.440.769,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.737.770,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.766.000,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Gemar Membaca di daerah		

Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.768.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.847.242,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.510.094,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.512.102.637,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.812.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum		

Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.684,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.097.905,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.162.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.100.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.842.800,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.842.763,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.026.364,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.268.301,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar		
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Yang Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.672.661,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.954.500,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		

Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.952.734.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKDAKAN yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.266.901,50	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.733.098,50	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Produksi Pengolahan Perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.972.000,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.428.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan keuangan dinas		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.204.389.616,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.160.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan Administrasi BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.368.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.479.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.652.473,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.120.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.974.183,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.706.226,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.876.095,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.704.045,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.516.445,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan BMD		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.822.515,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.383.857,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.205.800,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.117.422,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.934.032,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.574.822,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.542.183.516,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.960.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.912.556,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.919.209,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.134.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.008.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.530.194,38	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.650.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.551.040,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.049.265,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.974.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.014.632,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.242.530,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.797.383,62	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan Sarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.358.914,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet		
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penjaminan kesehatan hewan		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan jasa medik veteriner		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.568.516,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.431.484,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.326.860,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik		
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.731.418,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase kestabilan harga barang		
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.077.500,00	
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.31.01.0002 UPT METROLOGI LEGAL		
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Persentase Peralatan yang terstandardisasi		
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah UTTP Terkaliberasi		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.363.067,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum kantor		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.648.092,77	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri		
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Data Industri di dalam SINNAS		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.127.500,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan		

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.465.874,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.897.750,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.935.864.320,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.954.316.902,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi Hukum		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.867.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.115.572,93	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.563.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.608.750,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.244.360,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.085.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.191.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.439.700,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: undefined Jumlah Bulan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.788.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.708.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.059.105,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.176.560,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam undefined		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.493.654.996,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.896.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.957.300,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.243.160,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.329.297,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.984.079,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.346.722.529,41	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.832.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.005.830.809,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.806.252,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.982.092,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.595.228,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.549.324.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.593.130,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.133.988,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	177.988.160,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.675.860,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	300.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.744.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.111.200,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penataan Organisasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.100.820,94	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.044.579,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.839.387,72	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.348.493,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: capaian penetapan perda		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.147.687.529,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.429.499,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.878.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.012.649,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.257.800,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Presentase Pemenuhan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.266.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.603.452,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD		

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.099.258,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.648.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.614.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.930.652.610,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.300,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.584.456,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.640.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.396.140,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.844.060,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.924.471,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.959.172,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.178.930,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.654.295,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.706.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.994.742,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.867.761,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.285.872,00	

Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.045.924.125,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.949.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.840.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.263.976,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.101.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.972.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.651.113.360,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan data untuk perencanaan Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.284.420,00	

Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.515.580,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.998.174,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.080.404,13	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.875.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.431.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.630.437,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.033.300,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.261.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.918.310,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.721.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.899.110,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.056.810,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.834.090,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.580.000,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.462.544,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.021.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.598.037.462,53	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.689.893,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,59	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.316.885,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.032.902,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.266.731,01	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.176.067,99	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.668.206,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.006.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.718.530,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.116.893,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.238.705,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.120.256,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.951.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.868.178,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.420.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		

Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Silpa terhadap APBD		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.557.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.557.425,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.122.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.942.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.645.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.912.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.605.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.384.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.506.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.864.500,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.981.012.988,52	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.096.467.249,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.116.847.410,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.591.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.457.400,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Cakupan pengelolaan asset daerah		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.332.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.788.440,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.432.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.749.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase tingkat pertumbuhan PAD		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.058.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.975.078,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.879.601,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.553.980,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.351.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	21.598.269.234,99	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.648.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.333.033,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.731.122,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.761.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.586.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.430.464,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.302.445,36	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.612.994,64	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.977.758,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.367.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.094.000,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.722.541,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.448.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional dan Pelaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.155.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.941.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Persentase Aparatur Berkinerja Baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.154.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.463.911,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perudang-undangan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.728.619.135,98	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.736.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.903,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.210.770,82	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.690.776,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.210.816,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.196.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.916.172,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.617.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.629.216,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.535.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.622.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.503.169,20	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.956.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.398.283,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur		
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.375.812,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.142.813,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.556.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.171.800,00	
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN		
Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		
Indikator Hasil	: Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri		
Kegiatan	: 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.954.730,00	

Kegiatan	: 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.02.0003 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.836.045,00	
Kegiatan	: 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.265.850,00	
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.994.120.606,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.308.000,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.735.707,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.015.164,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.866.517,00	

Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.147.720,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.378.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.862.744,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.292.080,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.547.330,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.360.782,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.713.596,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.534.848,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.427.162,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.599.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.426.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.899.432,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.723.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.972.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.500.152,13	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.488.150,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP		
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.856.351,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.227.482,00	
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.492.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.933.042,87	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.176.567,13	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.882.089,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.513.160,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.775.438.831,77	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.883.100,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.428.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.567.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.950.437,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.187.578,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.598.419,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.061.776,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.376.740,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.299.984,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.163.024,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.772.518,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.723.591,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.828.518,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.240,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.601.068,10	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
BELANJA DAERAH			

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.402.715.389,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.614.088,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.677.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.749.892,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.096.273,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.239.344,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.268.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.937.467.078,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.156.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.046.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.131,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.678.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.551.399,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.217.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.160.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.673.001,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.065.420,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.153.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN TAREMPA		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.482.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.365.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.640.444,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.481.273,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.845.458,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.922.175,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.987.152,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.850.858,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.574.936,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.215.360,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	38.643.412,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.562.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.543.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.731.887.865,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.440.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.843.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.842.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.104.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.890,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.709.895,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.023.773,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.502.840,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.503.124,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.504.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.990.306,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.892.763,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.742.388,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.01 KELURAHAN LETUNG		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.184.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.450.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.998.928,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.820.800,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PALMATAK		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PALMATAK		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan Palmatak		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.776.154,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.125.504,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan/Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang ditargetkan 100%		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.724.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.356.752.672,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.720.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.514.285,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.955.724,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.306.330,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.852.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.143.234,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.762.882,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Tiap Kecamatan (Kecamatan Siantan Timur)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.279.376,01	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.333.828,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.704.120,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.370.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.212.936.481,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.424.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.042.474,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.891.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.247.419,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.909.992,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.977.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.587.995,99	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.273.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.655.896,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.880.256,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.722.280,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.816.840,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.832.484.073,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.439.140,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.990.260,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.244.373,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.956.743,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.799.547,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.111.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.760.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.572.016,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.433.814,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.518.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.938.635,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.120.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Jemaja Timur)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Jemaja Timur) Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Tersedia nya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.877.837,32	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: TERLAKSANA NYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: TERLAKSANA NYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.147.550,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: TERLAKASANANYA FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA DOKUMEN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.515.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: TERSEDIANYA DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA JUMLAH DOKUMEN DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.832.605,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.761.090,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.854.718,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.412.632,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.854.520,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.839.590,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.579.067.434,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.527.023,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.096,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA JUMLAH LAPORAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.105.100,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA PAKAIAAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANYA PEGAWAI KANTOR KECAAMATAN JEMAJA TIMUR		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.228.115,90	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DI SEDIAKAN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.376.163,60	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.481.486,18	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.576.060,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.047.005,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.715.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.902.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KANTOR		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: TERSEDIANYA JUMLAH KENDARAAN DINAS DAN PEMELIHARAAN PERALATAN MESIN LAINNYA		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.533.380,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Siantan Tengah)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.050.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Siantan Tengah)		

Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: undefined		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.252.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Siantan Tengah)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.913.282,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Tengah)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.026.950,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.362.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.624.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.649.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.704.547.573,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.656.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.472.190,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: PersentaseAdministrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.046.968,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.155.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.781.768,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.994.860,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.118.430,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.920.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.395.923,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.550.426,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.212.830,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.452.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIANTAN UTARA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIANTAN UTARA		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Siantan Utara)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.473.275,88	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.878.777,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.029.543.898,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.680.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.788.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.242.888,12	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.536.275,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.517.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.862.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.224.495,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.193.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.436.600,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja Barat)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah agenda Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.817.751,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja Barat)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja Barat)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan fasilitasu Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah drsa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.622.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.741.180,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan pemerintahan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.001.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.090.414,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.113.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.945.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.196.521.862,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.076.700,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.002.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.461.538,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.468.480,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.274.410,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.436.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.229.476,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.991.747,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.371.088,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.058.864,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.556.352,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KUTE SIANTAN		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KUTE SIANTAN		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.090.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.313.096,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.322.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.768.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.611.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.827.800,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.386.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.258.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.155.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.090.104.797,09	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.409.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.384.682,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.440.244,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.766.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.993.878,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.480.206,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.934.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.467.650,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.567.440,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.592.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.868.995,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.089.445,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.432.487,91	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.015,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: indeks kepuasan masyrakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		

Indikator Keluaran	: Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Terlaksananya kegiatan GNRM		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.983.449,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.564.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	419.507.589,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Kepulauan Anambas indeks kepuasan masyrakat bidang organisasi masyarakat		
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Terbentuknya tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas Terlaksananya monitoring perkembangan ormas di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: indeks kepuasan masyrakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat Terlaksananya kegiatan RAN P4GN Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya dialog antar umat beragama		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.013.870,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.878.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah -		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.611.520,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan		
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.045.350.504,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.680.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.428.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.955.995,29	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.399.730,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.167.460,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.677.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.086.000,00	

Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.338.372,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.963.964,16	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.669.599,94	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.420.732,61	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.378.359.422,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.878.359.422,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar	1182 Ruang /Sekolah/Unit/Buah/Set/ Siswa/Orang/Tahun							
1	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	437.670.525,20	158.107.801,00	0,00	0,00	595.778.326,20	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1.680.123.009,00	1.510.196.739,97	0,00	0,00	3.190.319.748,97	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	56.300.000,00	499.856.835,40	0,00	0,00	556.156.835,40	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	83.213.500,00	199.544.970,10	0,00	0,00	282.758.470,10	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
7	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	143.953.000,00	374.621.410,25	0,00	0,00	518.574.410,25	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	136.410.370,00	598.104.558,22	0,00	0,00	734.514.928,22	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	278.498.146,00	1.789.481.082,00	0,00	0,00	2.067.979.228,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
10	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17 Peserta Didik	199.774.705,00	0,00	0,00	0,00	199.774.705,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
11	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	171.085.900,00	0,00	0,00	0,00	171.085.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	379.218.703,00	0,00	0,00	0,00	379.218.703,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
13	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	68 Satuan Pendidikan	3.300.084,00	0,00	0,00	0,00	3.300.084,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
14	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	5.279.444.880,00	2.312.362.120,00	0,00	0,00	7.591.807.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
15	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
16	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	6.498.500,00	0,00	0,00	0,00	6.498.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
17	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
18	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	267.876.780,00	0,00	0,00	0,00	267.876.780,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
19	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	243.566.145,00	0,00	0,00	0,00	243.566.145,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
20	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	6.429.923,00	0,00	0,00	0,00	6.429.923,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
21	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	182.352.000,00	0,00	0,00	0,00	182.352.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
22	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	489.404.320,00	10.374.016,00	0,00	0,00	499.778.336,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
23	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	247.905.000,00	0,00	0,00	0,00	247.905.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
24	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	236.212.500,00	1.104.234.468,42	0,00	0,00	1.340.446.968,42	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	404 Peserta Didik	3.982.339.900,00	0,00	0,00	0,00	3.982.339.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
26	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	499.300.000,00	0,00	0,00	0,00	499.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar	226 Ruang/ Sekolah/Unit							
27	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
28	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
29	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
30	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	108.400.000,00	391.600.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
31	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah									
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	125.250.000,00	199.677.558,12	0,00	0,00	324.927.558,12	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	682.106.090,01	1.210.116.050,63	0,00	0,00	1.892.222.140,64	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
33	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	72.400.000,00	0,00	0,00	0,00	72.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
34	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
35	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	489.584.800,00	483.011.372,10	0,00	0,00	972.596.172,10	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
36	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	27 Paket	849.800.000,00	793.170.588,00	0,00	0,00	1.642.970.588,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
37	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	985 Peserta Didik	1.890.800.800,00	0,00	0,00	0,00	1.890.800.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
38	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	199.211.935,00	0,00	0,00	0,00	199.211.935,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	197.354.910,00	0,00	0,00	0,00	197.354.910,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
40	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	374.621.081,00	0,00	0,00	0,00	374.621.081,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
41	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
42	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27 Satuan Pendidikan	3.221.477.500,00	1.378.002.500,00	0,00	0,00	4.599.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
43	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
44	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
45	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
46	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	285.583.311,00	0,00	0,00	0,00	285.583.311,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
47	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	226.042.290,00	0,00	0,00	0,00	226.042.290,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
48	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
49	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	208.698.000,00	0,00	0,00	0,00	208.698.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
50	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
51	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	27 Paket	229.626.960,00	0,00	0,00	0,00	229.626.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
52	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	133.400.000,00	199.544.970,33	0,00	0,00	332.944.970,33	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
53	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	398.600.000,00	0,00	0,00	0,00	398.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya Pengelolaan PAUD	23 Unit/Ruang/Lembaga							
54	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit	859.110.749,00	795.691.511,20	0,00	0,00	1.654.802.260,20	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
55	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD									
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	1.178.831,00	482.922.977,00	0,00	0,00	484.101.808,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
56	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	653.845.313,20	289.589.772,00	0,00	0,00	943.435.085,20	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
57	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1800 Peserta Didik	1.958.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.958.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
58	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
59	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	27.316.000,00	0,00	0,00	0,00	27.316.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
60	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	68 Satuan Pendidikan	98.904.560,00	0,00	0,00	0,00	98.904.560,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
61	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	68 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
62	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
63	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
64	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
65	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
66	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1780 Paket	1.131.359.210,00	0,00	0,00	0,00	1.131.359.210,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
67	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	369.385.720,00	0,00	0,00	0,00	369.385.720,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
68	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68 Satuan Pendidikan	569.820.469,00	0,00	0,00	0,00	569.820.469,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
69	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	26 Lembaga /Orang							
70	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	120 Peserta Didik	314.480.000,00	0,00	0,00	0,00	314.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
71	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-							
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kurikulum	123 Kurikulum/Lembaga							
72	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	95 Dokumen	394.633.000,00	0,00	0,00	0,00	394.633.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
73	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	231 Buku	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
74	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	95 Orang	395.674.000,00	0,00	0,00	0,00	395.674.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-							
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Kegiatan Pengelolaan pendidikan dan sarana prasarana penunjang lainnya	1295 Ruang /Sekolah/Unit							
75	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-							
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	1 Sekolah							
76	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	1 Sekolah							
77	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	124.950.000,00	0,00	0,00	0,00	124.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
78	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	45.760.500,00	0,00	0,00	0,00	45.760.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen							
79	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	61.271.000,00	0,00	0,00	0,00	61.271.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen							
80	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	181.376.369.459,00	0,00	0,00	0,00	181.376.369.459,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen							
82	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
83	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Kantor	1 Dokumen							
84	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
85	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	271.033.971,00	731.504.491,00	0,00	0,00	1.002.538.462,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
86	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	111.800.000,00	0,00	0,00	0,00	111.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
87	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	324.882.326,00	0,00	0,00	0,00	324.882.326,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
88	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
89	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	444.430.000,00	0,00	0,00	0,00	444.430.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
90	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
91	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	305.664.911,78	0,00	0,00	0,00	305.664.911,78	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
92	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	188.774.937,00	0,00	0,00	0,00	188.774.937,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
93	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.300.000,00	0,00	0,00	0,00	90.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokentasi							
95	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	316.027.602,00	0,00	0,00	0,00	316.027.602,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
96	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	164.061.756,00	0,00	0,00	0,00	164.061.756,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
97	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
98	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	193.739.600,00	0,00	0,00	0,00	193.739.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
99	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5 Dokumen	143.571.675,00	0,00	0,00	0,00	143.571.675,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
100	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota									
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
101	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
102	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Orang	241.197.629,00	0,00	0,00	0,00	241.197.629,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
103	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 Unit	237.443.105,00	0,00	0,00	0,00	237.443.105,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
104	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	193.632.920,00	0,00	0,00	0,00	193.632.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-							
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
105	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
106	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
107	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	192.903.000,00	0,00	0,00	0,00	192.903.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen							
108	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah									
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang	125.357.500,00	0,00	0,00	0,00	125.357.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
109	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 Orang	218.171.403,00	0,00	0,00	0,00	218.171.403,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Dokumen							
110	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	293.385.070,00	0,00	0,00	0,00	293.385.070,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen							
111	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	6.927.285.544,77	0,00	0,00	0,00	6.927.285.544,77	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-							
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
113	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
114	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
115	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
116	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
117	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan									
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	235.383.110,00	0,00	0,00	0,00	235.383.110,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % 76,25 Persen 83,3 % 183/100.000 KH 100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %							
118	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	13 Unit	1.998.034.469,00	17.033.398.041,00	0,00	0,00	19.031.432.510,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Dana Alokasi Umum (DAU)
119	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	303.428.907,00	3.226.336.852,60	0,00	0,00	3.529.765.759,60	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Dana Alokasi Umum (DAU)
120	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	14 Unit	669.614.000,00	0,00	0,00	0,00	669.614.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
122	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	13.998.178.622,00	34.075.930,00	0,00	0,00	14.032.254.552,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU)
123	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)									
			0	3 0	3.599.337.000,00	0,00	0,00	0,00	3.599.337.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
124	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	13 Paket	98.486.000,00	0,00	0,00	0,00	98.486.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	98,4 % 100 % 98 % 55 %							
125	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	192.600.000,00	0,00	0,00	0,00	192.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32369 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
127	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
128	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	48.171.200,00	0,00	0,00	0,00	48.171.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
129	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	310.013.500,00	0,00	0,00	0,00	310.013.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU)
130	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	137.042.000,00	0,00	0,00	0,00	137.042.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
131	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	79.140.000,00	0,00	0,00	0,00	79.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
132	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	303.774.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	379.774.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU)
133	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	9.133.131.125,22	0,00	0,00	0,00	9.133.131.125,22	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
134	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	15 Paket	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
135	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	67.268.074,13	0,00	0,00	0,00	67.268.074,13	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
136	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	162.417.750,00	0,00	0,00	0,00	162.417.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
137	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	68.665.000,00	0,00	0,00	0,00	68.665.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
138	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	243.607.000,00	0,00	0,00	0,00	243.607.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
139	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			0	1 0	9.268.108,00	0,00	0,00	0,00	9.268.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	- Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	0 90 %							
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	90 %							
140	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	549.901.000,00	0,00	0,00	0,00	549.901.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %							
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %							
141	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	53.940.213,93	0,00	0,00	0,00	53.940.213,93	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
142	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	95.045.333.035,30	0,00	0,00	0,00	95.045.333.035,30	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
143	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.308.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
144	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
145	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.545.700,00	0,00	0,00	0,00	10.545.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
146	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.375.480,00	132.031.849,15	0,00	0,00	165.407.329,15	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
147	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.028.636,00	0,00	0,00	0,00	13.028.636,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
148	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.624.300,00	0,00	0,00	0,00	153.624.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
149	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.846.753,88	0,00	0,00	0,00	74.846.753,88	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	311.313.000,00	0,00	0,00	0,00	311.313.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen							
151	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	119.186.380,33	0,00	0,00	0,00	119.186.380,33	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
152	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	104.488.940,00	0,00	0,00	0,00	104.488.940,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
153	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.730.000,00	0,00	0,00	0,00	30.730.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
154	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.735.742.526,00	0,00	0,00	0,00	8.735.742.526,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan	100 Persen							
155	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.834.600,00	0,00	0,00	0,00	41.834.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
157	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	298.994.333,92	0,00	0,00	0,00	298.994.333,92	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
158	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	49.522.800,00	0,00	0,00	0,00	49.522.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 %							
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)	100 %							
159	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
160	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
161	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB	100 %							
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif	100 %							
162	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	343.000.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
163	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
164	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
165	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan	100 %							
166	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1 Orang	972.200.000,00	0,00	0,00	0,00	972.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peserta KB aktif modern	35,5 %							
167	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	11.660.000,00	0,00	0,00	0,00	11.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
168	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Orang	162.550.000,00	0,00	0,00	0,00	162.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	19.332.000,00	0,00	0,00	0,00	19.332.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB	100 %							
170	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kampung	145.600.000,00	0,00	0,00	0,00	145.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan	100 %							
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R	100 %							
171	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
173	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	208.800.000,00	0,00	0,00	0,00	208.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
		RSUD Tarempa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya	100 %							
174	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
175	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
176	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
177	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
178	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.621.552,00	0,00	0,00	0,00	266.621.552,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
179	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
180	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
181	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	293.700.000,00	0,00	0,00	0,00	293.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
182	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							
183	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
184	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
185	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.858.235.100,00	200.000.000,00	0,00	0,00	3.058.235.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Siantan Timur									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	76,25 Persen 100 % 0 76,25 % 83,33 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM	98 % 98,4 % 55 % 100 %							
186	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	97.100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
187	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
188	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
189	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
190	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	153.205.000,00	0,00	0,00	0,00	153.205.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
191	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
193	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12.335.000,00	0,00	0,00	0,00	12.335.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
194	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
195	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	85.565.000,00	0,00	0,00	0,00	85.565.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
196	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	85.498.000,00	0,00	0,00	0,00	85.498.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
197	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
198	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	34.098.000,00	0,00	0,00	0,00	34.098.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
199	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	1.794.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
200	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
201	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.856.000,00	0,00	0,00	0,00	11.856.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
202	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	213.164.000,00	0,00	0,00	0,00	213.164.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
203	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	44.785.000,00	0,00	0,00	0,00	44.785.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							
204	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.240.000,00	0,00	0,00	0,00	20.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
205	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	303.567.163,00	31.000.000,00	0,00	0,00	334.567.163,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
206	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.408.220,00	0,00	0,00	0,00	1.408.220,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
207	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.928.140,00	0,00	0,00	0,00	7.928.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
208	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.228.000,00	0,00	0,00	0,00	8.228.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
209	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
210	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
211	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.851.200,00	0,00	0,00	0,00	10.851.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
212	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	99.591.208,00	0,00	0,00	0,00	99.591.208,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							
213	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
214	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.490.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Puskesmas Jemaja Barat									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	76,25 % 100 % 83,33 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	98 % 100 % 98,4 % 55 %							
215	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	38.425.000,00	0,00	0,00	0,00	38.425.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
216	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
217	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
218	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
219	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	101.705.000,00	0,00	0,00	0,00	101.705.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
220	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
221	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
222	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
223	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
224	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	48.200.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
225	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	112.024.000,00	0,00	0,00	0,00	112.024.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
226	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
227	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
228	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
229	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
230	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12.678.800,00	0,00	0,00	0,00	12.678.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
231	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.894.000,00	0,00	0,00	0,00	5.894.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
232	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.989.500,00	0,00	0,00	0,00	5.989.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
233	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.883.060,00	0,00	0,00	0,00	42.883.060,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
234	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.010.000,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
235	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.997.053,00	0,00	0,00	0,00	19.997.053,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
236	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.054.987,00	0,00	0,00	0,00	10.054.987,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.010.000,00	0,00	0,00	0,00	50.010.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Puskesmas Siantan Utara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	83,33 % 76,25 % 100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	55 % 98 % 100 % 98,4 %							
238	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	74.800.000,00	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
239	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
240	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	72.231.000,00	0,00	0,00	0,00	72.231.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
242	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
243	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
244	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.680.000,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
245	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	63.340.000,00	0,00	0,00	0,00	63.340.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
246	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	97.328.000,00	0,00	0,00	0,00	97.328.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
247	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
248	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
249	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
250	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.735.000,00	0,00	0,00	0,00	5.735.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
251	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.222.325,00	0,00	0,00	0,00	1.222.325,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
252	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	11.681.085,00	0,00	0,00	11.681.085,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
253	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.680.011,00	0,00	0,00	0,00	7.680.011,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
254	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
255	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
256	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
257	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	32.275.940,00	0,00	0,00	0,00	32.275.940,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
258	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							
259	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.962.700,00	0,00	0,00	0,00	3.962.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
260	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Puskesmas Kute Siantan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	76,25 Persen 100 % 83,33 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	98 % 100 % 100 Persen 55 % 98,4 %							
261	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	82.720.000,00	0,00	0,00	0,00	82.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
262	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
263	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
264	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
265	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	98.045.000,00	0,00	0,00	0,00	98.045.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
266	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
267	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
268	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
269	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
270	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	31.670.000,00	0,00	0,00	0,00	31.670.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
271	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	338.856.800,00	19.392.000,00	0,00	0,00	358.248.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
272	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
273	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
274	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
275	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
276	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	53.840.000,00	0,00	0,00	0,00	53.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	98,4 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
278	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
279	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
280	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
281	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		RSUD Jemaja									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya	100 %							
282	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
284	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
285	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.748.984,00	0,00	0,00	0,00	18.748.984,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
286	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.188.224,00	0,00	0,00	0,00	225.188.224,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
287	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
288	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
289	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.692.901,00	0,00	0,00	0,00	21.692.901,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
291	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							
292	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.700.000,00	0,00	0,00	0,00	44.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
293	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
294	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	275.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		RSUD Palmatak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya	100 %							
295	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
296	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.577.864,00	0,00	0,00	0,00	6.577.864,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
297	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.489.137,27	118.510.862,73	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
298	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	270.289.739,00	0,00	0,00	0,00	270.289.739,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
299	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
300	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	231.676.000,00	0,00	0,00	0,00	231.676.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %							
301	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.024.000,00	0,00	0,00	0,00	33.024.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
302	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Siantan Tengah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	100 % 83,33 % 76,25 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM	55 % 98 % 98,4 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	95.400.000,00	0,00	0,00	0,00	95.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
304	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
305	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
306	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
307	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	161.956.000,00	0,00	0,00	0,00	161.956.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
308	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
309	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.570.000,00	0,00	0,00	0,00	12.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
310	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	25.510.000,00	0,00	0,00	0,00	25.510.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
311	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
312	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	74.199.000,00	0,00	0,00	0,00	74.199.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
313	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	164.082.000,00	0,00	0,00	0,00	164.082.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
314	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
315	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
316	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
317	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
318	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	22.785.000,00	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
319	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.771.694,00	0,00	0,00	0,00	9.771.694,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
320	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	355.787.133,00	0,00	0,00	0,00	355.787.133,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undefined	100 % undefined undefined							
321	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.901.870,00	0,00	0,00	0,00	45.901.870,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
322	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	271.424.960,00	0,00	0,00	0,00	271.424.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Letung									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	100 % 76,25 % 83,33 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	55 % 98,4 % 100 % 98 %							
323	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	43.140.000,00	0,00	0,00	0,00	43.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
324	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	24.980.000,00	0,00	0,00	0,00	24.980.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
325	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
326	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	10.320.000,00	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
327	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	206.270.000,00	0,00	0,00	0,00	206.270.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
328	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
329	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.040.000,00	0,00	0,00	0,00	12.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
330	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
331	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
332	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	39.660.000,00	0,00	0,00	0,00	39.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
333	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	63.767.000,00	0,00	0,00	0,00	63.767.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
334	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	5.198.000,00	0,00	0,00	0,00	5.198.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
335	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	24.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
336	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
337	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	20.640.000,00	0,00	0,00	0,00	20.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
338	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	45.240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
340	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.991.116,00	0,00	0,00	0,00	57.991.116,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
341	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.570.000,00	0,00	0,00	0,00	37.570.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
342	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	459.212.358,00	80.787.642,00	0,00	0,00	540.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Jemaja Timur									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	83,33 % 76,25 % 100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM	98,4 % 98 % 55 % 100 %							
343	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	38.880.000,00	0,00	0,00	0,00	38.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
344	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	29.040.000,00	0,00	0,00	0,00	29.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
345	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
346	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	16.830.000,00	0,00	0,00	0,00	16.830.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
347	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	98.770.000,00	0,00	0,00	0,00	98.770.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
348	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
349	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
350	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
351	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
352	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
353	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	133.756.000,00	0,00	0,00	0,00	133.756.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
354	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
355	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
356	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
357	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	10.890.000,00	0,00	0,00	0,00	10.890.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
358	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
359	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.349.000,00	0,00	0,00	0,00	7.349.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
360	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.148.000,00	0,00	0,00	0,00	69.148.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
361	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.479.600,00	0,00	0,00	0,00	26.479.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
362	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	178.404.410,00	50.000.000,00	0,00	0,00	228.404.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Palmatak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	100 % 83,33 % 76,25 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	98 % 100 % 55 % 98,4 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	105.600.000,00	0,00	0,00	0,00	105.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
364	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	5.490.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
365	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
366	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
367	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	136.835.000,00	0,00	0,00	0,00	136.835.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
368	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
369	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
370	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12.140.000,00	0,00	0,00	0,00	12.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
371	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
372	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	88.910.000,00	0,00	0,00	0,00	88.910.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
373	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	111.520.000,00	0,00	0,00	0,00	111.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
374	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
375	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
376	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.271.000,00	0,00	0,00	0,00	3.271.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
377	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
378	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.192.886,00	0,00	0,00	0,00	5.192.886,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
379	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.822.298,00	0,00	0,00	0,00	90.822.298,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
380	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	62.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
381	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	785.700.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	815.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Tarempa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	100 % 83,33 % 76,25 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 % 98,4 % 98 % 55 %							
382	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	66.250.000,00	0,00	0,00	0,00	66.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
383	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	75.400.000,00	0,00	0,00	0,00	75.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
384	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
385	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
386	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	120.925.000,00	0,00	0,00	0,00	120.925.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
387	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
388	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
389	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
390	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
391	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
392	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	145.700.000,00	0,00	0,00	0,00	145.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
393	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
394	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.630.000,00	0,00	0,00	0,00	22.630.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
395	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
396	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
397	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	70.450.000,00	0,00	0,00	0,00	70.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
398	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	15.604.820,00	0,00	0,00	0,00	15.604.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
399	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.888.000,00	0,00	0,00	0,00	38.888.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
400	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.626.000,00	0,00	0,00	0,00	55.626.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
401	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	952.000.000,00	210.391.059,00	0,00	0,00	1.162.391.059,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Siantan Selatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	100 % 83,33 % 76,25 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	100 % 55 % 98 % 98,4 %							
402	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	70.647.000,00	0,00	0,00	0,00	70.647.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
403	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	72.750.000,00	0,00	0,00	0,00	72.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
404	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
405	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	16.830.000,00	0,00	0,00	0,00	16.830.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
406	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	207.110.000,00	0,00	0,00	0,00	207.110.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
407	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	20.790.000,00	0,00	0,00	0,00	20.790.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
409	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	14.985.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
410	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
411	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	94.245.000,00	0,00	0,00	0,00	94.245.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
412	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	104.376.000,00	0,00	0,00	0,00	104.376.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
413	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
414	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11.755.000,00	0,00	0,00	0,00	11.755.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
415	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	10.230.000,00	0,00	0,00	0,00	10.230.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
416	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	53.460.000,00	0,00	0,00	0,00	53.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
417	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00	6.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
418	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	234.689.765,44	0,00	0,00	0,00	234.689.765,44	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
419	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
420	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.245,00	0,00	0,00	0,00	20.000.245,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %							
421	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	325.013.164,00	36.921.036,00	0,00	0,00	361.934.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-							
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
422	1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku									
			Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
423	1.03.02.2.01.0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya									
			Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Penampung Air Alami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
424	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
425	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
426	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
427	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing									
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
428	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater									
			Panjang Breakwater yang Dibangun	0 KM	107.750.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	307.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
429	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai									
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
430	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	142.650.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	542.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
431	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing									
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
432	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai									
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.2 KM	35.000.000,00	310.444.565,00	0,00	0,00	345.444.565,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
434	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
435	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
436	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
437	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi									
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
438	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai									
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
439	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	1.002.506.000,00	3.198.380.000,00	0,00	0,00	4.200.886.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
441	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
442	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
443	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
444	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-							
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
446	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	237.699.000,00	0,00	0,00	0,00	237.699.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
447	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3 Liter/Detik	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
448	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
449	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan ketersediaan sarpras pengelolaan persampahan	100 Persen							
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
450	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	187.778.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	237.778.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
452	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
453	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
454	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0.1 M^3/Hari	342.228.000,00	0,00	0,00	0,00	342.228.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
455	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat									
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0 M^3/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
456	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
457	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
458	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-							
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
459	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	200 M	190.000.000,00	1.259.631.955,00	0,00	0,00	1.449.631.955,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
460	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan									
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
461	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan									
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
463	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
464	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
465	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
466	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	800 unit 80 Persen							
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
467	1.03.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
468	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
469	1.03.07.2.01.0019	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
			Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
470	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-							
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-							
471	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	270.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	945.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
472	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	281.850.000,00	0,00	0,00	0,00	281.850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	5.537.656.000,00	8.303.000.000,00	0,00	0,00	13.840.656.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
474	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
475	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dokumen	193.263.613,00	0,00	0,00	0,00	193.263.613,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-							
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
476	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
478	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
479	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	449.141.298,00	200.000.000,00	0,00	0,00	649.141.298,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan	90 persen							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana trasportasi darat	35 KM							
480	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	551.390.000,00	0,00	0,00	0,00	551.390.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
481	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Dibangun	8 KM	986.289.200,03	10.881.490.800,00	0,00	0,00	11.867.780.000,03	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
482	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0 KM	1.203.262.200,00	22.231.776.800,00	0,00	0,00	23.435.039.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)
483	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
484	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
485	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	10 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
486	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	725.858.400,00	7.255.000.000,00	0,00	0,00	7.980.858.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
487	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	59.150.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	509.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-							
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
489	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
490	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
491	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
492	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0 Perangkat Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-	-							
493	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-							
494	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 Paket Pekerjaan	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
495	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi									
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-							
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-							
496	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
497	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
498	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
499	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar									
			Jumlah data SHP Peta Dasar	0 Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
500	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
501	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	142.671.413,50	0,00	0,00	0,00	142.671.413,50	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
502	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
503	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
504	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
505	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
506	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.050.683.317,02	0,00	0,00	0,00	13.050.683.317,02	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
507	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.061.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
508	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
509	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
511	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
512	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
513	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	583.874.773,00	0,00	0,00	0,00	583.874.773,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
514	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1.440.476.700,00	0,00	0,00	0,00	1.440.476.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
515	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	214.323.264,00	0,00	0,00	0,00	214.323.264,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
517	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	235.900.324,00	0,00	0,00	0,00	235.900.324,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
518	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-							
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-							
519	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan									
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
520	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-							
521	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan									
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
522	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-							
523	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
524	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
525	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
526	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-							
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-							
527	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-							
528	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	0 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
529	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-							
530	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	120 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
531	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
532	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
533	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
534	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman	80 Persen 280 KK							
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman	280 KK							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
536	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	5.137.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	37.495.817.840,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
537	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
538	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-							
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
539	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
540	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-							
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
541	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
542	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
543	2.10.05.2.01.0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
544	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	126.156.350,00	373.895.640,00	0,00	0,00	500.051.990,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
545	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
546	2.10.06.2.02.0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-							
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-							
547	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-							
548	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong									
			Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-							
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-							
550	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-							
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
551	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	111.818.000,00	0,00	0,00	0,00	111.818.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
552	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD SPAM SIANTAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan	56,7 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan cakupan distribusi air bersih;	341 SR							
553	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	826.700.432,70	27.660.567,30	0,00	0,00	854.361.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
554	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	161.074.448,49	30.685.551,51	0,00	0,00	191.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
555	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	108.240.000,00	0,00	0,00	0,00	108.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	100 %							
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	100 %							
556	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	0,00	26.393.820,00	0,00	0,00	26.393.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
557	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	249 Unit	53.400.000,00	700.629.971,00	0,00	0,00	754.029.971,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
558	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	7.395.059.246,00	0,00	0,00	0,00	7.395.059.246,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
559	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan							
560	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	10.788.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan							
561	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.475.648,00	0,00	0,00	0,00	9.475.648,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
562	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.050.000,00	86.384.165,00	0,00	0,00	97.434.165,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
563	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.981.434,08	0,00	0,00	0,00	64.981.434,08	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
564	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.238.800,00	0,00	0,00	0,00	15.238.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
565	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	268.780.000,00	0,00	0,00	0,00	268.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan							
566	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	48.105.592,92	0,00	0,00	48.105.592,92	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
567	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0,00	59.424.564,00	0,00	0,00	59.424.564,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
568	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	0,00	32.222.685,00	0,00	0,00	32.222.685,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
569	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	177.085.505,00	0,00	0,00	0,00	177.085.505,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan							
570	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	76.068.129,00	0,00	0,00	0,00	76.068.129,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
571	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	48.586.800,00	0,00	0,00	0,00	48.586.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
572	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan							
573	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	26.640.000,00	0,00	0,00	0,00	26.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
574	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	31.997.180,00	0,00	0,00	0,00	31.997.180,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-							
575	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	186.685.230,00	0,00	0,00	0,00	186.685.230,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %							
576	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit	100,00	4.988.500,00	0,00	0,00	4.988.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
577	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	9 Kawasan	4.211.600,00	0,00	0,00	0,00	4.211.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
578	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	155 Orang	129.509.359,00	0,00	0,00	0,00	129.509.359,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
579	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	87.514.500,00	0,00	0,00	0,00	87.514.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
580	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	9 Kawasan	4.400.100,00	0,00	0,00	0,00	4.400.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %							
581	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
582	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
583	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %							
584	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	26.173.000,00	0,00	0,00	0,00	26.173.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
585	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan	165.725.000,00	0,00	0,00	0,00	165.725.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	10 Dokumen							
586	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	97.021.500,00	0,00	0,00	0,00	97.021.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
587	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	10.538.764.897,00	0,00	0,00	0,00	10.538.764.897,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
588	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	226.068.000,00	0,00	0,00	0,00	226.068.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen							
589	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
590	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.465.130,00	0,00	0,00	0,00	8.465.130,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
591	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.904.715,00	0,00	0,00	0,00	58.904.715,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
592	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.310.660,00	0,00	0,00	0,00	35.310.660,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
593	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.219.150,00	0,00	0,00	0,00	56.219.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
594	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.324.000,00	0,00	0,00	0,00	37.324.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
595	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	169.461.188,00	0,00	0,00	0,00	169.461.188,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
596	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
597	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
598	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
599	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	221.064.004,00	0,00	0,00	0,00	221.064.004,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
600	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	15.210.510,00	0,00	0,00	15.210.510,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
601	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	68.310.000,00	0,00	0,00	0,00	68.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
602	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
603	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	182.367.410,00	0,00	0,00	0,00	182.367.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
604	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	92 Persen 100 Persen							
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	92 Persen							
605	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	10.740.000,00	0,00	0,00	0,00	10.740.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
606	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	10.083.103,00	0,00	0,00	0,00	10.083.103,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
607	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat									
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	16 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
608	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	35 laporan	105.186.096,00	0,00	0,00	0,00	105.186.096,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	92 %							
609	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	16.493.140,00	0,00	0,00	0,00	16.493.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
610	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40 Laporan	16.940.000,00	0,00	0,00	0,00	16.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	60 Persen							
611	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah									
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	80.104.000,00	0,00	0,00	0,00	80.104.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
612	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS									
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	60.650.000,00	0,00	0,00	0,00	60.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
613	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	19.877.000,00	0,00	0,00	0,00	19.877.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
614	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100 Persen							
615	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	11.324.853.534,00	0,00	0,00	0,00	11.324.853.534,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
616	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	128.280.000,00	0,00	0,00	0,00	128.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	100 Persen							
617	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.564.000,00	0,00	0,00	0,00	33.564.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100 Persen							
618	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	156.678.000,00	0,00	0,00	0,00	156.678.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	100 Persen							
619	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.250.924,00	0,00	0,00	0,00	5.250.924,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
620	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	71.645.031,00	0,00	0,00	0,00	71.645.031,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
621	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	8.270.284,00	0,00	0,00	0,00	8.270.284,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
622	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	47.560.500,00	0,00	0,00	0,00	47.560.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
623	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.887.900,00	0,00	0,00	0,00	13.887.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
624	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	219.715.000,00	0,00	0,00	0,00	219.715.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen							
625	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
626	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	353.105.325,00	0,00	0,00	0,00	353.105.325,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
627	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.350.000,00	0,00	0,00	0,00	43.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
628	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	95 Persen							
629	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	32.906.378,00	0,00	0,00	0,00	32.906.378,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
630	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	indeks kepuasan masyrakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	77 Persen							
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Terlaksananya kegiatan GNRM	1 Tim 1 Kali 50 Orang 1 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Forum 2 Kali							
631	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
632	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	45 Orang	1.303.983.449,00	0,00	0,00	0,00	1.303.983.449,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada	85,5 Persen							
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik	4 Rapat 10 Partai 60 Orang 1 Rapat 60 Orang 20 Orang 60 Orang							
633	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	442.071.589,00	0,00	0,00	0,00	442.071.589,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Kepulauan Anambas indeks kepuasan masyrakat bidang organisasi masyarakat	1 Laporan 78,5 Persen							
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Terbentuknya tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas Terlaksananya monitoring perkembangan ormas di Kecamatan	8 Rapat 8 Ormas 40 Orang 1 Tim 10 Kecamatan							
635	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kepuasan masyrakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	77 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat Terlaksananya kegiatan RAN P4GN Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya dialog antar umat beragama	1 Kali 1 Kali 4 Kali 1 Kali 0 Kali 2 kebijakan/ peraturan/ edaran 1 Kali 1 Kali							
636	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.013.870,00	0,00	0,00	0,00	50.013.870,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
637	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	209.878.000,00	0,00	0,00	0,00	209.878.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani	80 Persen							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah -	10 Kali 1 Kegiatan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
639	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	428.611.520,00	0,00	0,00	0,00	428.611.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan	100 Persen							
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan	100 %							
640	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.045.350.504,00	0,00	0,00	0,00	4.045.350.504,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
641	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	124.680.000,00	0,00	0,00	0,00	124.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %							
642	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.428.000,00	0,00	0,00	0,00	16.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
643	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.955.995,29	0,00	0,00	0,00	53.955.995,29	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
644	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.399.730,00	0,00	0,00	0,00	10.399.730,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
645	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.167.460,00	0,00	0,00	0,00	60.167.460,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
646	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.677.400,00	0,00	0,00	0,00	15.677.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
647	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	308.086.000,00	0,00	0,00	0,00	308.086.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
648	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	0,00	43.338.372,00	0,00	0,00	43.338.372,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	118.963.964,16	0,00	0,00	118.963.964,16	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
650	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	174.669.599,94	0,00	0,00	0,00	174.669.599,94	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
651	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
652	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.420.732,61	0,00	0,00	0,00	22.420.732,61	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
653	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
654	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
656	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4.890.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-							
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang							
657	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-							
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-							
658	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan									
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	180.245.458,00	0,00	0,00	0,00	180.245.458,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-							
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
659	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	189.687.650,01	0,00	0,00	0,00	189.687.650,01	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
660	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
661	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
662	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-							
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-							
663	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	49.754.542,00	0,00	0,00	0,00	49.754.542,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan undefined	100 Persen undefined undefined							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
664	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	46.619.632,00	0,00	0,00	0,00	46.619.632,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
665	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.556.427.024,96	0,00	0,00	0,00	4.556.427.024,96	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
666	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	135.120.000,00	0,00	0,00	0,00	135.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
667	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Laporan	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	20.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
668	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	26.760.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.278.920,00	0,00	0,00	0,00	33.278.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
670	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	243.615.506,00	0,00	0,00	243.615.506,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
671	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.875.822,00	0,00	0,00	0,00	32.875.822,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
672	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.423.424,00	0,00	0,00	0,00	62.423.424,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
673	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.411.200,00	0,00	0,00	0,00	50.411.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
674	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	433.400.313,03	0,00	0,00	0,00	433.400.313,03	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 %							
675	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	113.226.330,00	0,00	0,00	0,00	113.226.330,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
676	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	150.781.236,00	0,00	0,00	0,00	150.781.236,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
677	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
678	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
679	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	26.520.000,00	0,00	0,00	0,00	26.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
680	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	34.270.000,00	0,00	0,00	0,00	34.270.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-							
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
681	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
682	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
683	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
684	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	115.240.000,00	0,00	0,00	0,00	115.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
685	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	88.400.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-							
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
686	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-							
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	272.050.000,00	0,00	0,00	0,00	272.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
688	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
689	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
690	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-							
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
691	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
692	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
693	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
695	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
696	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
697	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
698	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
699	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 %							
700	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	49.906.800,00	0,00	0,00	0,00	49.906.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
701	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1000 Dokumen	176.378.250,00	0,00	0,00	0,00	176.378.250,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
702	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10 Laporan	181.300.000,00	0,00	0,00	0,00	181.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100 %							
703	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 Dokumen	50.518.900,00	0,00	0,00	0,00	50.518.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0 -18 Tahun (%)	100 %							
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil	100 %							
704	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1000 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-							
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-							
705	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	175.105.000,00	0,00	0,00	0,00	175.105.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase publikasi Profil Kependudukan	100 %							
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan	100 %							
706	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 Dokumen	68.986.400,00	0,00	0,00	0,00	68.986.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
707	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
708	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%	100 %							
709	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	8.473.406.230,00	0,00	0,00	0,00	8.473.406.230,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
710	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	139.560.000,00	0,00	0,00	0,00	139.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
711	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
712	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	161.169.780,00	0,00	0,00	0,00	161.169.780,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
713	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.964.048,00	0,00	0,00	0,00	12.964.048,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.263.846,59	331.735.633,41	0,00	0,00	342.999.480,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
715	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.998.922,00	0,00	0,00	0,00	12.998.922,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
716	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.801.000,00	0,00	0,00	0,00	19.801.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
717	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.623.560,00	0,00	0,00	0,00	36.623.560,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
718	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	12.370.000,00	0,00	0,00	0,00	12.370.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
719	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	314.227.658,00	0,00	0,00	0,00	314.227.658,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %							
720	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	98.838.060,00	0,00	0,00	0,00	98.838.060,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	196.000.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
722	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
723	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
724	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12.810.000,00	0,00	0,00	0,00	12.810.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
725	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.830.740,00	0,00	0,00	0,00	95.830.740,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Persentase Penataan Desa	7,7 % 0 % 80,77 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-							
726	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa									
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	18 Desa	363.168.733,00	0,00	0,00	0,00	363.168.733,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
727	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa									
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	52 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
728	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa									
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	18 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
729	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	18 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	25 %							
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-							
730	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
731	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintahan desa	73 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-							
732	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.029.498.400,00	0,00	0,00	0,00	1.029.498.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
733	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	93.428.000,00	0,00	0,00	0,00	93.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
734	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
735	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
736	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	57.428.000,00	0,00	0,00	0,00	57.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
737	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	18 Desa	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
738	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	42 %							
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
739	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	103.960.000,00	0,00	0,00	0,00	103.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
740	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
741	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
742	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
743	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	438.612.785,00	0,00	0,00	0,00	438.612.785,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
744	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.477.896.368,00	0,00	0,00	0,00	2.477.896.368,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
745	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	129.948.000,00	0,00	0,00	0,00	129.948.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
746	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.946.494,00	0,00	0,00	0,00	3.946.494,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
747	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	249.268.797,00	0,00	0,00	249.268.797,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
748	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
749	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.588.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
750	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	277.788.000,00	0,00	0,00	0,00	277.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
751	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
752	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	42.854.602,00	0,00	0,00	0,00	42.854.602,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.624.000,00	0,00	0,00	0,00	21.624.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
754	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
755	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6.881.944,00	0,00	0,00	0,00	6.881.944,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
756	2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3 Kali							
757	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	46.412.000,00	0,00	0,00	0,00	46.412.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan	3 Kali							
758	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Ha	51.276.829,08	5.874.661,62	0,00	0,00	57.151.490,70	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penaatan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Kegiatan							
759	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	3 Badan Usaha	379.967.017,80	0,00	0,00	0,00	379.967.017,80	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan sekolah Adiwiyata yang diberikan	2 Sekolah							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	180.620.025,15	0,00	0,00	0,00	180.620.025,15	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	100 Persen							
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	3 Aksi							
761	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduann Lingkungan Hidup	100 Persen							
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen							
762	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Berwawasan Lingkungan	100 Persen							
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah aksi pengelolaan sampah yang dilaksanakan	6 Kali							
763	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	12,57 Ton	82.051.178,00	0,00	0,00	0,00	82.051.178,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
764	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah									
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	8 Unit	69.836.822,00	186.700.000,00	0,00	0,00	256.536.822,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 Persen							
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dilengkapi Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan	5 Km							
765	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
766	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	25.178.000,00	54.981.772,00	0,00	0,00	80.159.772,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
767	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
768	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	154.038.228,00	0,00	0,00	0,00	154.038.228,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	1 Dokumen							
769	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
770	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
771	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Sekolah	100 Persen							
772	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.837.000,00	0,00	0,00	0,00	8.837.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
773	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	16.965.000,00	0,00	0,00	0,00	16.965.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut	100 Persen							
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut	6 Unit							
774	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	5 Unit	3.553.734.669,39	9.610.098.736,01	0,00	0,00	13.163.833.405,40	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
775	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	20.700.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	110.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
776	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	828.494.064,00	0,00	0,00	0,00	828.494.064,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen							
777	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.792.000,00	0,00	0,00	0,00	17.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
778	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.208.000,00	0,00	0,00	0,00	12.208.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	12.451.711.460,00	0,00	0,00	0,00	12.451.711.460,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
780	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	356.904.000,00	0,00	0,00	0,00	356.904.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan							
781	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
782	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.420.985,00	0,00	0,00	0,00	5.420.985,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
783	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.970.212,00	33.578.079,42	0,00	0,00	39.548.291,42	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
784	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	82.853.511,00	0,00	0,00	0,00	82.853.511,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
785	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.978.000,00	0,00	0,00	0,00	24.978.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
786	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	51.750.000,00	0,00	0,00	0,00	51.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
787	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	304.771.581,00	0,00	0,00	0,00	304.771.581,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
788	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	71.935.715,00	0,00	0,00	0,00	71.935.715,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
789	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	68.686.000,00	0,00	0,00	0,00	68.686.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
790	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	23.442.315,00	0,00	0,00	0,00	23.442.315,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
791	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	16 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	447.267.530,00	0,00	0,00	0,00	447.267.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
793	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.920.000,00	0,00	0,00	0,00	26.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
794	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.243.479,00	0,00	0,00	0,00	3.243.479,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
795	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.859.540,00	16.024.665,96	0,00	0,00	67.884.205,96	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
796	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.104.820,00	0,00	0,00	0,00	3.104.820,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
797	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	309.379.940,00	0,00	0,00	0,00	309.379.940,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
798	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.360.479,62	0,00	0,00	0,00	54.360.479,62	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
799	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
800	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	52.306.000,00	0,00	0,00	0,00	52.306.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
801	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.918.000,00	0,00	0,00	0,00	9.918.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
802	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.834.280,00	0,00	0,00	0,00	12.834.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
803	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	47.600.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	3 Unit							
804	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
805	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	37.660.000,00	0,00	0,00	0,00	37.660.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		UPT PENGELOLAAN SAMPAH									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
806	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	743.270,00	0,00	0,00	0,00	743.270,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
807	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.432.390,00	410.000.000,00	0,00	0,00	432.432.390,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
808	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.655.000,00	0,00	0,00	0,00	7.655.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
809	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.281.751,00	0,00	0,00	0,00	2.281.751,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
810	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.017.756,00	0,00	0,00	0,00	5.017.756,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
811	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
812	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	27.732.000,00	0,00	0,00	0,00	27.732.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
813	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.427.360,00	0,00	0,00	0,00	3.427.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
814	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	7.345.750,00	0,00	0,00	0,00	7.345.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	6 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	403.390.200,00	0,00	0,00	0,00	403.390.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
816	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	42.240.000,00	0,00	0,00	0,00	42.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	100 %							
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		undefined undefined							
817	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media									
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Layanan Laporan	3.647.299.627,20	0,00	0,00	0,00	3.647.299.627,20	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
818	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Dokumen Permohonan	76.384.308,00	0,00	0,00	0,00	76.384.308,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
819	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	53.908.081,00	0,00	0,00	0,00	53.908.081,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
820	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Dokumen Media	170.110.857,09	31.138.142,91	0,00	0,00	201.249.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
821	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	65.995.922,44	0,00	0,00	0,00	65.995.922,44	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN SPBE PEMERINTAH DAERAH YANG DITERAPKAN OLEH PERANGKAT DAERAH	100 %							
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
822	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	129.028.367,77	0,00	0,00	0,00	129.028.367,77	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
823	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Unit Dokumen	46.095.152,66	0,00	0,00	0,00	46.095.152,66	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
824	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Unit Aplikasi	42.842.000,00	0,00	0,00	0,00	42.842.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
825	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	78.734.800,00	0,00	0,00	0,00	78.734.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
826	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	3.551.236.292,69	222.434.224,23	0,00	0,00	3.773.670.516,92	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, DOKUMEN LAPORAN KINERJA DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU DAN HASIL PENGENDALIAN EVALUASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %							
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
827	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
828	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
829	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	5.404.566.759,00	0,00	0,00	0,00	5.404.566.759,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
830	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	203.040.000,00	0,00	0,00	0,00	203.040.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
831	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
832	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.564.000,00	0,00	0,00	0,00	33.564.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
833	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.934.962,00	0,00	0,00	0,00	9.934.962,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
834	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.684.380,00	0,00	0,00	0,00	4.684.380,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
835	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.752.152,00	0,00	0,00	0,00	14.752.152,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
836	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.118.632,00	0,00	0,00	0,00	51.118.632,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
837	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.768.854,00	0,00	0,00	0,00	37.768.854,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
838	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.020.000,00	0,00	0,00	0,00	22.020.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
839	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.278.000,00	0,00	0,00	0,00	400.278.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
840	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0,00	54.654.000,00	0,00	0,00	54.654.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
841	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.223.712,00	0,00	0,00	0,00	25.223.712,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
842	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	23.490.135,24	0,00	0,00	23.490.135,24	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
843	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	62.948.295,00	0,00	0,00	0,00	62.948.295,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
844	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.701.546,00	0,00	0,00	0,00	57.701.546,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
845	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
846	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	57.782.081,00	0,00	0,00	0,00	57.782.081,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
847	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	10.110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE LAJU PEMANFAATAN DATA SEKTORAL	100 %							
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
848	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 Orang	54.905.000,00	0,00	0,00	0,00	54.905.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
849	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	1 Dokumen Persentase	57.495.000,00	0,00	0,00	0,00	57.495.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
850	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	75.732.000,00	0,00	0,00	0,00	75.732.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PELAKSANAAN KEAMANAN DIGITAL PERANGKAT DAERAH	29,03 %							
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
851	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	114.340.000,00	0,00	0,00	0,00	114.340.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
852	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	82.091.896,00	0,00	0,00	0,00	82.091.896,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun	87 %							
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	77 %							
853	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	66.070.000,00	0,00	0,00	0,00	66.070.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja	95 %							
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah masyarakat masyarakat pencari kerja yang terlayani dengan baik	75 %							
854	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10 Orang	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase besaran kasus yang diselesaikan	81,19 %							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya regulasi yang tersusun	67,16 %							
855	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	944.618.000,00	0,00	0,00	0,00	944.618.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha	47,50 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
856	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	393.682.420,37	0,00	0,00	0,00	393.682.420,37	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif	85,71 %							
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP	6 koperasi							
857	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	6 Unit Usaha	39.307.500,00	0,00	0,00	0,00	39.307.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan	85,71 %							
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan	18 orang							
858	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	18 Orang	49.781.000,00	0,00	0,00	0,00	49.781.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	95,16 %							
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi	59 usaha							
859	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	59 Unit Usaha	527.632.975,00	0,00	0,00	0,00	527.632.975,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	100 %							
860	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29.506.000,00	0,00	0,00	0,00	29.506.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100 %							
861	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	7.954.595.436,00	0,00	0,00	0,00	7.954.595.436,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
862	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	230.150.000,00	0,00	0,00	0,00	230.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
863	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.652.000,00	0,00	0,00	0,00	2.652.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.401.380,00	0,00	0,00	0,00	8.401.380,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
865	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	80.441.705,00	0,00	0,00	0,00	80.441.705,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
866	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.084.713,00	0,00	0,00	0,00	25.084.713,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
867	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.996.915,00	0,00	0,00	0,00	43.996.915,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
868	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.020.540,00	0,00	0,00	0,00	33.020.540,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
869	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	641.763.000,00	0,00	0,00	0,00	641.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	100 %							
870	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	70.452.082,00	0,00	0,00	70.452.082,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.170.010,00	0,00	0,00	0,00	18.170.010,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
872	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.361.800,00	0,00	0,00	0,00	73.361.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
873	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100 %							
874	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	49.697.785,00	0,00	0,00	0,00	49.697.785,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
875	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	73 %							
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	101 perizinan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
876	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	101 Dokumen	16.326.860,00	0,00	0,00	0,00	16.326.860,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	80 %							
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 unit							
877	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit	359.731.418,00	0,00	0,00	0,00	359.731.418,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang	0,71 %							
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)	15 Hari							
878	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24 Laporan	87.077.500,00	0,00	0,00	0,00	87.077.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	88 %							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	88 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	466.648.092,77	0,00	0,00	0,00	466.648.092,77	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri	80 %							
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri di dalam SINNAS	1 Informasi							
880	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	14 Dokumen	62.127.500,00	0,00	0,00	0,00	62.127.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	83,33 %							
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan	250 usaha							
881	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	12 Unit Usaha	226.061.968,00	0,00	0,00	0,00	226.061.968,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %							
882	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.988.115,67	0,00	0,00	0,00	3.988.115,67	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tingkat pelayanan BLUD	100 %							
883	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		UPT METROLOGI LEGAL									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peralatan yang terstandardisasi	96 %							
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP Terkaliberasi	120 Unit							
884	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	120 Unit	95.363.067,00	0,00	0,00	0,00	95.363.067,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100 %							
885	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0 0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
886	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	168.381.500,00	0,00	0,00	0,00	168.381.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
887	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	204.762.057,00	0,00	0,00	0,00	204.762.057,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-							
888	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	380.316.000,00	0,00	0,00	0,00	380.316.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
889	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha	42.138.000,00	0,00	0,00	0,00	42.138.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
890	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	33.940.000,00	0,00	0,00	0,00	33.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
891	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26.951.000,00	0,00	0,00	0,00	26.951.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %							
892	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	4.388.506.315,00	0,00	0,00	0,00	4.388.506.315,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
893	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	128.160.000,00	0,00	0,00	0,00	128.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
894	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
895	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.056.000,00	0,00	0,00	0,00	19.056.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
896	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.290.919,00	0,00	0,00	0,00	2.290.919,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
897	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
898	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.036.592,00	0,00	0,00	0,00	5.036.592,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
899	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00	22.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
900	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.520.052,00	0,00	0,00	0,00	13.520.052,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
901	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	239.396.000,00	0,00	0,00	0,00	239.396.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
902	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.803.100,00	0,00	0,00	0,00	27.803.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
903	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	34.203.535,00	0,00	0,00	0,00	34.203.535,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
904	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.723.392,00	0,00	0,00	0,00	1.723.392,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
906	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	9.205.959,00	0,00	0,00	0,00	9.205.959,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
907	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Cakupan Layanan Keperpustakaan	83 %							
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan	100 %							
908	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	314.440.769,00	0,00	0,00	0,00	314.440.769,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
909	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	289.737.770,00	0,00	0,00	0,00	289.737.770,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
910	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	85.766.000,00	0,00	0,00	0,00	85.766.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Gemar Membaca di daerah	100 %							
911	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	200 Orang	115.768.300,00	0,00	0,00	0,00	115.768.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
912	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus	298.847.242,00	0,00	0,00	0,00	298.847.242,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %							
913	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.510.094,00	0,00	0,00	0,00	55.510.094,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %							
914	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan Orang/bulan	2.512.102.637,00	0,00	0,00	0,00	2.512.102.637,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
915	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.812.000,00	0,00	0,00	0,00	79.812.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	100 %							
916	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	67.000.684,00	0,00	0,00	0,00	67.000.684,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
917	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	52.097.905,00	0,00	0,00	0,00	52.097.905,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
918	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	24.162.380,00	0,00	0,00	0,00	24.162.380,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
919	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	37.100.900,00	0,00	0,00	0,00	37.100.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
920	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	292.842.800,00	0,00	0,00	0,00	292.842.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	53.842.763,00	0,00	0,00	53.842.763,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
922	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.026.364,00	0,00	0,00	0,00	300.026.364,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %							
923	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	49.268.301,00	0,00	0,00	0,00	49.268.301,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
924	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar	48 %							
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Yang Sesuai Standar	48 %							
925	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	12 Berkas	104.672.661,00	0,00	0,00	0,00	104.672.661,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
926	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	56.954.500,00	0,00	0,00	0,00	56.954.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan	84 %							
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	1 Dokumen							
927	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	80.265.700,00	0,00	0,00	0,00	80.265.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	56 %							
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan	1 Dokumen							
928	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	113.567.931,00	0,00	0,00	0,00	113.567.931,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan	80 %							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100 %							
929	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	14.559.900,00	0,00	0,00	0,00	14.559.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5 %							
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi	16 Kelompok							
930	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	160 Orang	4.952.734.200,00	0,00	0,00	0,00	4.952.734.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
931	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16 Kelompok	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Genting Pulur	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	65 %							
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dibina	30 Kelompok							
932	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30 Kelompok	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	235 Ton							
933	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	48.266.901,50	1.733.098,50	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
934	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Pengolahan Perikanan	83.30 %							
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran	200 Dokumen							
935	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	200 Dokumen	31.972.000,00	0,00	0,00	0,00	31.972.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan	100 %							
936	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	200.428.000,00	0,00	0,00	0,00	200.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan dinas	100 %							
937	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	13.204.389.616,00	0,00	0,00	0,00	13.204.389.616,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
938	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	242.160.000,00	0,00	0,00	0,00	242.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi BMD	100 %							
939	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.368.000,00	0,00	0,00	0,00	40.368.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %							
940	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
941	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
942	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
943	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.652.473,00	0,00	0,00	0,00	43.652.473,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
944	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
945	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	376.120.000,00	0,00	0,00	0,00	376.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya BMD	100 %							
946	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	64.974.183,00	0,00	0,00	64.974.183,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
947	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	64.706.226,00	0,00	0,00	64.706.226,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
948	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	342.876.095,00	0,00	0,00	0,00	342.876.095,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda	100 %							
949	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	112.704.045,00	0,00	0,00	0,00	112.704.045,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.516.445,00	0,00	0,00	0,00	50.516.445,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
951	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %							
952	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	13.822.515,00	0,00	0,00	0,00	13.822.515,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
953	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	15.383.857,00	0,00	0,00	0,00	15.383.857,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
954	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	80 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
955	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	551.358.914,00	0,00	0,00	0,00	551.358.914,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	88.20 %							
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan	1 Unit							
956	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	1 Unit							
957	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	405.000.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet	86 %							
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penjaminan kesehatan hewan	1300 Ekor							
958	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 Laporan							
959	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	215.000.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75 %							
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan	85 %							
960	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	22.568.516,00	3.431.484,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani	95 %							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	12 Kali							
961	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	61 Persen 88 %							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	1 Kegiatan							
962	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	512.450.000,00	0,00	0,00	0,00	512.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan	90 %							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan							
963	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	253.266.680,00	0,00	0,00	0,00	253.266.680,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	75 %							
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	2 Cagar Budaya							
964	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-							
965	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	99.205.800,00	0,00	0,00	0,00	99.205.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	80 %							
966	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	283.117.422,00	13.934.032,00	0,00	0,00	297.051.454,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	83 %							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	83 %							
967	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	637.574.822,00	0,00	0,00	0,00	637.574.822,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen							
968	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
969	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.542.183.516,00	0,00	0,00	0,00	4.542.183.516,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
970	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	192.960.000,00	0,00	0,00	0,00	192.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
971	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.912.556,00	0,00	0,00	0,00	16.912.556,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
972	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.919.209,00	0,00	0,00	0,00	20.919.209,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
973	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.134.000,00	0,00	0,00	0,00	36.134.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
974	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
975	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	300.008.400,00	0,00	0,00	0,00	300.008.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
976	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	343.530.194,38	0,00	0,00	0,00	343.530.194,38	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100 %							
977	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100 %							
978	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	37.551.040,00	0,00	0,00	0,00	37.551.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
979	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.049.265,00	0,00	0,00	0,00	70.049.265,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
980	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.974.000,00	6.014.632,00	0,00	0,00	8.988.632,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
981	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100 %							
982	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.242.530,00	0,00	0,00	0,00	5.242.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
983	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	19.460.000,00	0,00	0,00	0,00	19.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
984	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	343.797.383,62	0,00	0,00	0,00	343.797.383,62	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		SEKRETARIAT DAERAH									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-							
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	48 Bulan							
985	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15 Dokumen	266.465.874,00	0,00	0,00	0,00	266.465.874,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
986	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	235.897.750,00	0,00	0,00	0,00	235.897.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	48 Bulan							
987	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.035.864.320,00	0,00	0,00	0,00	4.035.864.320,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
988	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20 Dokumen	3.954.316.902,00	0,00	0,00	0,00	3.954.316.902,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi Hukum	48 Bulan							
989	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	537.867.700,00	0,00	0,00	0,00	537.867.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
990	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	458.115.572,93	0,00	0,00	0,00	458.115.572,93	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
991	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen	170.563.000,00	0,00	0,00	0,00	170.563.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-							
992	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	134.608.750,00	0,00	0,00	0,00	134.608.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
993	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	206.244.360,00	0,00	0,00	0,00	206.244.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	48 Bulan							
994	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	20 Dokumen	32.085.000,00	0,00	0,00	0,00	32.085.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
995	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan	500.191.200,00	0,00	0,00	0,00	500.191.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
996	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan	88.439.700,00	0,00	0,00	0,00	88.439.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	undefined Jumlah Bulan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	undefined undefined 48 Bulan							
997	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	221.788.000,00	0,00	0,00	0,00	221.788.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen	326.708.000,00	708.059.105,00	0,00	0,00	1.034.767.105,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
999	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	236.176.560,00	0,00	0,00	0,00	236.176.560,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Bulan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam undefined	48 Bulan undefined undefined							
1000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10 Dokumen	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1001	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	10 Dokumen	48.350.000,00	0,00	0,00	0,00	48.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1002	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	10 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	48 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	25.493.654.996,00	0,00	0,00	0,00	25.493.654.996,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1004	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	802.896.000,00	0,00	0,00	0,00	802.896.000,00	[object Object]	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined	48 Bulan undefined undefined							
1005	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	61.957.300,00	0,00	0,00	0,00	61.957.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran	48 Bulan							
1006	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	88.243.160,00	0,00	0,00	0,00	88.243.160,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	160.329.297,00	0,00	0,00	0,00	160.329.297,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1008	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	44.984.079,00	0,00	0,00	0,00	44.984.079,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1009	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.346.722.529,41	0,00	0,00	0,00	1.346.722.529,41	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1010	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	197.832.300,00	0,00	0,00	0,00	197.832.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1011	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	1.012.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.024.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1012	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	2.005.830.809,00	0,00	0,00	0,00	2.005.830.809,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 Bulan							
1013	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	34.806.252,00	239.982.092,00	0,00	0,00	274.788.344,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Bulan							
1014	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	139.595.228,00	0,00	0,00	0,00	139.595.228,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1015	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	1.549.324.640,00	0,00	0,00	0,00	1.549.324.640,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1016	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Bulan							
1017	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	410.593.130,00	0,00	0,00	0,00	410.593.130,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1018	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	120.350.000,00	0,00	0,00	0,00	120.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1019	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.083.133.988,00	0,00	0,00	0,00	1.083.133.988,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 Bulan							
1020	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	177.988.160,00	0,00	0,00	0,00	177.988.160,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1021	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	113.675.860,00	0,00	0,00	0,00	113.675.860,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1022	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1023	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	48 Bulan							
1024	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1025	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	102.744.000,00	0,00	0,00	0,00	102.744.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1026	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	151.111.200,00	0,00	0,00	0,00	151.111.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Bulan Penataan Organisasi	48 Bulan							
1027	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen	216.100.820,94	0,00	0,00	0,00	216.100.820,94	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1028	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan	289.044.579,00	0,00	0,00	0,00	289.044.579,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1029	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	109.839.387,72	0,00	0,00	0,00	109.839.387,72	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	48 Bulan							
1030	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 Laporan	652.900.000,00	0,00	0,00	0,00	652.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1031	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	355.190.000,00	0,00	0,00	0,00	355.190.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1032	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	20 Laporan	440.348.493,00	0,00	0,00	0,00	440.348.493,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		SEKRETARIAT DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	capaian penetapan perda	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah	100 Persen							
1033	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Perda Dokumen	2.147.687.529,00	0,00	0,00	0,00	2.147.687.529,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1034	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	522.429.499,00	0,00	0,00	0,00	522.429.499,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen							
1035	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	124.010.000,00	0,00	0,00	0,00	124.010.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1036	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1037	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	360.878.000,00	0,00	0,00	0,00	360.878.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1038	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	360.878.000,00	0,00	0,00	0,00	360.878.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen							
1039	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.011.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1040	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1041	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	576.012.649,00	0,00	0,00	0,00	576.012.649,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1042	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1.280.257.800,00	0,00	0,00	0,00	1.280.257.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Pemenuhan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen							
1043	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1.266.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1044	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	355.478.000,00	0,00	0,00	0,00	355.478.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1045	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1.548.603.452,00	0,00	0,00	0,00	1.548.603.452,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen							
1046	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	3.035.721.000,00	0,00	0,00	0,00	3.035.721.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1047	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	2.520.099.258,00	0,00	0,00	0,00	2.520.099.258,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	8 Dokumen							
1048	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.648.100,00	0,00	0,00	0,00	44.648.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1049	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.579.100,00	0,00	0,00	0,00	1.579.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1050	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.612.600,00	0,00	0,00	0,00	1.612.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1051	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.614.800,00	0,00	0,00	0,00	1.614.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1052	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1053	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	44.878.000,00	0,00	0,00	0,00	44.878.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1054	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.373.500,00	0,00	0,00	0,00	1.373.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1055	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.930.652.610,00	0,00	0,00	0,00	5.930.652.610,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1056	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	207.000.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1057	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.516.300,00	0,00	0,00	0,00	1.516.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							
1058	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	55.584.456,00	0,00	0,00	0,00	55.584.456,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1059	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	92.640.000,00	0,00	0,00	0,00	92.640.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1060	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.396.140,00	0,00	0,00	0,00	30.396.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1061	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.844.060,00	397.924.471,00	0,00	0,00	443.768.531,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1062	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	41.959.172,00	0,00	0,00	0,00	41.959.172,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1063	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.178.930,00	0,00	0,00	0,00	75.178.930,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1064	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1065	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.654.295,00	0,00	0,00	0,00	2.654.295,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1066	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	41.420.000,00	0,00	0,00	0,00	41.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1067	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	204.706.000,00	0,00	0,00	0,00	204.706.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
1068	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	[object Object]
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 Persen							
1069	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	147.994.742,00	0,00	0,00	0,00	147.994.742,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1070	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	217.867.761,00	0,00	0,00	0,00	217.867.761,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1071	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	[object Object]
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1072	4.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	43.330.000,00	0,00	0,00	0,00	43.330.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1073	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	54.730.000,00	0,00	0,00	0,00	54.730.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1074	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	197.285.872,00	0,00	0,00	0,00	197.285.872,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen							
1075	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	11.045.924.125,00	0,00	0,00	0,00	11.045.924.125,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1076	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	288.949.000,00	0,00	0,00	0,00	288.949.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1077	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	626.840.000,00	0,00	0,00	0,00	626.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 Persen							
1078	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1079	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	510.263.976,00	0,00	0,00	0,00	510.263.976,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %							
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	100 %							
1080	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1081	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	426.101.840,00	0,00	0,00	0,00	426.101.840,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1082	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	10 Usulan	44.972.000,00	0,00	0,00	0,00	44.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1083	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.651.113.360,00	0,00	0,00	0,00	1.651.113.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah	80 % 80 %							
1084	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	38 Orang	93.284.420,00	0,00	0,00	0,00	93.284.420,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	85 %							
1085	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	152.515.580,00	0,00	0,00	0,00	152.515.580,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	94 %							
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %							
1086	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	123.998.174,00	0,00	0,00	0,00	123.998.174,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1087	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	38.080.404,13	0,00	0,00	0,00	38.080.404,13	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1088	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	16.875.200,00	0,00	0,00	0,00	16.875.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1089	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	125.431.000,00	0,00	0,00	0,00	125.431.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1090	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	45.630.437,00	0,00	0,00	0,00	45.630.437,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1091	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	32.033.300,00	0,00	0,00	0,00	32.033.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA	100 %							
1092	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	43.792.000,00	0,00	0,00	0,00	43.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1093	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.261.000,00	0,00	0,00	0,00	10.261.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1094	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	14.410.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1095	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	43.792.000,00	0,00	0,00	0,00	43.792.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1096	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	54.918.310,00	0,00	0,00	0,00	54.918.310,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1097	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %							
1098	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	149.721.800,00	0,00	0,00	0,00	149.721.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1099	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	32.899.110,00	0,00	0,00	0,00	32.899.110,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1100	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	18.675.000,00	0,00	0,00	0,00	18.675.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1101	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	12.056.810,00	0,00	0,00	0,00	12.056.810,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1102	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	10.834.090,00	0,00	0,00	0,00	10.834.090,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1103	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00	30.580.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	90 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	100 %							
1104	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.062.462.544,00	0,00	0,00	0,00	1.062.462.544,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1105	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	125.021.000,00	0,00	0,00	0,00	125.021.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %							
1106	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	7.598.037.462,53	0,00	0,00	0,00	7.598.037.462,53	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1107	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	257.280.000,00	0,00	0,00	0,00	257.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1108	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
1109	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	79.689.893,00	0,00	0,00	0,00	79.689.893,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1110	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	136.000.000,59	0,00	0,00	0,00	136.000.000,59	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	100 %							
1111	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	35.316.885,00	0,00	0,00	0,00	35.316.885,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1112	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	106.032.902,00	0,00	0,00	0,00	106.032.902,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1113	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	33.266.731,01	0,00	0,00	0,00	33.266.731,01	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1114	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	935 Paket	123.176.067,99	0,00	0,00	0,00	123.176.067,99	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1115	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	99.668.206,00	0,00	0,00	0,00	99.668.206,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1117	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	642.006.000,00	0,00	0,00	0,00	642.006.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1118	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %							
1119	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	154.460.000,00	0,00	0,00	154.460.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1120	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	230.718.530,00	113.116.893,00	0,00	0,00	343.835.423,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1121	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	35.238.705,00	267.120.256,00	0,00	0,00	302.358.961,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %							
1122	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.130.000,00	0,00	0,00	0,00	14.130.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1123	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.951.800,00	0,00	0,00	0,00	174.951.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1124	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %							
1125	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	60.868.178,00	0,00	0,00	0,00	60.868.178,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1126	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1127	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	35.420.000,00	0,00	0,00	0,00	35.420.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	82 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	80 %							
1128	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	135.142.813,00	0,00	0,00	0,00	135.142.813,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	70 %							
1129	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1.556.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1130	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	117.171.800,00	0,00	0,00	0,00	117.171.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Silpa terhadap APBD	5,50 %							
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %							
1131	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	47.557.750,00	0,00	0,00	0,00	47.557.750,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1132	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1133	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1134	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1135	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	40.557.425,00	0,00	0,00	0,00	40.557.425,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1136	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1137	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	772.122.000,00	0,00	0,00	0,00	772.122.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1138	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	729.942.000,00	0,00	0,00	0,00	729.942.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1139	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	439.645.500,00	0,00	0,00	0,00	439.645.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1140	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	263.860.000,00	0,00	0,00	0,00	263.860.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1141	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1142	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1143	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %							
1144	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	181.912.000,00	0,00	0,00	0,00	181.912.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1145	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	193.000.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun	100 %							
1146	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	84.605.000,00	0,00	0,00	0,00	84.605.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1147	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	386.152.000,00	0,00	0,00	0,00	386.152.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1148	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	161.384.000,00	0,00	0,00	0,00	161.384.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1149	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	93.506.000,00	0,00	0,00	0,00	93.506.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1150	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	285.864.500,00	0,00	0,00	0,00	285.864.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	100 %							
1151	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	8.981.012.988,52	0,00	8.981.012.988,52	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1152	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	52 Laporan	0,00	0,00	0,00	105.213.314.659,00	105.213.314.659,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %							
1153	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	924.591.500,00	231.457.400,00	0,00	0,00	1.156.048.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan asset daerah	93,30 %							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	100 %							
1154	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1155	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1156	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1157	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	689.332.000,00	0,00	0,00	0,00	689.332.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1158	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	446.788.440,00	0,00	0,00	0,00	446.788.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1159	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1160	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	462.432.000,00	0,00	0,00	0,00	462.432.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1161	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	215.749.000,00	0,00	0,00	0,00	215.749.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	4,47 %							
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun	100 %							
1162	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1163	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	102.058.000,00	0,00	0,00	0,00	102.058.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1164	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	291.975.078,00	0,00	0,00	0,00	291.975.078,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1165	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	107.879.601,00	0,00	0,00	0,00	107.879.601,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1166	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	82.553.980,00	0,00	0,00	0,00	82.553.980,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan	100 %							
1167	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.351.000,00	0,00	0,00	0,00	27.351.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1168	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %							
1169	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	21.598.269.234,99	0,00	0,00	0,00	21.598.269.234,99	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1170	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	654.648.000,00	0,00	0,00	0,00	654.648.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1171	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
1172	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	184 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	[object Object]
1173	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	[object Object]
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas	100 %							
1174	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	63.333.033,00	0,00	0,00	0,00	63.333.033,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1175	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	106.731.122,00	0,00	0,00	0,00	106.731.122,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1176	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	91.761.300,00	0,00	0,00	0,00	91.761.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1177	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	[object Object]
1178	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1179	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	374.586.000,00	0,00	0,00	0,00	374.586.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %							
1180	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1181	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	0,00	168.430.464,00	0,00	0,00	168.430.464,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1182	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	225.302.445,36	0,00	0,00	0,00	225.302.445,36	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %							
1183	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.612.994,64	0,00	0,00	0,00	108.612.994,64	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1184	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	145.977.758,00	0,00	0,00	0,00	145.977.758,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1185	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	[object Object]
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1186	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	76.367.500,00	0,00	0,00	0,00	76.367.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1187	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	54.430.000,00	0,00	0,00	0,00	54.430.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1188	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.094.000,00	0,00	0,00	0,00	100.094.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jumlah Pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	80 %							
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen							
1189	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	278.722.541,00	0,00	0,00	0,00	278.722.541,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1190	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	0 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1191	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	58.448.000,00	0,00	0,00	0,00	58.448.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional dan Pelaksana	80 %							
1192	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	410.155.520,00	0,00	0,00	0,00	410.155.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1193	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen	200.941.000,00	0,00	0,00	0,00	200.941.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan	289 Orang							
1194	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Berkinerja Baik	96 %							
1195	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	76.154.500,00	0,00	0,00	0,00	76.154.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1196	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	192.463.911,00	0,00	0,00	0,00	192.463.911,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perudang-undangan	100 %							
1197	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1198	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1199	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	6.728.619.135,98	0,00	0,00	0,00	6.728.619.135,98	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1200	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	161.736.000,00	0,00	0,00	0,00	161.736.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1201	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1202	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1203	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	639.903,00	0,00	0,00	0,00	639.903,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1204	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.210.770,82	0,00	0,00	0,00	34.210.770,82	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1205	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.690.776,00	0,00	0,00	0,00	3.690.776,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1206	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.210.816,00	0,00	0,00	0,00	16.210.816,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1207	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.196.000,00	0,00	0,00	0,00	6.196.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1208	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.916.172,00	0,00	0,00	0,00	4.916.172,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1209	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	331.617.000,00	0,00	0,00	0,00	331.617.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1210	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	43.629.216,00	0,00	0,00	43.629.216,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1211	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	7.535.280,00	0,00	0,00	7.535.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1212	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0,00	10.622.800,00	0,00	0,00	10.622.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1213	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.503.169,20	0,00	0,00	0,00	16.503.169,20	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1214	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.956.400,00	0,00	0,00	0,00	3.956.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1215	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1216	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1217	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	10.398.283,00	0,00	0,00	0,00	10.398.283,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur	65 %							
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	65 %							
1219	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	944.375.812,00	0,00	0,00	0,00	944.375.812,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN									
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri	39,02 %							
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100 %							
1220	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	101.954.730,00	0,00	0,00	0,00	101.954.730,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri	100 %							
1221	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	89.836.045,00	0,00	0,00	0,00	89.836.045,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 %							
1222	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	106.265.850,00	0,00	0,00	0,00	106.265.850,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	6 Dokumen							
1223	5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1224	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.994.120.606,00	0,00	0,00	0,00	2.994.120.606,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1225	5.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	112.440.000,00	0,00	0,00	0,00	112.440.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1226	5.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
1227	5.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	7.308.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1228	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	65.735.707,00	0,00	0,00	0,00	65.735.707,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1229	5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.015.164,00	0,00	0,00	0,00	5.015.164,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1230	5.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.866.517,00	0,00	0,00	0,00	10.866.517,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1231	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.147.720,00	0,00	0,00	0,00	50.147.720,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1232	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.378.000,00	0,00	0,00	0,00	18.378.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1233	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	319.862.744,00	0,00	0,00	0,00	319.862.744,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1234	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	32.292.080,00	0,00	0,00	32.292.080,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1235	5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	0,00	35.547.330,00	0,00	0,00	35.547.330,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1236	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	27.360.782,00	57.713.596,00	0,00	0,00	85.074.378,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1237	5.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	94.534.848,00	0,00	0,00	0,00	94.534.848,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1238	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	35.427.162,00	0,00	0,00	0,00	35.427.162,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1239	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.489.000,00	0,00	0,00	0,00	33.489.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1240	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1241	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	9.599.100,00	0,00	0,00	0,00	9.599.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1242	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		INSPEKTORAT DAERAH									
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan	83,87% (26 OPD) %/OPD							
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %							
1243	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	400.426.100,00	0,00	0,00	0,00	400.426.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1244	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	119.899.432,00	0,00	0,00	0,00	119.899.432,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1245	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	102.723.400,00	0,00	0,00	0,00	102.723.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1246	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	112.972.400,00	0,00	0,00	0,00	112.972.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1247	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan	476.260.000,00	0,00	0,00	0,00	476.260.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1248	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	354.000.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1249	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	283.500.152,13	0,00	0,00	0,00	283.500.152,13	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %							
1250	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	22.488.150,00	0,00	0,00	0,00	22.488.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1251	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	80,65% (25 OPD) %/OPD							
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %							
1252	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	83 Rekomendasi	20.856.351,00	0,00	0,00	0,00	20.856.351,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1253	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	60 Rekomendasi	144.227.482,00	0,00	0,00	0,00	144.227.482,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi	100 %							
1254	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	98 perangkat daerah	185.300.000,00	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1255	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99 perangkat daerah	126.492.000,00	0,00	0,00	0,00	126.492.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1256	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80 Kegiatan	657.933.042,87	15.176.567,13	0,00	0,00	673.109.610,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1257	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35 perangkat daerah	111.882.089,00	0,00	0,00	0,00	111.882.089,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83,33 (30 Dok) % (Dok)							
1258	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	53.513.160,00	0,00	0,00	0,00	53.513.160,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1259	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1260	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1261	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1262	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1263	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1264	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1265	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	9.775.438.831,77	0,00	0,00	0,00	9.775.438.831,77	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1266	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	73.860.000,00	0,00	0,00	0,00	73.860.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1267	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	42.883.100,00	0,00	0,00	0,00	42.883.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1268	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	37.428.000,00	0,00	0,00	0,00	37.428.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1269	6.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1270	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1271	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	56.567.200,00	0,00	0,00	0,00	56.567.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1272	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1273	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.950.437,00	0,00	0,00	0,00	2.950.437,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1274	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	89.187.578,00	0,00	0,00	0,00	89.187.578,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1275	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.598.419,00	0,00	0,00	0,00	4.598.419,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1276	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.061.776,00	0,00	0,00	0,00	5.061.776,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1277	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	37.376.740,00	0,00	0,00	0,00	37.376.740,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1278	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	35.240.000,00	0,00	0,00	0,00	35.240.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1279	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	484.299.984,00	0,00	0,00	0,00	484.299.984,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1280	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1281	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	0,00	172.163.024,00	0,00	0,00	172.163.024,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1282	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00	202.772.518,00	0,00	0,00	202.772.518,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1283	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	53.723.591,00	0,00	0,00	0,00	53.723.591,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1284	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1285	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1286	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1287	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	4.828.518,00	0,00	0,00	0,00	4.828.518,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1288	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1289	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	8.160.240,00	0,00	0,00	0,00	8.160.240,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1290	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	34.730.000,00	0,00	0,00	0,00	34.730.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1291	6.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1292	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	119.601.068,10	0,00	0,00	0,00	119.601.068,10	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1293	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		KECAMATAN SIANTAN									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %							
1294	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.402.715.389,00	0,00	0,00	0,00	1.402.715.389,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1295	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	55.614.088,00	0,00	0,00	0,00	55.614.088,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
1296	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	33.677.900,00	0,00	0,00	0,00	33.677.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1297	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	10.749.892,00	0,00	0,00	0,00	10.749.892,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1298	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	46.096.273,00	0,00	0,00	0,00	46.096.273,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1299	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	16.239.344,00	0,00	0,00	0,00	16.239.344,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1300	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.268.600,00	0,00	0,00	0,00	3.268.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1301	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.937.467.078,00	0,00	0,00	0,00	3.937.467.078,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1302	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	189.156.000,00	0,00	0,00	0,00	189.156.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1303	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.046.400,00	0,00	0,00	0,00	3.046.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %							
1304	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1305	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.570.131,00	0,00	0,00	0,00	1.570.131,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1306	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1307	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.721.000,00	0,00	0,00	0,00	3.721.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1308	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.678.000,00	0,00	0,00	0,00	10.678.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1309	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.938.600,00	0,00	0,00	0,00	4.938.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1310	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1311	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.551.399,00	0,00	0,00	0,00	10.551.399,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1312	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.217.400,00	0,00	0,00	0,00	18.217.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1313	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1314	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1315	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1316	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	85.160.000,00	0,00	0,00	0,00	85.160.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1317	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1318	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	6.673.001,00	0,00	0,00	6.673.001,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 undefined							
1319	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.065.420,00	0,00	0,00	0,00	33.065.420,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1320	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46.153.320,00	0,00	0,00	0,00	46.153.320,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1321	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1322	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00	13.560.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1323	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1324	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KELURAHAN TAREMPA									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %							
1325	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.482.500,00	0,00	0,00	0,00	10.482.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1326	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34.365.000,00	0,00	0,00	0,00	34.365.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1327	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.985.640.444,00	0,00	0,00	0,00	1.985.640.444,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1328	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.481.273,00	0,00	0,00	0,00	3.481.273,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1329	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.845.458,00	0,00	0,00	0,00	19.845.458,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1330	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.922.175,00	0,00	0,00	0,00	16.922.175,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1331	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1332	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.220.000,00	0,00	0,00	0,00	33.220.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1333	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1334	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	19.987.152,00	0,00	0,00	19.987.152,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1335	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.850.858,00	0,00	0,00	0,00	47.850.858,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1336	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.574.936,00	0,00	0,00	0,00	17.574.936,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1337	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1338	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN JEMAJA									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 Kegiatan							
1339	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja)	80 Persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen							
1340	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	595.215.360,00	0,00	0,00	0,00	595.215.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen							
1341	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	38.643.412,00	0,00	0,00	0,00	38.643.412,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 Persen							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen							
1342	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen							
1343	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	60.562.400,00	0,00	0,00	0,00	60.562.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1344	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen							
1345	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1346	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	12.270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.270.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1347	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 Persen							
1348	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1349	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1350	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1351	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1352	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1353	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	293.500,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1354	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.543.500,00	0,00	0,00	0,00	1.543.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1355	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.731.887.865,00	0,00	0,00	0,00	4.731.887.865,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1356	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	178.440.000,00	0,00	0,00	0,00	178.440.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1357	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1358	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	2.842.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen							
1359	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.480.000,00	0,00	0,00	0,00	10.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							
1360	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1361	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	37.104.000,00	0,00	0,00	0,00	37.104.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1362	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.890,00	0,00	0,00	0,00	5.000.890,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1363	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	10.709.895,00	0,00	0,00	10.709.895,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1364	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.023.773,00	0,00	0,00	0,00	8.023.773,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1365	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	35.502.840,00	0,00	0,00	0,00	35.502.840,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1366	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.503.124,00	0,00	0,00	0,00	12.503.124,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1367	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1368	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.504.000,00	0,00	0,00	0,00	175.504.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
1369	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	35.990.306,00	0,00	0,00	35.990.306,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1370	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	47.892.763,00	0,00	0,00	0,00	47.892.763,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1371	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.742.388,00	0,00	0,00	0,00	11.742.388,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1372	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1373	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4.890.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1374	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	10.960.000,00	0,00	0,00	0,00	10.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KELURAHAN LETUNG									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100 Persen							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan	100 Persen							
1375	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.184.700,00	0,00	0,00	0,00	5.184.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1376	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1377	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	527.450.000,00	0,00	0,00	0,00	527.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1378	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.898.000,00	0,00	0,00	0,00	4.898.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1379	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1380	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.020.000,00	0,00	0,00	0,00	14.020.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1381	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1382	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1383	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1384	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1385	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.998.928,00	0,00	0,00	0,00	6.998.928,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1386	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1387	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
1388	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.820.800,00	0,00	0,00	0,00	9.820.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja, Letung	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN PALMATAK									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %							
1389	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan Palmatak	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Desa							
1390	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	655.776.154,00	0,00	0,00	0,00	655.776.154,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1391	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	195.125.504,00	0,00	0,00	0,00	195.125.504,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1392	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan/Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang ditargetkan 100%	7 Desa							
1393	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	26.802.000,00	0,00	0,00	0,00	26.802.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1394	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	28.724.000,00	0,00	0,00	0,00	28.724.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1395	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	4.356.752.672,00	0,00	0,00	0,00	4.356.752.672,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1396	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	102.720.000,00	0,00	0,00	0,00	102.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %							
1397	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26.760.000,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1398	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1399	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1400	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.514.285,00	0,00	0,00	0,00	6.514.285,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1401	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.955.724,00	0,00	0,00	0,00	18.955.724,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1402	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.306.330,00	0,00	0,00	0,00	3.306.330,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1403	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.450.000,00	0,00	0,00	0,00	66.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1404	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	101.852.000,00	0,00	0,00	0,00	101.852.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1405	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0,00	78.143.234,00	0,00	0,00	78.143.234,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1406	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	84.762.882,00	0,00	0,00	0,00	84.762.882,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1407	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.434.000,00	0,00	0,00	0,00	43.434.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1408	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1409	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN SIANTAN TIMUR									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Tiap Kecamatan (Kecamatan Siantan Timur)	20 Persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90,00 %							
1410	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	581.279.376,01	0,00	0,00	0,00	581.279.376,01	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1411	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	181.333.828,00	0,00	0,00	0,00	181.333.828,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1412	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	24.704.120,00	0,00	0,00	0,00	24.704.120,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1413	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	87.370.000,00	0,00	0,00	0,00	87.370.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1414	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1415	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1416	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	2.212.936.481,00	0,00	0,00	0,00	2.212.936.481,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1417	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1418	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1419	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.424.000,00	0,00	0,00	0,00	17.424.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1420	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.042.474,00	0,00	0,00	0,00	8.042.474,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1421	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.891.400,00	124.247.419,00	0,00	0,00	131.138.819,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1422	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.909.992,00	0,00	0,00	0,00	54.909.992,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1423	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	33.950.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1424	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.977.000,00	0,00	0,00	0,00	100.977.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1425	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.587.995,99	0,00	0,00	0,00	50.587.995,99	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1426	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.273.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1427	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Timur, Semua Kel/Desa	[object Object]
		KECAMATAN SIANTAN SELATAN									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des	100 %							
1428	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %							
1429	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	286.655.896,00	0,00	0,00	0,00	286.655.896,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1430	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	160.880.256,00	0,00	0,00	0,00	160.880.256,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1431	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	19.350.000,00	0,00	0,00	0,00	19.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
1432	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	15.722.280,00	0,00	0,00	0,00	15.722.280,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1433	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	90.816.840,00	0,00	0,00	0,00	90.816.840,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1434	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1435	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1436	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN	100 %							
1437	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.832.484.073,00	0,00	0,00	0,00	1.832.484.073,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1438	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1439	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1440	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1441	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1442	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	25.439.140,00	0,00	0,00	0,00	25.439.140,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1443	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	100 %							
1444	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	11.990.260,00	0,00	0,00	0,00	11.990.260,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1445	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.244.373,00	0,00	0,00	0,00	57.244.373,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1446	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	11.956.743,00	0,00	0,00	0,00	11.956.743,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1447	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	11.799.547,00	0,00	0,00	0,00	11.799.547,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1448	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.111.400,00	0,00	0,00	0,00	2.111.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1449	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1450	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	128.760.000,00	0,00	0,00	0,00	128.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1451	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	68.572.016,00	0,00	0,00	68.572.016,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1452	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	45.433.814,00	0,00	0,00	45.433.814,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1453	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.518.800,00	0,00	0,00	0,00	17.518.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1454	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1455	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	84.938.635,00	0,00	0,00	0,00	84.938.635,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1456	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.390.000,00	0,00	0,00	0,00	10.390.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1457	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.120.000,00	0,00	0,00	0,00	29.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN JEMAJA TIMUR									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Jemaja Timur)	33,3 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 Kegiatan							
1458	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Jemaja Timur) Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Persen 80 %							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedia nya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	80 %							
1459	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	226.877.837,32	0,00	0,00	0,00	226.877.837,32	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TERLAKSANA NYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80 %							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TERLAKSANA NYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80 %							
1460	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TERSEDIANYA JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	90 %							
1461	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	142.147.550,00	0,00	0,00	0,00	142.147.550,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	TERLAKASANANYA FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TERSEDIANYA DOKUMEN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90 %							
1462	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	9.515.400,00	0,00	0,00	0,00	9.515.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1463	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSEDIANYA DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERSEDIANYA JUMLAH DOKUMEN DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90 %							
1464	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.832.605,00	0,00	0,00	0,00	4.832.605,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1465	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.761.090,00	0,00	0,00	0,00	3.761.090,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1466	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.854.718,00	0,00	0,00	0,00	3.854.718,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1467	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.412.632,00	0,00	0,00	0,00	3.412.632,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1468	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.854.520,00	0,00	0,00	0,00	3.854.520,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1469	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.839.590,00	0,00	0,00	0,00	3.839.590,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR	90 %							
1470	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	2.579.067.434,00	0,00	0,00	0,00	2.579.067.434,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1471	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	103.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1472	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.527.023,00	0,00	0,00	0,00	2.527.023,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1473	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.780.096,00	0,00	0,00	0,00	2.780.096,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERSEDIANYA JUMLAH LAPORAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	90 %							
1474	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.105.100,00	0,00	0,00	0,00	10.105.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIANYA PAKAIAAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANYA PEGAWAI KANTOR KECAAMATAN JEMAJA TIMUR	90 %							
1475	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	89.228.115,90	0,00	0,00	0,00	89.228.115,90	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERSEDIANYA JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DI SEDIAKAN	90 %							
1476	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	35.376.163,60	127.481.486,18	0,00	0,00	162.857.649,78	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1477	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	16.576.060,00	0,00	0,00	0,00	16.576.060,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1478	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	26.047.005,00	0,00	0,00	0,00	26.047.005,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1479	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9.715.500,00	0,00	0,00	0,00	9.715.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1480	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1481	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	134.902.000,00	0,00	0,00	0,00	134.902.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KANTOR	90 %							
1482	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.072.000,00	0,00	0,00	0,00	12.072.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1483	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIANYA JUMLAH KENDARAAN DINAS DAN PEMELIHARAAN PERALATAN MESIN LAINNYA	90 %							
1484	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4.890.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1485	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.533.380,00	0,00	0,00	0,00	1.533.380,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN SIANTAN TENGAH									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Siantan Tengah)	80 Persen							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	75 %							
1486	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	21.050.000,00	0,00	0,00	0,00	21.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Siantan Tengah)	80 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	undefined	undefined undefined							
1487	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	235.225.000,00	0,00	0,00	0,00	235.225.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1488	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	5 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80 %							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 %							
1489	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	12.252.000,00	0,00	0,00	0,00	12.252.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Siantan Tengah)	80 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
1490	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24 Orang	113.913.282,00	0,00	0,00	0,00	113.913.282,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1491	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Tengah)	80 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
1492	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	14.026.950,00	0,00	0,00	0,00	14.026.950,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1493	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	50.362.000,00	0,00	0,00	0,00	50.362.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	80 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen							
1494	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	6.690.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1495	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1496	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1497	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.624.600,00	0,00	0,00	0,00	8.624.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1498	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	3.649.600,00	0,00	0,00	0,00	3.649.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1499	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1500	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.704.547.573,00	0,00	0,00	0,00	2.704.547.573,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1501	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	109.656.000,00	0,00	0,00	0,00	109.656.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1502	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
1503	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1504	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	61.472.190,00	0,00	0,00	0,00	61.472.190,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1505	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	[object Object]
1506	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PersentaseAdministrasi Umum Perangkat Daerah	80 %							
1507	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.046.968,00	0,00	0,00	0,00	7.046.968,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1508	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	54.155.900,00	0,00	0,00	0,00	54.155.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1509	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.781.768,00	2.994.860,00	0,00	0,00	8.776.628,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1510	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.118.430,00	0,00	0,00	0,00	10.118.430,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1511	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.400.100,00	0,00	0,00	0,00	7.400.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1512	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1513	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	89.920.000,00	0,00	0,00	0,00	89.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %							
1514	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	39.395.923,00	20.550.426,00	0,00	0,00	59.946.349,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1515	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19.212.830,00	0,00	0,00	0,00	19.212.830,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1516	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.452.200,00	0,00	0,00	0,00	26.452.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1517	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1518	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1519	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Air Asuk	Dana Alokasi Umum (DAU)
1520	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.480.000,00	0,00	0,00	0,00	25.480.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN SIANTAN UTARA									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Siantan Utara)	100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1521	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1522	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	387.473.275,88	0,00	0,00	0,00	387.473.275,88	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1523	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	92.878.777,00	0,00	0,00	0,00	92.878.777,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1524	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1525	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1526	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1527	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1528	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1529	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	2.029.543.898,00	0,00	0,00	0,00	2.029.543.898,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1530	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	73.680.000,00	0,00	0,00	0,00	73.680.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1531	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	10.788.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1532	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.242.888,12	0,00	0,00	0,00	7.242.888,12	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1533	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.536.275,00	0,00	0,00	0,00	57.536.275,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1534	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.517.500,00	0,00	0,00	0,00	13.517.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1535	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	417.862.000,00	0,00	0,00	0,00	417.862.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1537	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.224.495,00	0,00	0,00	0,00	50.224.495,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1538	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	18.193.500,00	0,00	0,00	0,00	18.193.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1539	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1540	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1541	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1542	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.436.600,00	0,00	0,00	0,00	5.436.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN JEMAJA BARAT									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja Barat)	91 Persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah agenda Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	3 Desa 3 Dokumen							
1543	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	237.817.751,00	0,00	0,00	0,00	237.817.751,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja Barat)	80 Persen							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti	12 Rakor 10 orang							
1544	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	103.455.000,00	0,00	0,00	0,00	103.455.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1545	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	11.175.000,00	0,00	0,00	0,00	11.175.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja Barat)	80 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan fasilitasu Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah drsa	3 Desa 3 Laporan							
1546	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	6.622.000,00	0,00	0,00	0,00	6.622.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1547	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	28.741.180,00	0,00	0,00	0,00	28.741.180,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan pemerintahan	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen							
1548	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1549	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1550	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.090.414,00	0,00	0,00	0,00	5.090.414,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1551	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.113.000,00	0,00	0,00	0,00	5.113.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1552	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1553	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1554	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.945.000,00	0,00	0,00	0,00	6.945.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %							
1555	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.196.521.862,00	0,00	0,00	0,00	2.196.521.862,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1556	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.400.000,00	0,00	0,00	0,00	95.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1557	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1558	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1559	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1560	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1561	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	49.076.700,00	0,00	0,00	0,00	49.076.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1562	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1563	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	28.461.538,00	0,00	0,00	0,00	28.461.538,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1564	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.468.480,00	0,00	0,00	0,00	40.468.480,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1565	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.274.410,00	0,00	0,00	0,00	5.274.410,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1566	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1567	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.436.000,00	0,00	0,00	0,00	220.436.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1568	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	34.229.476,00	0,00	0,00	34.229.476,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1569	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	51.991.747,00	0,00	0,00	51.991.747,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1570	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	24.371.088,00	0,00	0,00	0,00	24.371.088,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1571	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	[object Object]
1572	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1573	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	[object Object]
1574	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.058.864,00	0,00	0,00	0,00	10.058.864,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1575	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.556.352,00	0,00	0,00	0,00	16.556.352,00	Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		KECAMATAN KUTE SIANTAN									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-							
1576	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	17.090.000,00	0,00	0,00	0,00	17.090.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1577	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	175.313.096,00	0,00	0,00	0,00	175.313.096,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1578	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	65.322.000,00	0,00	0,00	0,00	65.322.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1579	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	21 Orang	84.760.000,00	0,00	0,00	0,00	84.760.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1580	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	31.768.000,00	0,00	0,00	0,00	31.768.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1581	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	12.611.600,00	0,00	0,00	0,00	12.611.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1582	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	53.827.800,00	0,00	0,00	0,00	53.827.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1583	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.370.000,00	0,00	0,00	0,00	15.370.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1584	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.386.000,00	0,00	0,00	0,00	12.386.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1585	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	11.258.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1586	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.930.000,00	0,00	0,00	0,00	10.930.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1587	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	8.155.000,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1588	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1589	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.090.104.797,09	0,00	0,00	0,00	3.090.104.797,09	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1590	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	110.409.600,00	0,00	0,00	0,00	110.409.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1591	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	15.384.682,00	0,00	0,00	0,00	15.384.682,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1592	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.440.244,00	0,00	0,00	0,00	3.440.244,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1593	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1594	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	25.766.000,00	0,00	0,00	0,00	25.766.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1595	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	13.520.000,00	0,00	0,00	0,00	13.520.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1596	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	49.993.878,00	0,00	0,00	0,00	49.993.878,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1597	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	9.480.206,00	0,00	0,00	0,00	9.480.206,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1598	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.934.800,00	0,00	0,00	0,00	20.934.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1599	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.467.650,00	0,00	0,00	0,00	13.467.650,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1600	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.567.440,00	0,00	0,00	0,00	21.567.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1601	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	128.592.000,00	0,00	0,00	0,00	128.592.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1602	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.868.995,00	110.089.445,00	0,00	0,00	121.958.440,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1603	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	169.432.487,91	0,00	0,00	0,00	169.432.487,91	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1604	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.210.000,00	0,00	0,00	0,00	20.210.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1605	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1606	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	5.400.015,00	0,00	0,00	0,00	5.400.015,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1607	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	185.963.655.562,78	831.504.491,00	0,00	0,00	186.795.160.053,78
1	01	1	02	Kesehatan	118.956.803.627,07	1.421.323.533,88	0,00	0,00	120.378.127.160,95
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.021.332.826,51	30.685.551,51	0,00	0,00	17.052.018.378,02
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32.415.495.272,08	241.347.516,92	0,00	0,00	32.656.842.789,00
1	01	1	06	Sosial	5.722.663.901,99	243.615.506,00	0,00	0,00	5.966.279.407,99
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	522.265.477,00	410.000.000,00	0,00	0,00	932.265.477,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.479.359.194,59	331.735.633,41	0,00	0,00	10.811.094.828,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.421.113.326,00	249.268.797,00	0,00	0,00	5.670.382.123,00
1	01	2	15	Perhubungan	14.544.657.847,62	49.602.745,38	0,00	0,00	14.594.260.593,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	6.440.018.373,00	78.144.135,24	0,00	0,00	6.518.162.508,24
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.216.769.399,67	70.452.082,00	0,00	0,00	9.287.221.481,67
1	01	2	18	Penanaman Modal	4.930.542.864,00	0,00	0,00	0,00	4.930.542.864,00
1	01	2	20	Statistik	188.132.000,00	0,00	0,00	0,00	188.132.000,00
1	01	2	23	Perpustakaan	3.469.924.065,00	53.842.763,00	0,00	0,00	3.523.766.828,00
1	01	2	24	Kearsipan	161.627.161,00	0,00	0,00	0,00	161.627.161,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	14.502.352.046,00	129.680.409,00	0,00	0,00	14.632.032.455,00
1	01	3	26	Pariwisata	5.964.122.094,00	20.664.632,00	0,00	0,00	5.984.786.726,00
1	01	3	30	Perdagangan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	49.190.302.898,00	948.041.197,00	0,00	0,00	50.138.344.095,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	35.576.608.726,00	397.924.471,00	0,00	0,00	35.974.533.197,00
1	01	5	01	Perencanaan	14.194.515.740,25	534.697.149,00	0,00	0,00	14.729.212.889,25
1	01	5	02	Keuangan	30.749.182.161,99	399.887.864,00	8.981.012.988,52	105.213.314.659,00	145.343.397.673,51
1	01	5	03	Kepegawaian	8.658.219.898,00	61.787.296,00	0,00	0,00	8.720.007.194,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	944.375.812,00	0,00	0,00	0,00	944.375.812,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.809.114.613,00	0,00	0,00	0,00	1.809.114.613,00
1	01	5	06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	4.137.181.975,00	125.553.006,00	0,00	0,00	4.262.734.981,00
1	01	6	01	Inspektorat	14.946.889.241,87	390.112.109,13	0,00	0,00	15.337.001.351,00
1	01	7	01	Kecamatan	45.519.037.854,82	737.094.277,18	0,00	0,00	46.256.132.132,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.379.933.849,84	162.302.336,16	0,00	0,00	7.542.236.186,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.044.215.228,00	732.012.291,00	0,00	0,00	1.776.227.519,00
2	03	1	06	Sosial	49.754.542,00	0,00	0,00	0,00	49.754.542,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.895.766.711,03	55.364.724.120,00	0,00	0,00	67.260.490.831,03
3	04	2	07	Tenaga Kerja	1.411.100.420,37	0,00	0,00	0,00	1.411.100.420,37
3	04	2	09	Pangan	208.393.531,00	0,00	0,00	0,00	208.393.531,00
3	04	2	15	Perhubungan	4.607.946.961,39	9.755.080.508,01	0,00	0,00	14.363.027.469,40
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	7.861.635.408,85	253.572.367,14	0,00	0,00	8.115.207.775,99
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	842.783.443,00	0,00	0,00	0,00	842.783.443,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	829.537.557,00	0,00	0,00	0,00	829.537.557,00
3	04	2	21	Persandian	196.431.896,00	0,00	0,00	0,00	196.431.896,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	6.823.401.101,50	1.733.098,50	0,00	0,00	6.825.134.200,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	3	27	Pertanian	1.253.927.430,00	3.431.484,00	0,00	0,00	1.257.358.914,00
3	04	3	30	Perdagangan	558.498.845,00	0,00	0,00	0,00	558.498.845,00
3	04	3	31	Perindustrian	528.775.592,77	0,00	0,00	0,00	528.775.592,77
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	672.677.413,50	50.000.000,00	0,00	0,00	722.677.413,50
4	05	2	10	Pertanahan	237.974.350,00	373.895.640,00	0,00	0,00	611.869.990,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	810.163.872,03	192.574.661,62	0,00	0,00	1.002.738.533,65
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.564.399.432,70	27.660.567,30	0,00	0,00	1.592.060.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.362.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	37.720.817.840,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	38.617.342.755,35	20.389.202.823,60	0,00	0,00	59.006.545.578,95
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.884.142.000,00	0,00	0,00	0,00	2.884.142.000,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	1.019.898.044,00	13.934.032,00	0,00	0,00	1.033.832.076,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	33.263.673.919,41	14.780.211.300,74	0,00	0,00	48.043.885.220,15
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	9.408.330.956,77	0,00	0,00	0,00	9.408.330.956,77
8	10	2	22	Kebudayaan	865.716.680,00	0,00	0,00	0,00	865.716.680,00
8	10	2	23	Perpustakaan	1.104.560.081,00	0,00	0,00	0,00	1.104.560.081,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	469.933.108,01	0,00	0,00	0,00	469.933.108,01
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.025.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.690.000,00
				TOTAL	**784.449.005.089,76**	**142.215.982.235,72**	**8.981.012.988,52**	**105.213.314.659,00**	**1.040.859.314.973,00**

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.131.359.210,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.958.800.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	314.480.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	267.876.780,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	499.778.336,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.982.339.900,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.340.446.968,42
		Total	9.495.081.194,42
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	247.905.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.429.923,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	7.310.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	7.310.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	499.300.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	379.218.703,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	6.498.500,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	171.085.900,00
		Total	1.525.058.026,00
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	182.352.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.300.084,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00
		Total	185.652.084,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
4.	Kekhususan PAUD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	98.904.560,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	369.385.720,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	27.316.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00
		Total	495.606.280,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	11.701.397.584,42
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	712.962.000,00
		Total	712.962.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	192.600.000,00
		Total	192.600.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	260.010.000,00
		Total	260.010.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000,00
		Total	100.000.000,00
5.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	85.170.000,00
		Total	85.170.000,00
6.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	116.430.000,00
		Total	116.430.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	1.467.172.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	854.361.000,00
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	237.699.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00
		Total	1.492.060.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	342.228.000,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,00
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00
		Total	342.228.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.834.288.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	25.000.000,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	0,00
		Total	25.000.000,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0,00
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	0,00
		Total	50.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	75.000.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	105.186.096,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00
		Total	105.186.096,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	186.685.230,00
		Total	186.685.230,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4.400.100,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	87.514.500,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4.988.600,00
		Total	96.903.200,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.800.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.600.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000,00
		Total	86.400.000,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.393.820,00
		Total	26.393.820,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	501.568.346,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	180.245.458,00
		Total	180.245.458,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	180.245.458,00

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	186.795.160.053,78
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	107.871.251.078,00	46.632.867.720,15
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	1.040.307.000,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	17.234.769.573,00	200.000.000,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	919.187.711,00	170.710.500,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	120.378.127.160,95
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145.993.582.460,00	58.372.441.378,95
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.602.740.309,00	549.901.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	79.780.650.606,00	0,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	560.856.026,00	84.203.200,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	17.052.018.378,02
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	50.810.461.864,00	5.396.730.565,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.574.871.985,00	1.492.060.000,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.574.871.985,00	237.778.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.787.435.992,00	342.228.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.747.203.886,00	1.449.631.955,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	9.574.871.985,00	100.000.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.149.743.970,00	15.260.769.613,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.404.820.779,00	649.141.298,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.276.340.850,00	44.344.217.400,03
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	325.545.647,00	160.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	957.487.198,00	142.671.413,50
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	574.492.319,00	75.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.149.743.970,00	150.000.000,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	574.492.319,00	0,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.914.974.397,00	37.495.817.840,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	32.656.842.789,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.504.784.662,00	300.196.339,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.669.052.275,00	695.607.389,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.936.420.631,00	780.423.791,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	5.966.279.407,99
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	900.037.967,00	0,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.311.757.462,00	180.245.458,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.641.867.642,00	289.687.650,01
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	976.636.942,00	49.754.542,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	382.994.879,00	0,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.045.448.893,00	66.070.000,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	965.438.172,00	6.730.000,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.783.671.727,00	1.338.300.420,37
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	0,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.000.000,00	50.000.000,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	399.259.500,00	333.640.000,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000,00	0,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	486.000.000,00	370.000.000,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	415.250.500,00	272.050.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	270.000.000,00	80.265.700,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	60.000.000,00	113.567.931,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	130.000.000,00	14.559.900,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000,00	0,00
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100.000.000,00	500.051.990,00
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	100.000.000,00	0,00
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100.000.000,00	0,00
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	111.818.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	932.265.477,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	431.283.000,00	46.412.000,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	293.757.000,00	57.151.490,70
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100.000.000,00	0,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	566.921.000,00	60.975.080,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	227.096.000,00	180.620.025,15
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	0,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	0,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	725.000.001,00	338.588.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	9.958.899.478,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	838.816.869,00	458.103.950,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	623.806.000,00	150.000.000,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	806.536.000,00	175.105.000,00
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.538.000,00	68.986.400,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	3.509.106.205,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	880.000.000,00	363.168.733,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.810.000.000,00	1.255.534.400,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.118.944.000,00	542.572.785,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	405.168.750,00	192.000.000,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	462.864.780,00	2.179.342.000,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	298.921.928,00	512.800.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	14.594.260.593,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.812.072.343,00	260.000.000,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	28.483.537.603,00	14.422.019.407,20
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	6.518.162.508,24
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	4.044.836.938,64
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	4.070.370.837,35
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	9.287.221.481,67
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	38.299.488,00	0,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	229.796.928,00	0,00
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	184.427.596,00	39.307.500,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	95.748.720,00	49.781.000,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	382.994.879,00	226.061.968,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.120.149.802,00	527.632.975,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	4.930.542.864,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	680.000.000,00	168.381.500,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	398.000.000,00	204.762.057,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.040.823.000,00	422.454.000,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	385.838.000,00	33.940.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	175.000.000,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.135.594.500,00	815.845.329,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.800.000.000,00	8.007.102.517,77
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.200.000.000,00	585.383.110,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.200.000.000,00	188.132.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	375.000.000,00	196.431.896,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000,00	512.450.000,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.000.000.000,00	253.266.680,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	460.000.000,00	0,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.170.000.000,00	100.000.000,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	450.000.000,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	3.523.766.828,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.577.287.694,00	1.104.560.081,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	151.311.080,00	161.627.161,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	14.632.032.455,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12.351.584.861,00	5.022.734.200,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.619.301.610,00	1.570.000.000,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	708.540.527,00	232.400.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	5.984.786.726,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7.085.405.269,00	396.257.254,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	18.766.749.090,00	637.574.822,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	765.989.759,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.953.273.885,00	551.358.914,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.914.974.397,00	435.000.000,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.340.482.078,00	230.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	861.738.479,00	26.000.000,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.321.332.334,00	15.000.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	4.000.000,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	143.076.766,00	16.326.860,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.572.296.009,00	359.731.418,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	494.963.000,00	87.077.500,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.000.000,00	0,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	195.000.000,00	95.363.067,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.000.000.000,00	466.648.092,77
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	56.275.441,00	62.127.500,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.330.000.000,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	37.879.202.301,07
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	35.917.355.187,00	9.659.091.118,93
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.916.375.116,00	2.600.050.675,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	20.375.898.010,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.207.622.850,00	15.598.635.187,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	11.540.982.054,12
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.002.718.855,70	2.371.867.200,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.595.268.719,00	816.363.635,13
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	23.845.144.851,99
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	105.035.576.741,00	119.099.484.722,52
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.645.000.000,00	1.814.301.440,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.685.928.250,00	584.466.659,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	7.393.121.722,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.982.220.336,00	1.326.885.472,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.685.740.110,00	944.375.812,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	900.000.000,00	1.809.114.613,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN		
5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	3.964.678.356,00
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	775.608.750,00	298.056.625,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	11.852.864.184,87
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.400.000.000,00	2.222.269.634,13
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.280.000.000,00	1.261.867.532,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	36.324.649.020,79
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	994.435.800,00	123.050.000,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.128.194.489,00	7.808.205.191,21
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	525.342.400,00	116.424.000,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.264.223.500,00	1.254.213.685,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	561.811.961,00	629.590.235,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.342.303.452,00	5.007.677.758,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.730.000.000,00	1.403.983.449,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	857.127.718,00	442.071.589,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	260.000.000,00	0,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	980.000.000,00	259.891.870,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.515.000.000,00	428.611.520,00

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	271.432.177.396,00	227.670.972.590,50	244.247.376.230,70
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	255.237.477.517,00	219.680.664.927,93	234.839.045.273,93
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	255.237.477.517,00	219.680.664.927,93	234.839.045.273,93
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49.616.956.305,00	28.471.091.215,15	46.632.867.720,15
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.672.609.505,00	13.544.322.662,76	23.582.381.891,56
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.400.000.000,00	585.878.326,20	595.778.326,20
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.180.589.605,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.800.000.000,00	3.240.297.732,17	3.190.319.748,97
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.000.000.000,00	556.156.835,40	556.156.835,40
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.500.000.000,00	282.758.470,10	282.758.470,10
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	800.000.000,00	543.374.410,25	518.574.410,25
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.800.000.000,00	734.514.928,22	734.514.928,22
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.350.000.000,00	1.838.851.228,00	2.067.979.228,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350.000.000,00	0,00	199.774.705,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	250.000.000,00	248.399.900,00	171.085.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	690.000.000,00	688.430.703,00	379.218.703,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000.000,00	0,00	3.300.084,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.000.000,00	10.000.000,00	7.591.807.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	350.000.000,00	0,00	7.310.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	350.000.000,00	0,00	6.498.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	350.000.000,00	0,00	7.310.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	350.000.000,00	267.876.780,00	267.876.780,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	450.000.000,00	243.566.145,00	243.566.145,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00	0,00	6.429.923,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	400.000.000,00	182.352.000,00	182.352.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.020.000.000,00	499.778.336,00	499.778.336,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	325.000.000,00	0,00	247.905.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	950.000.000,00	1.140.446.968,42	1.340.446.968,42
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	747.019.900,00	1.982.339.900,00	3.982.339.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	500.000.000,00	499.300.000,00	499.300.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.700.746.800,00	9.248.718.579,19	14.518.080.716,19
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	770.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	600.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.400.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	2.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	450.000.000,00	324.927.558,12	324.927.558,12
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.400.000.000,00	1.680.422.140,64	1.892.222.140,64
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	750.000.000,00	72.400.000,00	72.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.500.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000,00	751.944.970,10	972.596.172,10
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000,00	1.393.170.588,00	1.642.970.588,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	129.746.800,00	1.890.800.800,00	1.890.800.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299.000.000,00	0,00	199.211.935,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.000.000,00	197.354.910,00	197.354.910,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	580.000.000,00	576.202.081,00	374.621.081,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.000.000,00	10.000.000,00	4.599.480.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	250.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	250.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	250.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	287.000.000,00	285.583.311,00	285.583.311,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	275.000.000,00	226.042.290,00	226.042.290,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	250.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	350.000.000,00	208.698.000,00	208.698.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	700.000.000,00	229.626.960,00	229.626.960,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000,00	332.944.970,33	332.944.970,33
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	400.000.000,00	398.600.000,00	398.600.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.159.500.000,00	5.617.549.973,20	8.157.925.112,40
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.500.000.000,00	1.603.156.534,00	1.654.802.260,20
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	800.000.000,00	485.700.298,00	484.101.808,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	500.000.000,00	484.324.041,20	943.435.085,20
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	500.000,00	500.000,00	1.958.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	100.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000,00	0,00	27.316.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000,00	80.000.000,00	98.904.560,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.131.409.480,00	1.131.359.210,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	400.000.000,00	369.385.720,00	369.385.720,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	500.000.000,00	543.073.900,00	569.820.469,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.100.000,00	60.500.000,00	374.480.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	500.000,00	500.000,00	314.480.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	83.600.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.100.000.000,00	1.040.307.000,00	1.040.307.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.100.000.000,00	1.040.307.000,00	1.040.307.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	450.000.000,00	394.633.000,00	394.633.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	400.000.000,00	395.674.000,00	395.674.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	350.000.000,00	170.710.500,00	170.710.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	250.000.000,00	170.710.500,00	170.710.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200.000.000,00	124.950.000,00	124.950.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	45.760.500,00	45.760.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	203.970.521.212,00	189.798.556.212,78	186.795.160.053,78
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	61.271.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	61.271.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.726.987.575,00	182.976.369.459,00	182.976.369.459,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	151.126.987.575,00	181.376.369.459,00	181.376.369.459,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.319.829.300,00	704.836.700,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.169.829.300,00	554.836.700,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.250.674.979,00	4.416.391.247,00	2.098.950.788,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	909.382.500,00	2.435.439.849,00	1.002.538.462,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	630.769.072,00	630.769.072,00	111.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	710.523.407,00	534.882.326,00	324.882.326,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	600.000.000,00	444.430.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.500.000.000,00	627.129.848,78	584.739.848,78
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	235.925.063,00	348.054.911,78	305.664.911,78
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.774.937,00	188.774.937,00	188.774.937,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.300.000,00	90.300.000,00	90.300.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.985.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.923.029.358,00	823.828.958,00	823.828.958,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	316.027.602,00	316.027.602,00	316.027.602,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.061.756,00	164.061.756,00	164.061.756,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.292.940.000,00	193.739.600,00	193.739.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.194.699.879,00	7.990.307.662,57	9.408.330.956,77
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.194.699.879,00	7.990.307.662,57	9.408.330.956,77
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.200.000.000,00	815.845.329,00	815.845.329,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	622.212.409,00	622.212.409,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	150.000.000,00	143.571.675,00	143.571.675,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	150.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	250.000.000,00	241.197.629,00	241.197.629,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	250.000.000,00	237.443.105,00	237.443.105,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	193.632.920,00	193.632.920,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	200.000.000,00	193.632.920,00	193.632.920,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.444.699.879,00	6.589.079.223,57	8.007.102.517,77
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	207.060.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	207.060.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	442.903.000,00	442.903.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200.000.000,00	192.903.000,00	192.903.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	343.527.830,00	343.528.903,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	150.000.000,00	125.357.500,00	125.357.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	250.000.000,00	218.170.330,00	218.171.403,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	300.000.000,00	293.385.070,00	293.385.070,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	300.000.000,00	293.385.070,00	293.385.070,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	12.087.639.879,00	5.509.263.323,57	6.927.285.544,77
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	12.087.639.879,00	5.509.263.323,57	6.927.285.544,77
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.550.000.000,00	585.383.110,00	585.383.110,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.550.000.000,00	585.383.110,00	585.383.110,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	150.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	250.000.000,00	235.383.110,00	235.383.110,00
1.02.2.14.0.00.01.0000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	166.005.373.357,00	136.979.040.401,80	162.735.569.127,46
1.02.2.14.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	165.528.341.357,00	136.437.440.401,80	159.851.427.127,46
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	165.528.341.357,00	136.437.440.401,80	159.851.427.127,46
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.551.840.534,00	22.478.859.525,61	52.719.687.578,95
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.346.600.111,00	12.646.375.525,61	41.560.889.821,60
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	29.364.804.102,00	900.000.000,00	19.031.432.510,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.650.000.000,00	100.000,00	3.529.765.759,60
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	3.306.387.483,00	500.000.000,00	669.614.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	889.957.302,00	418.498.865,61	600.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13.977.796.394,00	10.827.676.660,00	14.032.254.552,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	0,00	0,00	3.599.337.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	157.654.830,00	100.000,00	98.486.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.205.240.423,00	9.832.484.000,00	11.149.529.649,35
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	141.459.054,00	100.000,00	192.600.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	147.810.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	247.043.650,00	100.000,00	200.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	48.171.200,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000,00	100.000,00	310.013.500,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.000.000,00	100.000,00	137.042.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.485.000,00	100.000,00	79.140.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	471.478.202,00	81.684.000,00	379.774.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.836.638.517,00	9.650.000.000,00	9.133.131.125,22
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	57.950.000,00	100.000,00	27.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	177.376.000,00	100.000,00	67.268.074,13
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000,00	0,00	162.417.750,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	68.665.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	10.000.000,00	100.000,00	243.607.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	9.268.108,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	9.268.108,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	285.560.000,00	100.000,00	549.901.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.560.000,00	100.000,00	549.901.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.560.000,00	100.000,00	549.901.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.690.940.823,00	113.958.480.876,19	106.581.838.548,51
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.762.000,00	53.940.213,93	53.940.213,93
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.762.000,00	53.940.213,93	53.940.213,93
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.156.028.761,00	103.186.281.796,86	96.353.633.035,30
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.901.858.761,00	101.877.981.796,86	95.045.333.035,30

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.254.170.000,00	1.308.300.000,00	1.308.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.643.941.429,00	739.975.535,15	728.765.719,03
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.545.700,00	10.545.700,00	10.545.700,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.157.556,00	165.407.329,15	165.407.329,15
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.550.000,00	13.028.636,00	13.028.636,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	297.021.973,00	153.624.300,00	153.624.300,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	186.569.000,00	80.717.570,00	74.846.753,88
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.097.200,00	316.652.000,00	311.313.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.984.141.364,00	9.522.931.596,33	8.990.147.846,33
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	365.894.126,00	119.186.380,33	119.186.380,33
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	104.488.940,00	104.488.940,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.370.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.235.877.238,00	9.268.526.276,00	8.735.742.526,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.067.269,00	375.828.933,92	375.828.933,92
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.001.000,00	41.834.600,00	41.834.600,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	516.066.269,00	298.994.333,92	298.994.333,92
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000,00	49.522.800,00	49.522.800,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000,00	49.522.800,00	49.522.800,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	477.032.000,00	541.600.000,00	2.884.142.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	477.032.000,00	541.600.000,00	2.884.142.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	60.100.000,00	300.000,00	192.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.100.000,00	300.000,00	192.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10.000.000,00	100.000,00	60.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15.600.000,00	100.000,00	48.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	34.500.000,00	100.000,00	84.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	382.132.000,00	541.000.000,00	2.179.342.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	188.075.168,00	400.000,00	868.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	4.200.000,00	100.000,00	343.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	34.500.000,00	100.000,00	200.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	14.688.000,00	100.000,00	125.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	134.687.168,00	100.000,00	200.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	83.590.832,00	540.200.000,00	972.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	83.590.832,00	540.200.000,00	972.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	42.140.000,00	300.000,00	193.542.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.140.000,00	100.000,00	11.660.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.000.000,00	100.000,00	162.550.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.000.000,00	100.000,00	19.332.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	68.326.000,00	100.000,00	145.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	68.326.000,00	100.000,00	145.600.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	34.800.000,00	300.000,00	512.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12.000.000,00	100.000,00	130.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	12.000.000,00	100.000,00	130.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	22.800.000,00	200.000,00	382.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	17.400.000,00	100.000,00	174.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	5.400.000,00	100.000,00	208.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1						RSUD Tarempa	6.581.614.436,00	3.178.235.100,00	4.066.556.652,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.581.614.436,00	3.178.235.100,00	4.066.556.652,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	6.581.614.436,00	3.178.235.100,00	4.066.556.652,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	355.300.000,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	355.300.000,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	355.300.000,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.226.314.436,00	3.178.135.100,00	4.065.556.652,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.423.301,00	120.400.000,00	488.621.552,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.336.938,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.059.736,00	120.000.000,00	120.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.626.000,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	292.846.627,00	100.000,00	266.621.552,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.554.000,00	100.000,00	100.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.074.069,00	300.000,00	295.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	197.736.269,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000,00	100.000,00	293.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.337.800,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.467.066,00	200.000,00	223.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.678.900,00	100.000,00	1.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	341.788.166,00	100.000,00	222.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.559.350.000,00	3.057.235.100,00	3.058.235.100,00
1.02.2.14.0.00.01.1	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.559.350.000,00	3.057.235.100,00	3.058.235.100,00
1.02.2.14.0.00.01.10						Puskesmas Siantan Timur	860.154.728,00	333.267.163,00	1.173.307.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	103.289.000,00	900.000,00	548.695.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.289.000,00	900.000,00	548.695.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	97.100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	10.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	14.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	100.000,00	14.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	153.205.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	3.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	7.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	12.335.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	7.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	85.565.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	95.289.000,00	100.000,00	85.498.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	2.100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	34.098.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	100.000,00	1.794.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	21.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	11.856.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	11.856.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	11.856.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	755.865.728,00	332.267.163,00	612.756.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.273.565,00	100.000,00	213.164.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.273.565,00	100.000,00	213.164.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.025.000,00	100.000,00	44.785.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.025.000,00	100.000,00	44.785.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	100.000,00	20.240.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	100.000,00	20.240.000,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	534.567.163,00	331.967.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.10	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	534.567.163,00	331.967.163,00	334.567.163,00
1.02.2.14.0.00.01.11						Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	511.534.160,00	168.536.768,00	168.536.768,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.524.360,00	40.464.360,00	40.464.360,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.408.220,00	1.408.220,00	1.408.220,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.928.140,00	7.928.140,00	7.928.140,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.060.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.379.800,00	110.442.408,00	110.442.408,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.851.200,00	10.851.200,00	10.851.200,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.528.600,00	99.591.208,00	99.591.208,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.630.000,00	17.630.000,00	17.630.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00
1.02.2.14.0.00.01.11	1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	110.490.000,00	10.490.000,00	10.490.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12						Puskesmas Jemaja Barat	218.000.000,00	134.998.600,00	576.571.400,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.500.000,00	9.200.000,00	419.054.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.500.000,00	9.200.000,00	419.054.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	38.425.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	1.000.000,00	30.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	4.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	1.000.000,00	9.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	101.705.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	1.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	16.200.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	2.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	1.000.000,00	48.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	42.500.000,00	100.000,00	112.024.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	4.900.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	8.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.000.000,00	1.000.000,00	30.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	12.678.800,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	12.678.800,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	1.000.000,00	12.678.800,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.500.000,00	124.798.600,00	144.838.600,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.800.000,00	64.733.613,00	84.773.613,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.800.000,00	5.894.000,00	5.894.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.200.000,00	5.989.500,00	5.989.500,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.800.000,00	22.843.060,00	42.883.060,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.100.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.900.000,00	19.997.053,00	19.997.053,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000,00	10.054.987,00	10.054.987,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.054.987,00	10.054.987,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.200.000,00	50.010.000,00	50.010.000,00
1.02.2.14.0.00.01.12	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.200.000,00	50.010.000,00	50.010.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13						Puskesmas Siantan Utara	243.108.140,00	121.094.061,00	513.708.061,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.728.000,00	900.000,00	386.079.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.728.000,00	900.000,00	386.079.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	74.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	3.240.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	100.000,00	14.040.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	72.231.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	3.620.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	15.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	10.680.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	63.340.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	70.728.000,00	100.000,00	97.328.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	1.080.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	100.000,00	18.720.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	11.880.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	5.735.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	5.735.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	5.735.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.380.140,00	120.094.061,00	121.894.061,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.964.479,00	61.383.421,00	63.183.421,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.222.325,00	1.222.325,00	1.222.325,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.681.085,00	11.681.085,00	11.681.085,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.984.389,00	7.680.011,00	7.680.011,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.986.680,00	28.300.000,00	30.100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.590.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.452.961,00	34.747.940,00	34.747.940,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.980.961,00	32.275.940,00	32.275.940,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.472.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.962.700,00	23.962.700,00	23.962.700,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.962.700,00	3.962.700,00	3.962.700,00
1.02.2.14.0.00.01.13	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14						Puskesmas Kute Siantan	382.075.019,00	234.550.000,00	783.043.800,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	311.775.019,00	234.150.000,00	693.863.800,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.775.019,00	234.050.000,00	684.863.800,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	82.720.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	1.250.000,00	3.300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	2.640.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	1.250.000,00	2.640.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	98.045.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	1.760.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	10.560.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	8.650.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	1.320.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	31.670.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	300.775.019,00	228.050.000,00	358.248.800,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	2.640.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	990.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	15.840.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.000.000,00	1.000.000,00	53.840.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.000.000,00	100.000,00	9.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	9.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	4.180.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	4.180.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	4.180.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.300.000,00	300.000,00	85.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.700.000,00	100.000,00	20.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.700.000,00	100.000,00	20.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000,00	100.000,00	35.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	100.000,00	35.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	100.000,00	30.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.14	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	100.000,00	30.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2						RSUD Jemaja	1.529.989.805,00	375.000.000,00	921.080.109,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.685.820,00	100.000,00	100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.685.820,00	100.000,00	100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.685.820,00	100.000,00	100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.487.303.985,00	374.900.000,00	920.980.109,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.282.559,00	75.500.000,00	369.237.208,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.665.170,00	100.000,00	100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.225.549,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.999.616,00	100.000,00	18.748.984,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.188.224,00	100.000,00	225.188.224,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.204.000,00	100.000,00	100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	100.000,00	50.100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.489.926,00	300.000,00	206.942.901,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.638.926,00	100.000,00	21.692.901,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	100.000,00	170.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.851.000,00	100.000,00	15.250.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.531.500,00	200.000,00	44.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.380.000,00	100.000,00	44.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.151.500,00	100.000,00	100.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	761.000.000,00	298.900.000,00	300.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.2	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	761.000.000,00	298.900.000,00	300.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3						RSUD Palmatak	5.297.638.435,00	2.520.000.000,00	3.161.617.603,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000,00	100.000,00	50.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000,00	50.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	100.000,00	50.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.197.638.435,00	2.519.900.000,00	3.161.567.603,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	724.954.450,00	120.250.000,00	496.867.603,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.109.220,00	0,00	6.577.864,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.856.174,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390.837.056,00	100.000,00	270.289.739,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.152.000,00	150.000,00	100.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.448.885,00	100.000,00	231.676.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.448.885,00	100.000,00	231.676.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00	100.000,00	33.024.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	100.000,00	33.024.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.058.235.100,00	2.399.450.000,00	2.400.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.3	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.058.235.100,00	2.399.450.000,00	2.400.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4						Puskesmas Siantan Tengah	868.963.963,00	269.774.960,00	1.296.352.657,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000,00	1.000.000,00	613.467.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	1.000.000,00	613.467.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	95.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	4.510.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	3.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	100.000,00	13.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	161.956.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	16.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	12.570.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	25.510.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	1.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	74.199.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	0,00	164.082.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	1.595.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	100.000,00	4.325.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	100.000,00	1.535.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	12.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.000.000,00	100.000,00	22.785.000,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	9.771.694,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	9.771.694,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	9.771.694,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	857.963.963,00	268.674.960,00	673.113.963,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.569.778,00	100.000,00	355.787.133,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226.569.778,00	100.000,00	355.787.133,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.119.225,00	100.000,00	45.901.870,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.119.225,00	100.000,00	45.901.870,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	571.274.960,00	268.474.960,00	271.424.960,00
1.02.2.14.0.00.01.4	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	571.274.960,00	268.474.960,00	271.424.960,00
1.02.2.14.0.00.01.5						Puskesmas Letung	737.570.000,00	539.500.000,00	1.237.376.116,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.000.000,00	1.100.000,00	596.655.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	1.100.000,00	596.655.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	43.140.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	24.980.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	15.360.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	100.000,00	10.320.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	206.270.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	46.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	12.040.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	16.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	16.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	39.660.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	60.000.000,00	100.000,00	63.767.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	5.198.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	100.000,00	24.880.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	100.000,00	5.160.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	20.640.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.000.000,00	100.000,00	45.240.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	0,00	5.160.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00	5.160.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	0,00	5.160.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	666.570.000,00	538.400.000,00	635.561.116,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.000.000,00	100.000,00	57.991.116,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	100.000,00	57.991.116,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.570.000,00	100.000,00	37.570.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.570.000,00	100.000,00	37.570.000,00
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	564.000.000,00	538.200.000,00	540.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.5	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	564.000.000,00	538.200.000,00	540.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6						Puskesmas Jemaja Timur	384.479.600,00	229.504.410,00	807.607.010,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.000.000,00	1.000.000,00	476.226.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	1.000.000,00	476.226.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	500.000,00	100.000,00	38.880.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	29.040.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	3.960.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	16.830.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	98.770.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	5.940.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	5.940.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	18.720.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	7.040.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	67.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	500.000,00	100.000,00	133.756.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	1.320.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	100.000,00	14.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	100.000,00	2.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	10.890.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.000.000,00	100.000,00	21.120.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	7.349.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	7.349.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	7.349.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.479.600,00	228.404.410,00	324.032.010,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.000.000,00	100.000,00	69.148.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.000.000,00	100.000,00	69.148.000,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.479.600,00	100.000,00	26.479.600,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.479.600,00	100.000,00	26.479.600,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	216.000.000,00	228.204.410,00	228.404.410,00
1.02.2.14.0.00.01.6	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	216.000.000,00	228.204.410,00	228.404.410,00
1.02.2.14.0.00.01.7						Puskesmas Palmatak	1.279.217.213,00	815.200.000,00	1.478.376.184,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.000.000,00	1.000.000,00	504.261.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.000.000,00	1.000.000,00	504.261.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	105.600.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	5.490.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	5.320.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	100.000,00	11.970.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	136.835.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	2.660.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	6.320.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	12.140.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	3.660.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	88.910.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	70.000.000,00	100.000,00	111.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	2.660.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	100.000,00	4.245.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	100.000,00	3.271.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	3.660.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	5.192.886,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	5.192.886,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	5.192.886,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.199.217.213,00	814.100.000,00	968.922.298,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.704.798,00	100.000,00	90.822.298,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.704.798,00	100.000,00	90.822.298,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.517.500,00	100.000,00	62.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.517.500,00	100.000,00	62.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	925.994.915,00	813.900.000,00	815.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.7	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	925.994.915,00	813.900.000,00	815.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8						Puskesmas Tarempa	1.273.994.820,00	1.174.391.059,00	1.935.614.879,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.346.820,00	11.000.000,00	663.105.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.346.820,00	11.000.000,00	663.105.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	1.000.000,00	66.250.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	1.000.000,00	75.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	8.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	120.925.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	13.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	12.750.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	8.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	1.000.000,00	54.500.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	105.346.820,00	1.000.000,00	145.700.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	300.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	1.000.000,00	22.630.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	36.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.000.000,00	1.000.000,00	70.450.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	15.604.820,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	15.604.820,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	1.000.000,00	15.604.820,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.157.648.000,00	1.162.391.059,00	1.256.905.059,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.480.000,00	100.000,00	38.888.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.480.000,00	100.000,00	38.888.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.168.000,00	100.000,00	55.626.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.168.000,00	100.000,00	55.626.000,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.020.000.000,00	1.162.191.059,00	1.162.391.059,00
1.02.2.14.0.00.01.8	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.020.000.000,00	1.162.191.059,00	1.162.391.059,00
1.02.2.14.0.00.01.9						Puskesmas Siantan Selatan	712.380.429,00	363.234.200,00	1.413.497.210,44

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	113.842.000,00	1.000.000,00	750.198.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.842.000,00	1.000.000,00	750.198.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00	100.000,00	70.647.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.000.000,00	100.000,00	72.750.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	28.290.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	100.000,00	16.830.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000,00	100.000,00	207.110.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	28.800.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.000.000,00	100.000,00	20.790.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	100.000,00	14.985.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	12.780.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.000.000,00	100.000,00	94.245.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	104.842.000,00	100.000,00	104.376.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	3.150.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.000.000,00	100.000,00	11.755.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	100.000,00	10.230.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	53.460.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000,00	100.000,00	6.675.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	100.000,00	6.675.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000,00	100.000,00	6.675.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	597.538.429,00	362.134.200,00	656.624.210,44
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000,00	100.000,00	234.689.765,44

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	100.000,00	234.689.765,44
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	100.000,00	60.000.245,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	100.000,00	20.000.245,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	407.538.429,00	361.934.200,00	361.934.200,00
1.02.2.14.0.00.01.9	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	407.538.429,00	361.934.200,00	361.934.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	317.447.963.214,00	96.725.643.643,00	123.805.573.452,55
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	309.267.963.214,00	67.736.223.383,10	85.472.885.622,55
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.250.829.938,00	5.808.715.534,52	5.396.730.565,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.800.829.938,00	5.808.715.534,52	5.396.730.565,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.464.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater	100.000.000,00	159.901.416,52	307.750.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.331.829.938,00	1.000.000.000,00	542.650.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	200.000.000,00	398.814.118,00	345.444.565,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	405.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.000.000,00	4.100.000.000,00	4.200.886.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	250.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.300.000.000,00	2.113.711.000,00	637.699.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.300.000.000,00	2.113.711.000,00	637.699.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.500.000.000,00	1.597.369.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.300.000.000,00	116.342.000,00	237.699.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	17.570.520.514,00	150.000.000,00	237.778.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	17.570.520.514,00	150.000.000,00	237.778.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	16.000.000.000,00	150.000.000,00	237.778.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.510.520.514,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.709.200.000,00	167.020.000,00	342.228.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.709.200.000,00	167.020.000,00	342.228.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.499.200.000,00	167.020.000,00	342.228.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.556.175.708,00	811.159.500,00	1.449.631.955,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.556.175.708,00	811.159.500,00	1.449.631.955,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	936.175.708,00	661.159.500,00	1.449.631.955,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10.400.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	450.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01	0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01	0019	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	124.763.278.166,10	10.270.126.000,00	15.260.769.613,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	124.763.278.166,10	10.270.126.000,00	15.260.769.613,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	200.000.000,00	945.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5.000.000,00	0,00	281.850.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	124.477.357.466,10	9.920.320.000,00	13.840.656.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	220.920.700,00	149.806.000,00	193.263.613,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.535.000.000,00	547.383.318,00	649.141.298,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.535.000.000,00	547.383.318,00	649.141.298,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000.000,00	547.383.318,00	649.141.298,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	113.598.590.195,00	30.494.059.002,56	44.344.217.400,03

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	113.598.590.195,00	30.494.059.002,56	44.344.217.400,03
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	10.000.000,00	249.698.000,00	551.390.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	89.424.000.000,00	13.860.000.000,00	11.867.780.000,03
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	50.000.000,00	2,56	23.435.039.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	450.000.000,00	854.361.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	7.700.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	15.364.590.195,00	13.610.000.000,00	7.980.858.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	300.000.000,00	1.420.000.000,00	509.150.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	670.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	625.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	400.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.430.000.000,00	0,00	142.671.413,50
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	500.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	350.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000,00	0,00	142.671.413,50
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	350.000.000,00	0,00	142.671.413,50
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.04	0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.434.368.692,90	17.174.049.028,02	16.752.018.378,02
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.122.622.753,90	14.150.683.317,02	14.112.443.317,02
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.884.973.365,90	13.050.683.317,02	13.050.683.317,02
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.187.649.388,00	1.100.000.000,00	1.061.760.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338.824.750,00	338.824.750,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	338.824.750,00	338.824.750,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.888.019.313,00	2.072.025.773,00	2.024.351.473,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.383.640.691,00	583.874.773,00	583.874.773,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.504.378.622,00	1.488.151.000,00	1.440.476.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.230.709.952,00	279.323.264,00	279.323.264,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.165.709.952,00	214.323.264,00	214.323.264,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.191.924,00	233.191.924,00	235.900.324,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.191.924,00	233.191.924,00	235.900.324,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.630.000.000,00	28.887.902.259,90	37.720.817.840,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	5.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	175.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.070.000.000,00	563.408.660,00	150.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	160.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.900.000.000,00	413.408.660,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.600.000.000,00	413.408.660,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	250.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	210.000.000,00	28.249.493.599,90	37.495.817.840,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	210.000.000,00	28.249.493.599,90	37.495.817.840,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100.000.000,00	28.249.493.599,90	37.495.817.840,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	550.000.000,00	101.518.000,00	611.869.990,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	550.000.000,00	101.518.000,00	611.869.990,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	45.000.000,00	0,00	500.051.990,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	0,00	500.051.990,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	2.01	0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	500.051.990,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	20.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	260.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	160.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	150.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000,00	101.518.000,00	111.818.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	101.518.000,00	111.818.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000,00	101.518.000,00	111.818.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0001						UPTD SPAM SIANTAN	1.923.179.178,00	1.300.000.000,00	1.154.361.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.923.179.178,00	1.300.000.000,00	1.154.361.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.923.179.178,00	1.300.000.000,00	1.154.361.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	400.000.000,00	1.000.000.000,00	854.361.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	1.000.000.000,00	854.361.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000,00	1.000.000.000,00	854.361.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.523.179.178,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.523.179.178,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.414.939.178,00	191.760.000,00	191.760.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.240.000,00	108.240.000,00	108.240.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.234.734.549,00	9.044.225.052,00	9.222.111.540,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.234.734.549,00	9.044.225.052,00	9.222.111.540,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	832.882.904,00	530.811.409,00	780.423.791,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	832.882.904,00	530.811.409,00	780.423.791,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.878.000,00	26.393.820,00	26.393.820,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	824.004.904,00	504.417.589,00	754.029.971,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.401.851.645,00	8.513.413.643,00	8.441.687.749,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.329.745.841,00	7.460.163.478,00	7.474.859.246,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.223.425.841,00	7.380.363.478,00	7.395.059.246,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.320.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.788.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.788.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.551.174,00	595.532.503,00	455.910.047,08
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.138.838,00	9.475.648,00	9.475.648,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.037.773,00	181.396.395,00	97.434.165,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.623.170,00	79.564.870,00	64.981.434,08
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.091.393,00	55.435.590,00	15.238.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.660.000,00	269.660.000,00	268.780.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	873.889.103,00	247.041.477,00	316.838.346,92
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.427.388,00	48.031.809,00	48.105.592,92
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646.469.343,00	59.424.564,00	59.424.564,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3.953.672,00	100.035.074,00	32.222.685,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.038.700,00	39.550.030,00	177.085.505,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.710.688.471,00	143.974.529,00	124.654.929,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.904.175,00	95.387.729,00	76.068.129,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.112.000,00	48.586.800,00	48.586.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.637.672.296,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.189.056,00	55.913.656,00	58.637.180,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.915.400,00	26.640.000,00	26.640.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.273.656,00	29.273.656,00	31.997.180,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.889.586.568,00	12.197.198.653,00	12.427.198.553,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.338.140.296,00	565.607.489,00	695.607.389,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	86.685.230,00	186.685.230,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100.000.000,00	86.685.230,00	186.685.230,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	501.519.796,00	217.024.159,00	230.624.159,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	130.000.000,00	100,00	4.988.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	95.516.600,00	100,00	4.211.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.707.696,00	129.509.359,00	129.509.359,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	66.961.500,00	87.514.500,00	87.514.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	58.334.000,00	100,00	4.400.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	518.659.200,00	70.000.100,00	86.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	58.334.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	283.248.700,00	100,00	9.800.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	177.076.500,00	0,00	6.600.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	217.961.300,00	191.898.000,00	191.898.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	63.598.700,00	26.173.000,00	26.173.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	154.362.600,00	165.725.000,00	165.725.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.551.446.272,00	11.631.591.164,00	11.731.591.164,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.402.000,00	97.021.500,00	97.021.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.402.000,00	97.021.500,00	97.021.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.639.933.544,00	10.764.832.897,00	10.764.832.897,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.404.265.544,00	10.538.764.897,00	10.538.764.897,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.668.000,00	226.068.000,00	226.068.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	247.628.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	247.628.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.853.400,00	365.684.843,00	365.684.843,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.333.500,00	8.465.130,00	8.465.130,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.174.900,00	58.904.715,00	58.904.715,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.698.200,00	35.310.660,00	35.310.660,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.693.000,00	56.219.150,00	56.219.150,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.302.000,00	37.324.000,00	37.324.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	785.651.800,00	169.461.188,00	169.461.188,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.358.248.174,00	236.274.514,00	236.274.514,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.615.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.377.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	239.056.500,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.484.854,00	221.064.004,00	221.064.004,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	533.714.820,00	15.210.510,00	15.210.510,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.875.170.424,00	68.310.000,00	68.310.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.248.000,00	68.310.000,00	68.310.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.810.922.424,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.210.730,00	99.467.410,00	199.467.410,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.710.730,00	82.367.410,00	182.367.410,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.065.556.448,00	12.743.760.215,00	12.783.760.215,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	486.659.000,00	260.144.339,00	300.196.339,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.295.000,00	126.009.199,00	126.009.199,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	10.083.103,00	10.083.103,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	140.295.000,00	105.186.096,00	105.186.096,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	93.630.000,00	33.433.140,00	33.433.140,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	16.493.140,00	16.493.140,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	43.630.000,00	16.940.000,00	16.940.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	162.734.000,00	100.702.000,00	140.754.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	79.584.000,00	40.052.000,00	80.104.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	83.150.000,00	60.650.000,00	60.650.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.578.897.448,00	12.483.615.876,00	12.483.563.876,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	38.221.060,00	39.827.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	18.271.060,00	19.877.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.302.348.104,00	11.453.133.534,00	11.453.133.534,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.174.068.104,00	11.324.853.534,00	11.324.853.534,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.280.000,00	128.280.000,00	128.280.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.564.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.564.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239.220.000,00	156.678.000,00	156.678.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	239.220.000,00	156.678.000,00	156.678.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.535.938,00	378.816.427,00	366.329.639,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.246.737,00	5.250.924,00	5.250.924,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.847.784,00	63.267.931,00	71.645.031,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.596.177,00	8.221.672,00	8.270.284,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.872.240,00	47.540.500,00	47.560.500,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.529.000,00	9.974.400,00	13.887.900,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.444.000,00	244.561.000,00	219.715.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	416.183.300,00	353.105.325,00	353.105.325,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	366.183.300,00	353.105.325,00	353.105.325,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.061.158.576,00	43.350.000,00	43.350.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.350.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.017.808.576,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.887.530,00	26.747.530,00	37.576.378,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.967.530,00	22.077.530,00	32.906.378,00
1.05.8.01.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.294.548.961,00	6.766.829.684,00	7.542.236.186,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.294.548.961,00	6.766.829.684,00	7.542.236.186,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.294.548.961,00	6.766.829.684,00	7.542.236.186,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.750.000.000,00	746.636.239,00	1.403.983.449,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.750.000.000,00	746.636.239,00	1.403.983.449,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000,00	61.636.239,00	100.000.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	1.600.000.000,00	685.000.000,00	1.303.983.449,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	840.000.000,00	442.071.589,00	442.071.589,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	840.000.000,00	442.071.589,00	442.071.589,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	760.000.000,00	442.071.589,00	442.071.589,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200.000.000,00	334.912.000,00	259.891.870,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200.000.000,00	334.912.000,00	259.891.870,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	50.013.870,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	234.912.000,00	209.878.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.050.000.000,00	283.115.520,00	428.611.520,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.050.000.000,00	283.115.520,00	428.611.520,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	283.115.520,00	428.611.520,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.354.548.961,00	4.960.094.336,00	5.007.677.758,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.952.558.173,00	4.053.757.486,55	4.170.030.504,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.780.838.173,00	3.931.477.486,55	4.045.350.504,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.720.000,00	122.280.000,00	124.680.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.428.000,00	16.428.000,00	16.428.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.428.000,00	16.428.000,00	16.428.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.218.099,00	460.546.585,29	448.286.585,29
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.995.800,00	53.955.995,29	53.955.995,29
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.992.566,00	10.399.730,00	10.399.730,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.992.982,00	60.167.460,00	60.167.460,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.918.751,00	15.677.400,00	15.677.400,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.318.000,00	320.346.000,00	308.086.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.000.000,00	404.002.708,16	336.971.936,10
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.000.000,00	86.676.744,00	43.338.372,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	118.963.964,16	118.963.964,16
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	198.362.000,00	174.669.599,94
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.344.689,00	16.069.556,00	26.670.732,61
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.804.375,00	11.819.556,00	22.420.732,61
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.395.490,00	4.250.000,00	4.250.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	506.144.824,00	0,00	0,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1.05.8.01.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	4.890.000,00	4.890.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.134.300.710,00	6.439.367.058,00	7.511.657.058,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.131.300.710,00	6.284.367.058,00	6.485.967.058,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.131.300.710,00	6.284.367.058,00	6.485.967.058,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	300.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	400.000.000,00	180.245.458,00	180.245.458,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	400.000.000,00	180.245.458,00	180.245.458,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	400.000.000,00	180.245.458,00	180.245.458,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	975.000.000,00	250.000.000,00	289.687.650,01
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	975.000.000,00	250.000.000,00	289.687.650,01
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	200.000.000,00	189.687.650,01
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	450.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	25.000.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	250.000.000,00	19.754.542,00	49.754.542,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,00	19.754.542,00	49.754.542,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	250.000.000,00	19.754.542,00	49.754.542,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.206.300.710,00	5.834.367.058,00	5.966.279.407,99
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.444.500,00	46.619.632,00	46.619.632,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.444.500,00	46.619.632,00	46.619.632,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.985.035.568,00	4.545.246.988,00	4.712.097.024,96
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.886.576,00	4.389.576.988,00	4.556.427.024,96
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.120.000,00	135.120.000,00	135.120.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91.028.992,00	20.550.000,00	20.550.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.200.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.200.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.601.097,00	890.942.872,00	856.005.185,03
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.500.000,00	33.278.920,00	33.278.920,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.667.897,00	293.615.506,00	243.615.506,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.500.000,00	32.875.822,00	32.875.822,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	62.423.424,00	62.423.424,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	50.411.200,00	50.411.200,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.933.200,00	418.338.000,00	433.400.313,03
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.893.124,00	113.226.330,00	113.226.330,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.893.124,00	113.226.330,00	113.226.330,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.026.361,00	150.781.236,00	150.781.236,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.750.000,00	150.781.236,00	150.781.236,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.300.000,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588.976.361,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.100.060,00	60.790.000,00	60.790.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.680.060,00	26.520.000,00	26.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.420.000,00	34.270.000,00	34.270.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.003.000.000,00	155.000.000,00	1.025.690.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.003.000.000,00	155.000.000,00	1.025.690.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	500.000.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	200.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	1.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	1.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.000.000,00	3.000.000,00	333.640.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	130.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	130.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	115.240.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	115.240.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	88.400.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	88.400.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	250.000.000,00	50.000.000,00	370.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	50.000.000,00	370.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	50.000.000,00	370.000.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	250.000.000,00	100.000.000,00	272.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	100.000.000,00	272.050.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	100.000.000,00	272.050.000,00
1.06.2.08.0.00.03.0001						UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	639.790.000,00	12.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	150.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	488.790.000,00	8.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.790.000,00	5.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.790.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.03.0001	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.414.546.416,00	10.229.094.828,00	10.811.094.828,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.414.546.416,00	10.229.094.828,00	10.811.094.828,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	555.328.550,00	458.103.950,00	458.103.950,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	504.809.650,00	407.585.050,00	407.585.050,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	125.775.400,00	49.906.800,00	49.906.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	197.734.250,00	176.378.250,00	176.378.250,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	181.300.000,00	181.300.000,00	181.300.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	50.518.900,00	50.518.900,00	50.518.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	50.518.900,00	50.518.900,00	50.518.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	235.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	235.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	235.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	180.687.000,00	175.105.000,00	175.105.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.687.000,00	175.105.000,00	175.105.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	180.687.000,00	175.105.000,00	175.105.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.538.000,00	68.986.400,00	68.986.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	71.538.000,00	68.986.400,00	68.986.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	71.538.000,00	68.986.400,00	68.986.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.371.992.866,00	9.376.899.478,00	9.958.899.478,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.072.139.108,00	8.617.066.230,00	8.617.066.230,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.928.479.108,00	8.473.406.230,00	8.473.406.230,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.560.000,00	139.560.000,00	139.560.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	161.169.780,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000,00	1.000.000,00	161.169.780,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	882.339.530,00	408.985.188,00	751.984.668,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	12.964.048,00	12.964.048,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000,00	0,00	342.999.480,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922,00	12.998.922,00	12.998.922,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000,00	19.801.000,00	19.801.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.582.608,00	36.623.560,00	36.623.560,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.375.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.582.000,00	314.227.658,00	314.227.658,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.320.504.228,00	288.838.060,00	294.838.060,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.704.460,00	98.838.060,00	98.838.060,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	190.000.000,00	196.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.059.799.768,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.810.000,00	52.810.000,00	125.640.740,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000,00	12.810.000,00	12.810.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	25.000.000,00	95.830.740,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.164.914.840,00	4.890.218.123,00	5.670.382.123,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.164.914.840,00	4.890.218.123,00	5.670.382.123,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	700.000.000,00	85.146.144,00	363.168.733,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	700.000.000,00	85.146.144,00	363.168.733,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	200.000.000,00	25.535.644,00	363.168.733,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	100.000.000,00	18.903.500,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	200.000.000,00	19.153.500,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	200.000.000,00	21.553.500,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	250.000.000,00	45.908.000,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	250.000.000,00	45.908.000,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100.000.000,00	22.636.000,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	150.000.000,00	23.272.000,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.100.000.000,00	1.155.328.800,00	1.255.534.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.100.000.000,00	1.155.328.800,00	1.255.534.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.150.000.000,00	1.019.498.400,00	1.029.498.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	200.000.000,00	26.734.400,00	93.428.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	150.000.000,00	16.318.000,00	25.080.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100.000.000,00	18.550.000,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200.000.000,00	22.578.000,00	57.428.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100.000.000,00	25.350.000,00	40.100.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000,00	26.300.000,00	10.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.100.000.000,00	236.119.260,00	542.572.785,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	236.119.260,00	542.572.785,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00	20.446.260,00	103.960.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00	17.653.500,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	16.953.500,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	150.000.000,00	25.307.000,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00	155.759.000,00	438.612.785,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.014.914.840,00	3.367.715.919,00	3.509.106.205,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.655.839.400,00	2.607.844.368,00	2.607.844.368,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.510.399.400,00	2.477.896.368,00	2.477.896.368,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.440.000,00	129.948.000,00	129.948.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.990.600,00	547.053.291,00	622.591.291,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.990.600,00	3.946.494,00	3.946.494,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	249.268.797,00	249.268.797,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	82.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.588.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	277.838.000,00	277.788.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	152.002.916,00	200.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	152.002.916,00	200.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.084.840,00	46.623.400,00	64.478.602,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.999.400,00	24.999.400,00	42.854.602,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	21.624.000,00	21.624.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.085.440,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	14.191.944,00	14.191.944,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	6.881.944,00	6.881.944,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000						DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	48.078.868.914,00	31.153.226.947,45	29.351.955.391,47
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	958.941.466,00	623.746.595,85	683.746.595,85
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	46.412.000,00	46.412.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.000.000,00	46.412.000,00	46.412.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150.000.000,00	46.412.000,00	46.412.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.000.000,00	25.108.846,85	57.151.490,70
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.000.000,00	25.108.846,85	57.151.490,70
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.000.000,00	25.108.846,85	57.151.490,70
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	175.000.000,00	60.975.080,00	60.975.080,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	60.975.080,00	60.975.080,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	175.000.000,00	60.975.080,00	60.975.080,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.000.000,00	152.662.669,00	180.620.025,15
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	152.662.669,00	180.620.025,15
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5.000.000,00	152.662.669,00	180.620.025,15
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	323.941.466,00	338.588.000,00	338.588.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	323.941.466,00	338.588.000,00	338.588.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	100.000.000,00	82.051.178,00	82.051.178,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	223.941.466,00	256.536.822,00	256.536.822,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.119.927.448,00	30.529.480.351,60	28.668.208.795,62
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.400.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.880.000.000,00	234.178.000,00	234.198.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.865.000.000,00	83.593.056,00	80.159.772,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.000.000,00	150.584.944,00	154.038.228,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	505.000.000,00	25.822.000,00	25.802.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.000.000,00	8.850.000,00	8.837.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	16.972.000,00	16.965.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	30.074.647.605,00	16.207.959.974,60	14.422.019.407,20
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30.074.647.605,00	16.207.959.974,60	14.422.019.407,20
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	29.174.647.605,00	15.345.757.910,60	13.482.825.343,20
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	500.000.000,00	34.108.000,00	110.700.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	400.000.000,00	828.094.064,00	828.494.064,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.645.279.843,00	14.061.520.377,00	13.986.189.388,42
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	17.792.000,00	17.792.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	12.208.000,00	12.208.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.211.894.062,00	12.808.615.460,00	12.808.615.460,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.852.302.062,00	12.451.711.460,00	12.451.711.460,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	359.592.000,00	356.904.000,00	356.904.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	743.596.886,00	602.136.467,00	509.322.368,42

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.420.985,00	5.420.985,00	5.420.985,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.162.695,00	65.162.695,00	39.548.291,42
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.463.956,00	95.463.956,00	82.853.511,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.567.250,00	79.567.250,00	24.978.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.750.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.232.000,00	304.771.581,00	304.771.581,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.868.961.784,00	123.480.920,00	164.064.030,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.527.920,00	41.527.920,00	71.935.715,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.686.000,00	68.686.000,00	68.686.000,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.267.000,00	13.267.000,00	23.442.315,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.745.480.864,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.827.111,00	497.287.530,00	474.187.530,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	676.317.311,00	447.267.530,00	447.267.530,00
2.15.2.11.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.509.800,00	50.020.000,00	26.920.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1						UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI	545.786.356,00	550.786.356,00	608.071.204,58
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.209.831,00	418.860.076,00	490.278.924,58
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.230.174,00	3.243.479,00	3.243.479,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.170.399,00	49.794.205,96	67.884.205,96
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.083.300,00	3.104.820,00	3.104.820,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.881.958,00	309.379.940,00	309.379.940,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.174.000,00	4.331.631,04	54.360.479,62
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.700.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.970.000,00	49.006.000,00	52.306.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.036.237,00	25.480.000,00	9.918.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.036.237,00	25.480.000,00	9.918.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.320.288,00	59.006.280,00	60.434.280,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.360.288,00	12.834.280,00	12.834.280,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.960.000,00	46.172.000,00	47.600.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.220.000,00	47.440.000,00	47.440.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.140.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
2.15.2.11.0.00.01.1	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.080.000,00	37.660.000,00	37.660.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2						UPT PENGELOLAAN SAMPAH	477.340.800,00	477.265.477,00	932.265.477,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	477.340.800,00	477.265.477,00	932.265.477,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	477.340.800,00	477.265.477,00	932.265.477,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.409.560,00	65.862.167,00	475.862.167,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	846.000,00	743.270,00	743.270,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.406.280,00	22.432.390,00	432.432.390,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.880.000,00	7.655.000,00	7.655.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	2.281.751,00	2.281.751,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.700.280,00	5.017.756,00	5.017.756,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.177.000,00	0,00	0,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.400.000,00	27.732.000,00	27.732.000,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.797.273,00	10.773.110,00	10.773.110,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.720.000,00	3.427.360,00	3.427.360,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.077.273,00	7.345.750,00	7.345.750,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.133.967,00	400.630.200,00	445.630.200,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.623.067,00	358.390.200,00	403.390.200,00
2.15.2.11.0.00.01.2	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.510.900,00	42.240.000,00	42.240.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	29.112.820.349,00	14.797.934.180,23	15.017.934.180,23
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.279.070.349,00	14.413.370.284,23	14.633.370.284,23
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.827.612.230,00	3.824.836.939,00	4.044.836.938,64
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.827.612.230,00	3.824.836.939,00	4.044.836.938,64
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	3.648.526.922,00	3.647.299.631,00	3.647.299.627,20
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	29.632.308,00	29.632.308,00	76.384.308,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	30.516.000,00	30.516.000,00	53.908.081,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	101.937.000,00	101.249.000,00	201.249.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	17.000.000,00	16.140.000,00	65.995.922,44
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	18.110.036.914,00	4.070.370.837,35	4.070.370.837,35
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.150.000,00	129.028.367,77	129.028.367,77
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	125.150.000,00	129.028.367,77	129.028.367,77
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.984.886.914,00	3.941.342.469,58	3.941.342.469,58
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	19.166.620,00	46.095.152,66	46.095.152,66
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	22.125.000,00	42.842.000,00	42.842.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	26.500.000,00	78.734.800,00	78.734.800,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	17.917.095.294,00	3.773.670.516,92	3.773.670.516,92
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.341.421.205,00	6.518.162.507,88	6.518.162.508,24
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.956.600,00	44.700.000,00	42.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.237.100,00	42.000.000,00	40.200.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.719.500,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.761.123.045,00	5.609.231.759,00	5.609.231.759,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.562.483.045,00	5.404.566.759,00	5.404.566.759,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.040.000,00	203.040.000,00	203.040.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.600.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.564.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.564.000,00	33.564.000,00	33.564.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.930.623,00	541.352.286,00	540.556.980,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.111.623,00	9.934.962,00	9.934.962,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.912.368,00	4.684.380,00	4.684.380,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.752.152,00	14.752.152,00	14.752.152,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.880.230,00	51.118.632,00	51.118.632,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.249.250,00	38.564.160,00	37.768.854,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.520.000,00	22.020.000,00	22.020.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.505.000,00	400.278.000,00	400.278.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.306.474,00	100.772.540,88	103.367.847,24
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.218.000,00	52.058.693,64	54.654.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.223.712,00	25.223.712,00	25.223.712,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.864.762,00	23.490.135,24	23.490.135,24
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	848.638.286,00	120.649.841,00	120.649.841,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.432.278,00	62.948.295,00	62.948.295,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.360.000,00	57.701.546,00	57.701.546,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.846.008,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.902.177,00	67.892.081,00	67.892.081,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.932.177,00	57.782.081,00	57.782.081,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000,00	10.110.000,00	10.110.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	80.750.000,00	188.132.000,00	188.132.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	80.750.000,00	188.132.000,00	188.132.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80.750.000,00	188.132.000,00	188.132.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	8.250.000,00	54.905.000,00	54.905.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	25.500.000,00	57.495.000,00	57.495.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	47.000.000,00	75.732.000,00	75.732.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	753.000.000,00	196.431.896,00	196.431.896,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	753.000.000,00	196.431.896,00	196.431.896,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	694.551.500,00	114.340.000,00	114.340.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	694.551.500,00	114.340.000,00	114.340.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	58.448.500,00	82.091.896,00	82.091.896,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.448.500,00	82.091.896,00	82.091.896,00
2.17.2.07.3.30.01.0000						DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.644.509.061,00	12.329.974.392,31	12.292.966.632,14
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.761.400.000,00	1.411.100.420,37	1.411.100.420,37
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.400.000,00	66.070.000,00	66.070.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.400.000,00	66.070.000,00	66.070.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.400.000,00	66.070.000,00	66.070.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.000.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	10.000.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.750.000.000,00	1.338.300.420,37	1.338.300.420,37
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	944.618.000,00	944.618.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.100.000.000,00	944.618.000,00	944.618.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	393.682.420,37	393.682.420,37
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	393.682.420,37	393.682.420,37
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.094.109.061,00	10.206.538.881,05	9.889.954.841,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	45.000.000,00	39.307.500,00	39.307.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	39.307.500,00	39.307.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	45.000.000,00	39.307.500,00	39.307.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.000.000,00	49.781.000,00	49.781.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	49.781.000,00	49.781.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	10.000.000,00	49.781.000,00	49.781.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	415.000.000,00	234.369.087,88	527.632.975,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	415.000.000,00	234.369.087,88	527.632.975,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	415.000.000,00	234.369.087,88	527.632.975,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.624.109.061,00	9.883.081.293,17	9.273.233.366,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	520.000,00	29.506.000,00	29.506.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	520.000,00	29.506.000,00	29.506.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.644.919.400,00	8.801.045.304,42	8.187.397.436,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.418.719.400,00	8.568.204.562,00	7.954.595.436,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225.000.000,00	230.150.000,00	230.150.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000,00	2.690.742,42	2.652.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.415.446,00	832.708.311,75	832.708.253,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	8.401.380,00	8.401.380,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	80.441.705,00	80.441.705,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.520.408,00	25.084.713,00	25.084.713,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.093.940,00	43.996.915,00	43.996.915,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.531.098,00	33.020.598,75	33.020.540,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.270.000,00	641.763.000,00	641.763.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000,00	66.652.082,00	70.452.082,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000,00	66.652.082,00	70.452.082,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.230.170,00	91.531.810,00	91.531.810,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.500.000,00	18.170.010,00	18.170.010,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.245.000,00	73.361.800,00	73.361.800,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.583.485.170,00	0,00	0,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.824.045,00	61.637.785,00	61.637.785,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.573.045,00	49.697.785,00	49.697.785,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.251.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	789.000.000,00	712.335.090,89	991.911.370,77

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	220.000.000,00	190.634.194,12	463.135.778,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	115.000.000,00	16.326.860,00	16.326.860,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	115.000.000,00	16.326.860,00	16.326.860,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	115.000.000,00	16.326.860,00	16.326.860,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	10.000.000,00	87.229.834,12	359.731.418,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.000.000,00	87.229.834,12	359.731.418,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.000.000,00	87.229.834,12	359.731.418,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	95.000.000,00	87.077.500,00	87.077.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	95.000.000,00	87.077.500,00	87.077.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	95.000.000,00	87.077.500,00	87.077.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	569.000.000,00	521.700.896,77	528.775.592,77
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	559.000.000,00	459.573.396,77	466.648.092,77
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	559.000.000,00	459.573.396,77	466.648.092,77
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	559.000.000,00	459.573.396,77	466.648.092,77
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10.000.000,00	62.127.500,00	62.127.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	62.127.500,00	62.127.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	10.000.000,00	62.127.500,00	62.127.500,00
2.17.2.07.3.30.01.0001						UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR	104.000.000,00	103.042.723,67	240.050.083,67
2.17.2.07.3.30.01.0001	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	104.000.000,00	103.042.723,67	240.050.083,67

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	104.000.000,00	103.042.723,67	240.050.083,67
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	90.000.000,00	89.054.608,00	226.061.968,00
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	90.000.000,00	89.054.608,00	226.061.968,00
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	90.000.000,00	89.054.608,00	226.061.968,00
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.000.000,00	13.988.115,67	13.988.115,67
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.988.115,67	3.988.115,67
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.988.115,67	3.988.115,67
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.17.2.07.3.30.01.0001	2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.17.2.07.3.31.01.0002						UPT METROLOGI LEGAL	50.363.067,00	99.363.067,00	99.363.067,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	50.363.067,00	99.363.067,00	99.363.067,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	50.363.067,00	99.363.067,00	99.363.067,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	46.363.067,00	95.363.067,00	95.363.067,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	46.363.067,00	95.363.067,00	95.363.067,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	46.363.067,00	95.363.067,00	95.363.067,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.17.2.07.3.31.01.0002	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.689.059.676,00	5.760.080.421,00	5.760.080.421,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.689.059.676,00	5.760.080.421,00	5.760.080.421,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.689.059.676,00	5.760.080.421,00	5.760.080.421,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.600.000,00	168.381.500,00	168.381.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000,00	168.381.500,00	168.381.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.600.000,00	168.381.500,00	168.381.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	250.000.000,00	204.762.057,00	204.762.057,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	204.762.057,00	204.762.057,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	204.762.057,00	204.762.057,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	431.602.000,00	422.454.000,00	422.454.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	431.602.000,00	422.454.000,00	422.454.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	389.322.000,00	380.316.000,00	380.316.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	42.280.000,00	42.138.000,00	42.138.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.000.000,00	33.940.000,00	33.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	33.940.000,00	33.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1.000.000,00	33.940.000,00	33.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.004.857.676,00	4.930.542.864,00	4.930.542.864,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.850.000,00	26.951.000,00	26.951.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.850.000,00	26.951.000,00	26.951.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.998.945.395,00	4.517.866.315,00	4.517.866.315,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.868.764.395,00	4.388.506.315,00	4.388.506.315,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.160.000,00	128.160.000,00	128.160.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.021.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.056.000,00	19.056.000,00	19.056.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.056.000,00	19.056.000,00	19.056.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.748.061,00	286.543.563,00	286.543.563,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.780.740,00	2.290.919,00	2.290.919,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.609.200,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.204.321,00	5.036.592,00	5.036.592,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.687.800,00	22.900.000,00	22.900.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.586.000,00	13.520.052,00	13.520.052,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.880.000,00	239.396.000,00	239.396.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.803.100,00	27.803.100,00	27.803.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.803.100,00	27.803.100,00	27.803.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.039.120,00	35.926.927,00	35.926.927,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.777.200,00	34.203.535,00	34.203.535,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.520.000,00	1.723.392,00	1.723.392,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.741.920,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.416.000,00	16.395.959,00	16.395.959,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.156.000,00	9.205.959,00	9.205.959,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3.980.316.003,00	4.589.954.070,00	4.789.954.070,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.820.148.729,00	4.419.220.548,00	4.628.326.909,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	787.424.060,00	927.527.472,00	1.104.560.081,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	515.720.850,00	533.722.460,00	689.944.539,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227.700.000,00	285.831.710,00	314.440.769,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.445.850,00	142.119.000,00	289.737.770,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	82.575.000,00	105.771.750,00	85.766.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	271.703.210,00	393.805.012,00	414.615.542,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	46.569.740,00	76.519.490,00	115.768.300,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	225.133.470,00	317.285.522,00	298.847.242,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.032.724.669,00	3.491.693.076,00	3.523.766.828,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	33.610.898,00	55.510.094,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	33.610.898,00	55.510.094,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.894.512.584,00	2.609.263.815,00	2.591.914.637,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.180.584,00	2.529.451.815,00	2.512.102.637,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.332.000,00	79.812.000,00	79.812.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.251.810,00	423.895.756,00	473.204.669,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.629.080,00	34.555.780,00	67.000.684,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.874.084,00	37.528.780,00	52.097.905,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.403.890,00	16.728.140,00	24.162.380,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.535.000,00	24.190.900,00	37.100.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.809.756,00	310.892.156,00	292.842.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	399.650.573,00	369.283.181,00	353.869.127,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	48.978.089,00	69.256.817,00	53.842.763,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.672.484,00	300.026.364,00	300.026.364,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.309.702,00	55.639.426,00	49.268.301,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.130.000,00	55.639.426,00	49.268.301,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.179.702,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	160.167.274,00	170.733.522,00	161.627.161,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	160.167.274,00	170.733.522,00	161.627.161,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	160.167.274,00	170.733.522,00	161.627.161,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	84.193.677,00	91.466.222,00	104.672.661,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	75.973.597,00	79.267.300,00	56.954.500,00
3.25.3.27.2.09.01.0000						DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	21.427.632.327,00	22.835.913.634,00	22.922.919.100,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	225.000.000,00	208.393.531,00	208.393.531,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	74.911.100,00	80.265.700,00	80.265.700,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	74.911.100,00	80.265.700,00	80.265.700,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	74.911.100,00	80.265.700,00	80.265.700,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	122.574.400,00	113.567.931,00	113.567.931,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.574.400,00	113.567.931,00	113.567.931,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	122.574.400,00	113.567.931,00	113.567.931,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.514.500,00	14.559.900,00	14.559.900,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.514.500,00	14.559.900,00	14.559.900,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.514.500,00	14.559.900,00	14.559.900,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.202.632.327,00	22.627.520.103,00	22.714.525.569,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.056.637.043,00	21.572.524.819,00	21.457.166.655,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.712.734.200,00	5.425.460.364,00	5.022.734.200,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.712.734.200,00	5.425.460.364,00	5.022.734.200,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.642.734.200,00	5.355.460.364,00	4.952.734.200,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.020.000.000,00	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.220.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.220.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	800.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	320.000.000,00	180.000.000,00	232.400.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	143.298.800,00	31.972.000,00	31.972.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	143.298.800,00	31.972.000,00	31.972.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	176.701.200,00	148.028.000,00	200.428.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.701.200,00	148.028.000,00	200.428.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.003.902.843,00	14.397.064.455,00	14.632.032.455,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.993.694.493,00	13.357.749.616,00	13.446.549.616,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.797.374.493,00	13.204.389.616,00	13.204.389.616,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.320.000,00	153.360.000,00	242.160.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.800.000,00	29.200.000,00	40.368.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.800.000,00	29.200.000,00	40.368.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.042.900,00	448.879.000,00	460.131.473,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.479.000,00	6.479.000,00	6.479.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.093.100,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.448.400,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	32.400.000,00	43.652.473,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.692.400,00	3.880.000,00	3.880.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.330.000,00	376.120.000,00	376.120.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	369.269.978,00	386.513.022,00	472.556.504,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	13.930.701,00	13.930.701,00	64.974.183,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.063.182,00	29.706.226,00	64.706.226,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.276.095,00	342.876.095,00	342.876.095,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.058.299.671,00	125.516.445,00	163.220.490,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118.049.410,00	75.000.000,00	112.704.045,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.516.445,00	50.516.445,00	50.516.445,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.889.733.816,00	0,00	0,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.795.801,00	49.206.372,00	49.206.372,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.822.515,00	13.822.515,00	13.822.515,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.383.857,00	15.383.857,00	15.383.857,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.589.429,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.145.995.284,00	1.054.995.284,00	1.257.358.914,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	448.995.284,00	448.995.284,00	551.358.914,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	448.995.284,00	448.995.284,00	551.358.914,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	448.995.284,00	448.995.284,00	551.358.914,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	626.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	201.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	201.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	425.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	425.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	30.000.000,00	130.000.000,00	230.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	115.000.000,00	215.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	15.000.000,00	115.000.000,00	215.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.3.27.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.706.705.858,00	8.374.929.746,00	7.884.335.482,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.495.000.000,00	1.654.000.000,00	865.716.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.495.000.000,00	1.654.000.000,00	865.716.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	300.000.000,00	484.000.000,00	512.450.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	484.000.000,00	512.450.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	300.000.000,00	484.000.000,00	512.450.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.095.000.000,00	1.070.000.000,00	253.266.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.095.000.000,00	1.070.000.000,00	253.266.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.095.000.000,00	1.070.000.000,00	253.266.680,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.211.705.858,00	6.720.929.746,00	7.018.618.802,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.211.705.858,00	6.720.929.746,00	7.018.618.802,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	450.000.000,00	346.257.254,00	396.257.254,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00	199.205.800,00	99.205.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	199.205.800,00	99.205.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,00	147.051.454,00	297.051.454,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,00	147.051.454,00	297.051.454,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100.000.000,00	512.574.822,00	637.574.822,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	512.574.822,00	637.574.822,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	512.574.822,00	637.574.822,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.661.705.858,00	5.862.097.670,00	5.984.786.726,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.912.374.574,00	4.612.454.460,00	4.735.143.516,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.721.454.574,00	4.419.494.460,00	4.542.183.516,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190.920.000,00	192.960.000,00	192.960.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.063.022,00	719.904.359,38	719.904.359,38
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	16.912.556,00	16.912.556,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	20.919.209,00	20.919.209,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	36.134.000,00	36.134.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.063.022,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	300.008.400,00	300.008.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	343.530.194,38	343.530.194,38
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.025.732,00	116.588.937,00	116.588.937,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	37.551.040,00	37.551.040,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.517.734,00	70.049.265,00	70.049.265,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	8.988.632,00	8.988.632,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.010.507.998,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.242.530,00	368.499.913,62	368.499.913,62
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.242.530,00	5.242.530,00	5.242.530,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	19.460.000,00	19.460.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	343.797.383,62	343.797.383,62
4.01.2.23.2.24.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH	53.010.733.386,00	41.906.457.763,00	50.138.344.095,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	53.010.733.386,00	41.906.457.763,00	50.138.344.095,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	53.010.733.386,00	41.906.457.763,00	50.138.344.095,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.333.793.054,00	7.276.624.296,00	9.659.091.118,93
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	460.768.924,00	422.366.374,00	502.363.624,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	304.843.724,00	266.478.874,00	266.465.874,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	155.925.200,00	155.887.500,00	235.897.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.811.876.430,00	5.800.181.222,00	7.990.181.222,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.747.934.000,00	2.770.298.000,00	4.035.864.320,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.063.942.430,00	3.029.883.222,00	3.954.316.902,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.061.147.700,00	1.054.076.700,00	1.166.546.272,93
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	335.144.700,00	335.144.700,00	537.867.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	592.538.000,00	585.467.000,00	458.115.572,93
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	133.465.000,00	133.465.000,00	170.563.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.851.172.041,00	1.851.172.041,00	2.600.050.675,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	340.853.110,00	340.853.110,00	340.853.110,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	134.608.750,00	134.608.750,00	134.608.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	206.244.360,00	206.244.360,00	206.244.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	620.715.900,00	620.715.900,00	620.715.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	32.085.000,00	32.085.000,00	32.085.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	500.191.200,00	500.191.200,00	500.191.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	88.439.700,00	88.439.700,00	88.439.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	743.853.031,00	743.853.031,00	1.492.731.665,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	325.449.456,00	325.449.456,00	221.788.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	261.203.875,00	261.203.875,00	1.034.767.105,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	157.199.700,00	157.199.700,00	236.176.560,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	145.750.000,00	145.750.000,00	145.750.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	48.350.000,00	48.350.000,00	48.350.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.825.768.291,00	32.778.661.426,00	37.879.202.301,07

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.211.460.147,00	26.155.372.658,00	26.296.550.996,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.210.671.207,00	25.352.476.658,00	25.493.654.996,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	788.940,00	802.896.000,00	802.896.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.366.200,00	30.978.650,00	61.957.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	104.366.200,00	30.978.650,00	61.957.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.758.662.676,00	1.957.156.294,06	4.855.966.174,41
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	323.193.255,00	88.243.160,00	88.243.160,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.879.421,00	210.879.421,00	160.329.297,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000,00	44.984.079,00	44.984.079,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.197.825.000,00	495.389.750,00	1.346.722.529,41
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.765.000,00	197.832.300,00	197.832.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.100.000.000,00	263.320.000,00	1.012.024.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.576.000.000,00	656.507.584,06	2.005.830.809,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	514.571.644,00	359.470.427,00	274.788.344,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	514.571.644,00	359.470.427,00	274.788.344,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.043.997.352,00	1.782.814.400,00	1.688.919.868,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	233.489.760,00	233.489.760,00	139.595.228,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.549.324.640,00	1.549.324.640,00	1.549.324.640,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.261.182.952,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.355.408,00	775.486.236,00	1.614.077.118,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.750.120,00	410.593.130,00	410.593.130,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.350.000,00	120.350.000,00	120.350.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	608.255.288,00	244.543.106,00	1.083.133.988,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	624.928.590,00	318.838.480,00	611.664.020,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	194.913.655,00	8.112.320,00	177.988.160,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	110.000.000,00	96.288.660,00	113.675.860,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.014.935,00	194.437.500,00	300.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	480.744.000,00	265.964.000,00	411.855.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	102.744.000,00	102.744.000,00	102.744.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	220.000.000,00	5.220.000,00	151.111.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	370.086.781,00	494.984.787,94	614.984.787,66
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	82.528.381,00	112.912.820,94	216.100.820,94
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87.279.610,00	281.994.579,00	289.044.579,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.278.790,00	100.077.388,00	109.839.387,72
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	637.595.493,00	637.595.493,00	1.448.438.493,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	255.110.000,00	255.110.000,00	652.900.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	228.308.000,00	228.308.000,00	355.190.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	154.177.493,00	154.177.493,00	440.348.493,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DPRD	38.950.697.025,00	24.744.492.561,00	35.974.533.197,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	38.950.697.025,00	24.744.492.561,00	35.974.533.197,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.881.726.721,00	5.632.017.740,00	15.598.635.187,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.128.599.713,00	1.137.323.317,00	2.670.117.028,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.702.969.900,00	711.693.868,00	2.147.687.529,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	425.629.813,00	425.629.449,00	522.429.499,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.219.705.300,00	302.423.000,00	914.766.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	180.242.500,00	18.280.000,00	124.010.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	183.229.400,00	16.250.000,00	69.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	446.224.400,00	255.393.000,00	360.878.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	410.009.000,00	12.500.000,00	360.878.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.440.291.251,00	2.075.433.042,00	3.287.750.449,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.424.000.000,00	653.266.000,00	1.011.480.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	618.036.240,00	420.000.000,00	420.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	407.115.615,00	407.115.306,00	576.012.649,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	991.139.396,00	595.051.736,00	1.280.257.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.703.741.500,00	960.266.526,00	3.170.181.452,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.292.722.200,00	290.582.960,00	1.266.100.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	600.574.400,00	35.700.000,00	355.478.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.810.444.900,00	633.983.566,00	1.548.603.452,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	4.389.388.957,00	1.156.571.855,00	5.555.820.258,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.800.770.000,00	714.113.559,00	3.035.721.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.588.618.957,00	442.458.296,00	2.520.099.258,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.068.970.304,00	19.112.474.821,00	20.375.898.010,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.153.431,00	79.485.900,00	96.736.100,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.248.037,00	33.837.500,00	44.648.100,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.240.502,00	1.229.100,00	1.579.100,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.174.924,00	1.523.000,00	1.612.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.389.419,00	1.614.800,00	1.614.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.035.773,00	1.030.000,00	1.030.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.392.531,00	38.878.000,00	44.878.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.672.245,00	1.373.500,00	1.373.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.337.899.306,00	6.138.414.110,00	6.139.168.910,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.160.291.983,00	5.930.652.610,00	5.930.652.610,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.446.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.161.323,00	761.500,00	1.516.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.556.538,00	10.678.000,00	148.224.456,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	118.617.858,00	0,00	55.584.456,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	164.938.680,00	10.678.000,00	92.640.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.547.256.584,00	362.784.454,00	850.283.068,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.427.870,00	8.381.976,00	30.396.140,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	838.848.324,00	136.398.466,00	443.768.531,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.877.568,00	22.114.080,00	41.959.172,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.841.452,00	65.293.960,00	75.178.930,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.137.110,00	1.151.677,00	10.200.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000,00	2.654.295,00	2.654.295,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.311.000,00	11.900.000,00	41.420.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.663.260,00	114.890.000,00	204.706.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.305.600,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.305.600,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.476.266.253,00	217.993.351,00	365.862.503,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	134.924.819,00	67.617.590,00	147.994.742,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.382.466,00	150.375.761,00	217.867.761,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.162.958.968,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.246.434,00	192.020.918,00	295.345.872,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	68.188.469,00	43.330.000,00	43.330.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.591.900,00	28.450.000,00	54.730.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.466.065,00	120.240.918,00	197.285.872,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.256.459.258,00	11.899.099.520,00	11.961.713.125,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.149.113.520,00	11.149.113.520,00	11.045.924.125,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	456.345.738,00	165.858.000,00	288.949.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	651.000.000,00	584.128.000,00	626.840.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	326.826.900,00	211.998.568,00	518.563.976,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	123.127.857,00	8.300.000,00	8.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	203.699.043,00	203.698.568,00	510.263.976,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.686.795.791,00	14.338.327.502,00	16.538.327.502,25
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	15.686.795.791,00	14.338.327.502,00	16.538.327.502,25
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	14.966.795.791,00	13.905.111.967,00	14.729.212.889,25
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.518.491.185,00	1.645.651.850,00	2.371.867.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.334.574.585,00	1.311.735.250,00	2.126.067.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	3.880.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	227.869.500,00	427.869.500,00	426.101.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	54.180.000,00	54.180.000,00	44.972.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.041.275.085,00	818.435.750,00	1.651.113.360,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.172.000,00	90.172.000,00	93.284.420,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	40.172.000,00	90.172.000,00	93.284.420,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	143.744.600,00	243.744.600,00	152.515.580,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	143.744.600,00	243.744.600,00	152.515.580,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	956.180.510,00	898.830.710,00	816.363.635,13
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	515.685.200,00	435.685.400,00	382.048.515,13
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.926.000,00	124.926.000,00	123.998.174,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	45.734.800,00	45.734.800,00	38.080.404,13
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	56.875.000,00	16.875.200,00	16.875.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.576.000,00	135.576.000,00	125.431.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86.198.400,00	86.198.400,00	45.630.437,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.375.000,00	26.375.000,00	32.033.300,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185.954.810,00	178.604.810,00	179.548.310,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.667.500,00	43.792.000,00	43.792.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.792.000,00	9.317.500,00	10.261.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.410.000,00	14.410.000,00	14.410.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.918.310,00	43.792.000,00	43.792.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	43.792.000,00	54.918.310,00	54.918.310,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	254.540.500,00	284.540.500,00	254.766.810,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.721.800,00	149.721.800,00	149.721.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.692.000,00	62.692.000,00	32.899.110,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	48.675.000,00	18.675.000,00	18.675.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.896.700,00	2.975.000,00	12.056.810,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.975.000,00	19.896.700,00	10.834.090,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.580.000,00	30.580.000,00	30.580.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.492.124.096,00	11.360.629.407,00	11.540.982.054,12
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	791.010.745,00	1.149.261.118,00	1.187.483.544,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	432.165.700,00	1.027.670.573,00	1.062.462.544,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	358.845.045,00	121.590.545,00	125.021.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.760.119.417,00	7.984.958.354,00	7.935.317.462,53
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.373.159.417,00	7.597.998.354,00	7.598.037.462,53
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	306.960.000,00	306.960.000,00	257.280.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.036.000,00	210.225.133,00	215.689.893,59

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	159.380.000,00	79.689.893,00	79.689.893,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.656.000,00	130.535.240,00	136.000.000,59
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.059.942.959,00	1.121.255.994,00	1.116.466.792,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.192.130,00	67.169.697,00	35.316.885,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.794.279,00	117.938.773,00	106.032.902,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.516.936,00	41.516.933,00	33.266.731,01
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.124.762,00	131.241.684,00	123.176.067,99
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.529.852,00	69.603.907,00	99.668.206,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	683.785.000,00	683.785.000,00	642.006.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	136.000.000,00	0,00	72.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.548.661.161,00	633.255.930,00	800.654.384,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	0,00	154.460.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	652.156.798,00	302.061.878,00	343.835.423,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	496.504.363,00	331.194.052,00	302.358.961,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.978.315.794,00	147.634.858,00	189.081.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000,00	27.000.000,00	14.130.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.634.858,00	120.634.858,00	174.951.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.830.680.936,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.038.020,00	114.038.020,00	96.288.178,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.038.020,00	78.038.020,00	60.868.178,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000,00	0,00	0,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	35.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	720.000.000,00	433.215.535,00	1.809.114.613,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	720.000.000,00	433.215.535,00	1.809.114.613,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	135.000.000,00	128.526.000,00	135.142.813,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	135.000.000,00	128.526.000,00	135.142.813,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	585.000.000,00	304.689.535,00	1.673.971.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	385.000.000,00	119.679.250,00	1.556.800.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	200.000.000,00	185.010.285,00	117.171.800,00
5.02.0.00.0.00.01.0000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	181.018.395.343,00	104.696.699.263,04	145.343.397.673,51
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	181.018.395.343,00	104.696.699.263,04	145.343.397.673,51
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	151.712.521.623,00	78.221.571.812,04	119.099.484.722,52
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.132.225.130,00	2.287.319.675,00	2.362.684.675,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	61.410.860,00	47.557.750,00	47.557.750,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.700.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	13.800.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.800.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	64.351.150,00	40.557.425,00	40.557.425,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	54.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	800.900.000,00	772.122.000,00	772.122.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	733.732.000,00	729.942.000,00	729.942.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	757.933.920,00	364.280.500,00	439.645.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	191.459.500,00	263.860.000,00	263.860.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	122.167.500,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	52.736.100,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	214.634.100,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	362.641.000,00	374.912.000,00	374.912.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	247.525.000,00	181.912.000,00	181.912.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	115.116.000,00	193.000.000,00	193.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	793.696.560,00	780.297.000,00	1.011.511.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	84.658.800,00	84.605.000,00	84.605.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	414.402.000,00	414.402.000,00	386.152.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	187.784.000,00	187.784.000,00	161.384.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	88.090.000,00	93.506.000,00	93.506.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	18.761.760,00	0,00	285.864.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	146.450.997.973,00	73.556.490.237,04	114.194.327.647,52
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000,00	839.342.158,04	8.981.012.988,52
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	144.450.997.973,00	72.717.148.079,00	105.213.314.659,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	972.960.960,00	1.222.552.900,00	1.156.048.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	972.960.960,00	1.222.552.900,00	1.156.048.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.744.407.800,00	1.862.457.440,00	1.814.301.440,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.744.407.800,00	1.862.457.440,00	1.814.301.440,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	766.119.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	209.108.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	780.441.600,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.299.810.600,00	705.384.000,00	689.332.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	270.282.300,00	446.788.440,00	446.788.440,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	559.726.700,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	280.607.600,00	462.432.000,00	462.432.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	578.312.000,00	247.853.000,00	215.749.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	692.296.700,00	584.466.659,00	584.466.659,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	692.296.700,00	584.466.659,00	584.466.659,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	85.429.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	173.950.200,00	102.058.000,00	102.058.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	146.086.000,00	291.975.078,00	291.975.078,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	179.007.000,00	107.879.601,00	107.879.601,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	107.824.500,00	82.553.980,00	82.553.980,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.869.169.220,00	24.028.203.352,00	23.845.144.851,99
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.259.000,00	29.201.000,00	29.201.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.634.000,00	27.351.000,00	27.351.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.625.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.565.115.566,00	22.437.175.735,00	22.254.117.234,99
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.741.132.308,00	21.691.327.735,00	21.598.269.234,99
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	817.920.000,00	744.648.000,00	654.648.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.063.258,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.397.040,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	218.603.040,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	196.794.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.062.544.366,00	682.611.455,00	682.611.455,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	136.762.118,00	63.333.033,00	63.333.033,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.760.248,00	106.731.122,00	106.731.122,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.990.000,00	91.761.300,00	91.761.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.432.000,00	374.586.000,00	374.586.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	798.268.638,00	393.732.909,36	393.732.909,36
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.329.900,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.636.293,00	168.430.464,00	168.430.464,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.302.445,00	225.302.445,36	225.302.445,36
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.687.013.110,00	254.590.752,64	254.590.752,64
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.679.600,00	108.612.994,64	108.612.994,64
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.675.326,00	145.977.758,00	145.977.758,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.417.658.184,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.571.500,00	230.891.500,00	230.891.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.047.500,00	76.367.500,00	76.367.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.430.000,00	54.430.000,00	54.430.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.094.000,00	100.094.000,00	100.094.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43.496.285.849,00	9.339.383.006,00	9.664.383.006,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	41.288.771.649,00	8.461.382.194,00	8.720.007.194,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.412.896.887,00	1.126.886.052,00	1.326.885.472,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	952.004.287,00	337.170.541,00	387.170.541,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	452.255.518,00	278.722.541,00	278.722.541,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	99.950.000,00	0,00	50.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	399.798.769,00	58.448.000,00	58.448.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	923.922.600,00	461.097.100,00	611.096.520,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	626.601.000,00	260.156.100,00	410.155.520,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	297.321.600,00	200.941.000,00	200.941.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	93.584.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	93.584.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	443.386.000,00	268.618.411,00	268.618.411,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	186.398.000,00	76.154.500,00	76.154.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	256.988.000,00	192.463.911,00	192.463.911,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.875.874.762,00	7.334.496.142,00	7.393.121.722,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.054.903,00	5.400.000,00	5.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.054.903,00	4.650.000,00	4.650.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.403.712.354,00	6.890.355.135,98	6.890.355.135,98
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.228.656.354,00	6.728.619.135,98	6.728.619.135,98
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.056.000,00	161.736.000,00	161.736.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.426.859,00	338.855.857,82	397.481.437,82
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.694.896,00	639.903,00	639.903,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.570.028,00	34.210.770,82	34.210.770,82
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.729.230,00	3.690.776,00	3.690.776,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.888.390,00	8.105.408,00	16.210.816,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.154.000,00	6.196.000,00	6.196.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000,00	3.360.000,00	4.916.172,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.190.315,00	282.653.000,00	331.617.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.429.727,00	78.290.465,20	78.290.465,20
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.533.940,00	43.629.216,00	43.629.216,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	14.371.290,00	7.535.280,00	7.535.280,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.021.328,00	10.622.800,00	10.622.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.503.169,00	16.503.169,20	16.503.169,20
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.220.844,00	8.356.400,00	8.356.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.450.000,00	3.956.400,00	3.956.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.011.500,00	4.400.000,00	4.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.759.344,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.030.075,00	13.238.283,00	13.238.283,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.350.075,00	10.398.283,00	10.398.283,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.207.514.200,00	878.000.812,00	944.375.812,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.207.514.200,00	878.000.812,00	944.375.812,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.207.514.200,00	878.000.812,00	944.375.812,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.207.514.200,00	878.000.812,00	944.375.812,00
5.06.0.00.0.00.04.0000						BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4.055.698.085,00	4.262.734.981,00	4.262.734.981,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN	4.055.698.085,00	4.262.734.981,00	4.262.734.981,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	295.915.642,00	298.356.625,00	298.056.625,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	107.580.535,00	101.954.730,00	101.954.730,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	107.580.535,00	101.954.730,00	101.954.730,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	77.663.137,00	89.836.045,00	89.836.045,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.02	0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	77.663.137,00	89.836.045,00	89.836.045,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	110.671.970,00	106.565.850,00	106.265.850,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	02	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	110.671.970,00	106.565.850,00	106.265.850,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.759.782.443,00	3.964.378.356,00	3.964.678.356,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.805.393.946,00	3.126.160.606,00	3.126.160.606,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.670.319.246,00	2.994.120.606,00	2.994.120.606,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112.440.000,00	112.440.000,00	112.440.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.634.700,00	19.600.000,00	19.600.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.308.000,00	7.308.000,00	7.308.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.308.000,00	7.308.000,00	7.308.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	65.735.707,00	65.735.707,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000,00	65.735.707,00	65.735.707,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.234.430,00	403.970.145,00	404.270.145,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	5.015.164,00	5.015.164,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.090.625,00	10.866.517,00	10.866.517,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.480.000,00	25.041.630,00	50.147.720,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.457.805,00	11.179.000,00	18.378.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.206.000,00	351.867.834,00	319.862.744,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.712.153,00	247.448.636,00	247.448.636,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.614.000,00	32.292.080,00	32.292.080,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	40.988.859,00	35.547.330,00	35.547.330,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.953.454,00	85.074.378,00	85.074.378,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.155.840,00	94.534.848,00	94.534.848,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.281.264,00	68.916.162,00	68.916.162,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.971.800,00	35.427.162,00	35.427.162,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.545.000,00	33.489.000,00	33.489.000,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.764.464,00	0,00	0,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.352.650,00	14.839.100,00	14.839.100,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.232.650,00	9.599.100,00	9.599.100,00
5.06.0.00.0.00.04.0000	5	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						INSPEKTORAT DAERAH	21.628.867.075,00	13.837.001.351,00	15.337.001.351,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.628.867.075,00	13.837.001.351,00	15.337.001.351,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	21.628.867.075,00	13.837.001.351,00	15.337.001.351,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.282.500.152,00	1.443.669.073,00	2.222.269.634,13
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.697.500.152,00	1.193.732.923,00	1.849.781.484,13
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	175.000.000,00	63.056.500,00	400.426.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	185.000.000,00	119.899.432,00	119.899.432,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	200.000.000,00	102.723.400,00	102.723.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	150.000.000,00	112.972.400,00	112.972.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	350.000.000,00	379.990.500,00	476.260.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	354.000.000,00	218.890.691,00	354.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	283.500.152,00	196.200.000,00	283.500.152,13
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	585.000.000,00	249.936.150,00	372.488.150,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	235.000.000,00	22.488.150,00	22.488.150,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	350.000.000,00	227.448.000,00	350.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.443.409.610,00	915.403.635,13	1.261.867.532,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	260.000.000,00	20.856.351,00	165.083.833,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	120.000.000,00	20.856.351,00	20.856.351,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	140.000.000,00	0,00	144.227.482,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	1.183.409.610,00	894.547.284,13	1.096.783.699,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	185.300.000,00	119.521.240,00	185.300.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	175.000.000,00	126.492.000,00	126.492.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	673.109.610,00	587.712.044,13	673.109.610,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	150.000.000,00	60.822.000,00	111.882.089,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.902.957.313,00	11.477.928.642,87	11.852.864.184,87
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.499.998,00	53.513.160,00	53.513.160,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	53.513.160,00	53.513.160,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.998,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.975.000.000,00	9.892.181.931,77	9.892.181.931,77
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.625.000.000,00	9.775.438.831,77	9.775.438.831,77
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000,00	73.860.000,00	73.860.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000,00	42.883.100,00	42.883.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.688.335,00	606.567.200,00	606.567.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.001,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	310.688.334,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.000.000,00	56.567.200,00	56.567.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.207.269.131,00	658.714.934,00	658.714.934,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	2.950.437,00	2.950.437,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.192.957.465,00	89.187.578,00	89.187.578,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	4.598.419,00	4.598.419,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	5.061.776,00	5.061.776,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	37.376.740,00	37.376.740,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000.000,00	35.240.000,00	35.240.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.311.666,00	484.299.984,00	484.299.984,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.527.499.848,00	53.723.591,00	428.659.133,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.272.499.848,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	275.000.000,00	0,00	172.163.024,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.000.000,00	0,00	202.772.518,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	320.000.000,00	53.723.591,00	53.723.591,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.590.000.000,00	13.308.518,00	13.308.518,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	4.828.518,00	4.828.518,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.000.001,00	162.491.308,10	162.491.308,10
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	8.160.240,00	8.160.240,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,00	34.730.000,00	34.730.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	119.601.068,10	119.601.068,10
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.001,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						KECAMATAN SIANTAN	5.711.778.418,00	6.024.049.235,00	6.024.049.235,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	5.711.778.418,00	6.024.049.235,00	6.024.049.235,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	5.711.778.418,00	6.024.049.235,00	6.024.049.235,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.675.904.409,00	1.402.715.389,00	1.402.715.389,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.675.904.409,00	1.402.715.389,00	1.402.715.389,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.675.904.409,00	1.402.715.389,00	1.402.715.389,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.614.088,00	55.614.088,00	55.614.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.614.088,00	55.614.088,00	55.614.088,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.614.088,00	55.614.088,00	55.614.088,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	125.197.023,00	90.524.065,00	90.524.065,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.197.023,00	90.524.065,00	90.524.065,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.677.900,00	33.677.900,00	33.677.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.749.892,00	10.749.892,00	10.749.892,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	80.769.231,00	46.096.273,00	46.096.273,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.855.062.898,00	4.475.195.693,00	4.475.195.693,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.834.986,00	19.507.944,00	19.507.944,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.566.386,00	16.239.344,00	16.239.344,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.268.600,00	3.268.600,00	3.268.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.875.573.438,00	4.129.669.478,00	4.129.669.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.678.451.038,00	3.937.467.078,00	3.937.467.078,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.076.000,00	189.156.000,00	189.156.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.046.400,00	3.046.400,00	3.046.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.637.131,00	4.637.131,00	4.637.131,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.570.131,00	1.570.131,00	1.570.131,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.371.000,00	44.399.000,00	44.399.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.650.000,00	10.678.000,00	10.678.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.627.399,00	153.290.399,00	153.290.399,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.938.600,00	4.938.600,00	4.938.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.551.399,00	10.551.399,00	10.551.399,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.217.400,00	18.217.400,00	18.217.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.497.000,00	85.160.000,00	85.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.418.746,00	6.773.001,00	6.773.001,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.318.746,00	6.673.001,00	6.673.001,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.900.198,00	79.218.740,00	79.218.740,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.065.420,00	33.065.420,00	33.065.420,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.072.300,00	46.153.320,00	46.153.320,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.762.478,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.700.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01						KELURAHAN TAREMPA	2.148.547.051,00	2.233.529.796,00	2.233.529.796,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.969.040.628,00	2.030.487.944,00	2.030.487.944,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.969.040.628,00	2.030.487.944,00	2.030.487.944,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.482.500,00	10.482.500,00	10.482.500,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34.365.000,00	34.365.000,00	34.365.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.924.193.128,00	1.985.640.444,00	1.985.640.444,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.506.423,00	203.041.852,00	203.041.852,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.901.230,00	103.168.906,00	103.168.906,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.481.273,00	3.481.273,00	3.481.273,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.977.782,00	19.845.458,00	19.845.458,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.522.175,00	16.922.175,00	16.922.175,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.220.000,00	33.220.000,00	33.220.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.700.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.987.152,00	19.987.152,00	19.987.152,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.987.152,00	19.987.152,00	19.987.152,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.158.041,00	65.425.794,00	65.425.794,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.544.876,00	47.850.858,00	47.850.858,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.613.165,00	17.574.936,00	17.574.936,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.460.000,00	14.460.000,00	14.460.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.01	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						KECAMATAN JEMAJA	6.425.891.604,00	5.888.535.016,00	6.188.535.016,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	252.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	252.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	252.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	686.840.000,00	303.858.772,00	633.858.772,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	310.840.000,00	265.215.360,00	595.215.360,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	310.840.000,00	265.215.360,00	595.215.360,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	376.000.000,00	38.643.412,00	38.643.412,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	376.000.000,00	38.643.412,00	38.643.412,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.084.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.084.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.084.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.363.000,00	61.812.400,00	61.812.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.363.000,00	61.812.400,00	61.812.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40.084.500,00	60.562.400,00	60.562.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.278.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.520.000,00	70.270.000,00	70.270.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.520.000,00	70.270.000,00	70.270.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.250.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.270.000,00	12.270.000,00	12.270.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.364.084.104,00	5.399.343.844,00	5.369.343.844,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.256.000,00	11.777.000,00	11.777.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.283.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.009.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.842.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.451.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.321.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.482.000,00	293.500,00	293.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.868.000,00	1.543.500,00	1.543.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.843.232.689,00	4.919.012.865,00	4.919.012.865,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.565.489,00	4.731.887.865,00	4.731.887.865,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.380.000,00	178.440.000,00	178.440.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.843.000,00	5.843.000,00	5.843.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.444.200,00	2.842.000,00	2.842.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.500.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.937.000,00	43.854.000,00	43.854.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.739.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.198.000,00	37.104.000,00	37.104.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.583.228,00	302.744.522,00	272.744.522,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.009.200,00	5.000.890,00	5.000.890,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.009.640,00	40.709.895,00	10.709.895,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.335.500,00	8.023.773,00	8.023.773,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.228.888,00	35.502.840,00	35.502.840,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	12.503.124,00	12.503.124,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000,00	175.504.000,00	175.504.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	35.990.306,00	35.990.306,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	35.990.306,00	35.990.306,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.117.065.187,00	59.635.151,00	59.635.151,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	47.892.763,00	47.892.763,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.742.811,00	11.742.388,00	11.742.388,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.070.322.376,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.510.000,00	15.850.000,00	15.850.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000,00	4.890.000,00	4.890.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.010.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01						KELURAHAN LETUNG	881.452.428,00	881.452.428,00	881.452.428,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	732.634.700,00	732.634.700,00	732.634.700,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	732.634.700,00	732.634.700,00	732.634.700,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.184.700,00	5.184.700,00	5.184.700,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	527.450.000,00	527.450.000,00	527.450.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.817.728,00	148.817.728,00	148.817.728,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.118.000,00	102.118.000,00	102.118.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.020.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.998.928,00	26.998.928,00	26.998.928,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.998.928,00	6.998.928,00	6.998.928,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.700.800,00	19.700.800,00	19.700.800,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.01	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.820.800,00	9.820.800,00	9.820.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						KECAMATAN PALMATAK	5.571.567.194,00	5.800.958.785,00	5.800.958.785,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	300.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	300.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	587.284.270,00	655.776.154,00	655.776.154,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	587.284.270,00	655.776.154,00	655.776.154,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	587.284.270,00	655.776.154,00	655.776.154,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	265.297.075,00	195.125.504,00	195.125.504,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	265.297.075,00	195.125.504,00	195.125.504,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	264.297.075,00	195.125.504,00	195.125.504,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	117.841.000,00	55.526.000,00	55.526.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117.841.000,00	55.526.000,00	55.526.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23.592.000,00	26.802.000,00	26.802.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	94.249.000,00	28.724.000,00	28.724.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.301.144.849,00	4.894.531.127,00	4.894.531.127,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.721.553.186,00	4.459.472.672,00	4.459.472.672,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.953.186,00	4.356.752.672,00	4.356.752.672,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.600.000,00	102.720.000,00	102.720.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.760.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.760.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.679.204,00	197.078.339,00	197.078.339,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.622.546,00	6.514.285,00	6.514.285,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.613.658,00	18.955.724,00	18.955.724,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.306.330,00	3.306.330,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.883.000,00	66.450.000,00	66.450.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.560.000,00	101.852.000,00	101.852.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	78.143.234,00	78.143.234,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	78.143.234,00	78.143.234,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.392.152.459,00	128.196.882,00	128.196.882,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.695.971,00	84.762.882,00	84.762.882,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.268.000,00	43.434.000,00	43.434.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.188.488,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						KECAMATAN SIANTAN TIMUR	3.851.777.086,00	3.601.777.086,00	3.601.777.086,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	500.000.000,00	581.279.376,01	581.279.376,01

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	500.000.000,00	581.279.376,01	581.279.376,01
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	500.000.000,00	581.279.376,01	581.279.376,01
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	515.023.194,00	181.333.828,00	181.333.828,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	515.023.194,00	181.333.828,00	181.333.828,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	515.023.194,00	181.333.828,00	181.333.828,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	160.866.011,00	112.074.120,00	112.074.120,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160.866.011,00	112.074.120,00	112.074.120,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.696.400,00	24.704.120,00	24.704.120,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	132.169.611,00	87.370.000,00	87.370.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.675.887.881,00	2.727.089.761,99	2.727.089.761,99
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.208.300,00	8.250.000,00	8.250.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.364.800,00	3.750.000,00	3.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.843.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.748.023.335,00	2.309.536.481,00	2.309.536.481,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.652.463.335,00	2.212.936.481,00	2.212.936.481,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.560.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.600.000,00	17.424.000,00	17.424.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.600.000,00	17.424.000,00	17.424.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.080.300,00	329.018.285,00	329.018.285,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.249.100,00	8.042.474,00	8.042.474,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	131.138.819,00	131.138.819,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.180.200,00	54.909.992,00	54.909.992,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.750.000,00	33.950.000,00	33.950.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.901.000,00	100.977.000,00	100.977.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.975.946,00	62.860.995,99	62.860.995,99
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.790.800,00	50.587.995,99	50.587.995,99
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.712.000,00	12.273.000,00	12.273.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.473.146,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						KECAMATAN SIANTAN SELATAN	3.397.684.073,00	3.147.684.073,00	3.147.684.073,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	370.000.000,00	386.655.896,00	386.655.896,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	270.000.000,00	286.655.896,00	286.655.896,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	270.000.000,00	286.655.896,00	286.655.896,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	195.000.000,00	180.230.256,00	180.230.256,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	195.000.000,00	180.230.256,00	180.230.256,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	145.000.000,00	160.880.256,00	160.880.256,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	19.350.000,00	19.350.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	240.000.000,00	106.539.120,00	106.539.120,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240.000.000,00	106.539.120,00	106.539.120,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	50.000.000,00	15.722.280,00	15.722.280,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	190.000.000,00	90.816.840,00	90.816.840,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.592.684.073,00	2.474.258.801,00	2.474.258.801,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.617.484.073,00	1.925.484.073,00	1.925.484.073,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.518.484.073,00	1.832.484.073,00	1.832.484.073,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	25.439.140,00	25.439.140,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	25.439.140,00	25.439.140,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.000.000,00	244.562.323,00	244.562.323,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	11.990.260,00	11.990.260,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	57.244.373,00	57.244.373,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	11.956.743,00	11.956.743,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	11.799.547,00	11.799.547,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	2.111.400,00	2.111.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.000.000,00	128.760.000,00	128.760.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.000.000,00	114.005.830,00	114.005.830,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	80.000.000,00	68.572.016,00	68.572.016,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000,00	45.433.814,00	45.433.814,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.000.000,00	17.518.800,00	17.518.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	17.518.800,00	17.518.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	124.448.635,00	124.448.635,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	84.938.635,00	84.938.635,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.390.000,00	10.390.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	29.120.000,00	29.120.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						KECAMATAN JEMAJA TIMUR	3.936.897.306,00	3.686.897.306,00	3.686.897.306,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	265.515.400,00	226.877.837,32	226.877.837,32
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	265.515.400,00	226.877.837,32	226.877.837,32
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	265.515.400,00	226.877.837,32	226.877.837,32
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	151.500.000,00	142.147.550,00	142.147.550,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151.500.000,00	142.147.550,00	142.147.550,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	151.500.000,00	142.147.550,00	142.147.550,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.115.400,00	16.115.400,00	16.115.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.115.400,00	16.115.400,00	16.115.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.515.400,00	9.515.400,00	9.515.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.152.166.506,00	3.214.156.518,68	3.214.156.518,68
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.076.523,00	23.555.155,00	23.555.155,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.832.823,00	4.832.605,00	4.832.605,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.761.500,00	3.761.090,00	3.761.090,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.855.000,00	3.854.718,00	3.854.718,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.932.200,00	3.412.632,00	3.412.632,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.855.000,00	3.854.520,00	3.854.520,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.840.000,00	3.839.590,00	3.839.590,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.117.262.010,00	2.688.174.553,00	2.688.174.553,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.976.283.210,00	2.579.067.434,00	2.579.067.434,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.000.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.489.400,00	2.527.023,00	2.527.023,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.489.400,00	2.780.096,00	2.780.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.565.110,00	10.105.100,00	10.105.100,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.565.110,00	10.105.100,00	10.105.100,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.700.000,00	89.228.115,90	89.228.115,90
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	118.700.000,00	89.228.115,90	89.228.115,90
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.150.935,00	384.598.214,78	384.598.214,78

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.219.000,00	162.857.649,78	162.857.649,78
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.617.235,00	16.576.060,00	16.576.060,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.074.700,00	26.047.005,00	26.047.005,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.740.000,00	9.715.500,00	9.715.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	134.902.000,00	134.902.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.856.224,00	12.072.000,00	12.072.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.072.000,00	12.072.000,00	12.072.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.784.224,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.555.704,00	6.423.380,00	6.423.380,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.987.704,00	4.890.000,00	4.890.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.568.000,00	1.533.380,00	1.533.380,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						KECAMATAN SIANTAN TENGAH	4.037.858.600,00	3.837.858.600,00	3.837.858.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	219.950.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	219.950.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	219.950.000,00	21.050.000,00	21.050.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000,00	340.225.000,00	340.225.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	350.000.000,00	340.225.000,00	340.225.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	245.000.000,00	235.225.000,00	235.225.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000,00	12.252.000,00	12.252.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000,00	12.252.000,00	12.252.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.000.000,00	12.252.000,00	12.252.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	155.000.000,00	113.913.282,00	113.913.282,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	155.000.000,00	113.913.282,00	113.913.282,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	125.000.000,00	113.913.282,00	113.913.282,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.526.500,00	64.388.950,00	64.388.950,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.526.500,00	64.388.950,00	64.388.950,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.526.500,00	14.026.950,00	14.026.950,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50.000.000,00	50.362.000,00	50.362.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.211.382.100,00	3.286.029.368,00	3.286.029.368,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.097.780,00	34.494.200,00	34.494.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.135.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.280.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.663.960,00	8.624.600,00	8.624.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.663.960,00	3.649.600,00	3.649.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.664.860,00	5.720.000,00	5.720.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.877.048.549,00	2.814.203.573,00	2.814.203.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.754.992.549,00	2.704.547.573,00	2.704.547.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112.056.000,00	109.656.000,00	109.656.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.286.874,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.286.874,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.698.000,00	61.472.190,00	61.472.190,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	61.472.190,00	61.472.190,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.198.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.971.873,00	223.618.026,00	223.618.026,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.265.702,00	7.046.968,00	7.046.968,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	54.155.900,00	54.155.900,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.618.401,00	8.776.628,00	8.776.628,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.667.970,00	10.118.430,00	10.118.430,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.983.800,00	7.400.100,00	7.400.100,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.750.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.686.000,00	89.920.000,00	89.920.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	79.159.179,00	79.159.179,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	59.946.349,00	59.946.349,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.212.830,00	19.212.830,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	982.579.024,00	26.452.200,00	26.452.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.024.000,00	26.452.200,00	26.452.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	949.555.024,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.700.000,00	46.630.000,00	46.630.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.330.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.370.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	25.480.000,00	25.480.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000						KECAMATAN SIANTAN UTARA	3.528.527.209,00	3.278.527.209,00	3.278.527.209,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	303.110.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	303.110.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	303.110.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	578.249.500,00	387.473.275,88	387.473.275,88
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	578.249.500,00	387.473.275,88	387.473.275,88
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	578.249.500,00	387.473.275,88	387.473.275,88
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	154.114.855,00	92.878.777,00	92.878.777,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	154.114.855,00	92.878.777,00	92.878.777,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	143.650.655,00	92.878.777,00	92.878.777,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.464.200,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.259.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.259.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.203.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	66.056.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.398.793.854,00	2.785.825.156,12	2.785.825.156,12
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.590.816.858,00	2.103.223.898,00	2.103.223.898,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.816.858,00	2.029.543.898,00	2.029.543.898,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.000.000,00	73.680.000,00	73.680.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.788.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.788.000,00	10.788.000,00	10.788.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.335.363,00	595.158.663,12	595.158.663,12
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.673.425,00	7.242.888,12	7.242.888,12
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.795.938,00	57.536.275,00	57.536.275,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.264.000,00	13.517.500,00	13.517.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.800.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.802.000,00	417.862.000,00	417.862.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.772.885,00	50.224.495,00	50.224.495,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.772.885,00	50.224.495,00	50.224.495,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.712.378,00	20.993.500,00	20.993.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.259.940,00	18.193.500,00	18.193.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.688.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.037.398,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.727.040,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.368.370,00	5.436.600,00	5.436.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.368.370,00	5.436.600,00	5.436.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						KECAMATAN JEMAJA BARAT	3.436.048.862,00	3.186.048.862,00	3.236.048.862,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.000.000,00	237.817.751,00	237.817.751,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	513.000.000,00	237.817.751,00	237.817.751,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	513.000.000,00	237.817.751,00	237.817.751,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	195.850.000,00	114.630.000,00	114.630.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	195.850.000,00	114.630.000,00	114.630.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	185.850.000,00	103.455.000,00	103.455.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	11.175.000,00	11.175.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.500.000,00	35.363.180,00	35.363.180,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.500.000,00	35.363.180,00	35.363.180,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27.500.000,00	28.741.180,00	28.741.180,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.689.698.862,00	2.798.237.931,00	2.848.237.931,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	38.014.414,00	38.014.414,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.350.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000,00	5.090.414,00	5.090.414,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	5.113.000,00	5.113.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.350.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.050.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.914.946.862,00	2.295.846.862,00	2.295.846.862,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.816.451.862,00	2.196.521.862,00	2.196.521.862,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.000.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.245.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.480.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.280.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	49.076.700,00	49.076.700,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	49.076.700,00	49.076.700,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.502.000,00	274.642.428,00	324.642.428,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000,00	28.461.538,00	28.461.538,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00	40.468.480,00	40.468.480,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000,00	5.274.410,00	5.274.410,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000,00	170.436.000,00	220.436.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000,00	86.221.223,00	86.221.223,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	34.229.476,00	34.229.476,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	51.991.747,00	51.991.747,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.270.000,00	24.371.088,00	24.371.088,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	24.371.088,00	24.371.088,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.070.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.500.000,00	26.615.216,00	26.615.216,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	10.058.864,00	10.058.864,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.500.000,00	16.556.352,00	16.556.352,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						KECAMATAN KUTE SIANTAN	4.737.474.330,00	4.628.364.930,00	4.338.813.736,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	530.286.616,00	364.707.960,00	192.403.096,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	530.286.616,00	364.707.960,00	192.403.096,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	19.660.000,00	17.090.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	490.286.616,00	345.047.960,00	175.313.096,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	123.234.500,00	119.406.000,00	65.322.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	123.234.500,00	119.406.000,00	65.322.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	123.234.500,00	119.406.000,00	65.322.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.232.854,00	134.852.000,00	116.528.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.232.854,00	134.852.000,00	116.528.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	67.232.854,00	85.460.000,00	84.760.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	49.392.000,00	31.768.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70.388.900,00	69.409.400,00	66.439.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.388.900,00	69.409.400,00	66.439.400,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.526.500,00	15.581.600,00	12.611.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	53.862.400,00	53.827.800,00	53.827.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.896.331.460,00	3.939.989.570,00	3.898.121.240,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.398.099,00	61.564.000,00	67.029.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.485.525,00	13.690.000,00	15.370.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.422.800,00	12.966.000,00	12.386.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.999.500,00	9.178.000,00	11.258.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.166.924,00	9.800.000,00	10.930.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.794.100,00	8.735.000,00	8.155.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.529.250,00	7.195.000,00	8.930.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.111.871.289,00	3.213.748.297,09	3.215.899.079,09
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.871.289,00	3.090.104.797,09	3.090.104.797,09

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.000.000,00	110.409.600,00	110.409.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	13.233.900,00	15.384.682,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.762.900,00	4.840.244,00	3.440.244,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.762.900,00	4.840.244,00	3.440.244,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.081.400,00	49.296.000,00	43.246.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.839.000,00	5.010.000,00	3.960.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	30.766.000,00	25.766.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.242.400,00	13.520.000,00	13.520.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.680.252,00	258.749.824,00	244.035.974,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.645.500,00	65.042.038,00	49.993.878,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.154.500,00	9.480.206,00	9.480.206,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.310.600,00	18.680.490,00	20.934.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.520.152,00	13.467.650,00	13.467.650,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.084.500,00	23.487.440,00	21.567.440,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.965.000,00	128.592.000,00	128.592.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.700.000,00	313.312.389,91	291.390.927,91
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	143.879.902,00	121.958.440,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.700.000,00	169.432.487,91	169.432.487,91
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.487.520,00	25.608.800,00	20.210.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.428.000,00	25.608.800,00	20.210.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.057.059.520,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.350.000,00	12.870.015,00	12.870.015,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.250.000,00	5.400.015,00	5.400.015,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00
						TOTAL	**1.390.857.771.511,00**	**895.848.887.337,00**	**1.040.859.314.973,00**

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	1.614.077.118,00	0,00	0,00	0,00	1.614.077.118,00
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR	226.061.968,00	0,00	0,00	0,00	226.061.968,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR	13.988.115,67	0,00	0,00	0,00	13.988.115,67

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
4	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	208.220.580,00	0,00	0,00	0,00	208.220.580,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
8	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	449.141.298,00	200.000.000,00	0,00	0,00	649.141.298,00
9	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.282.769.613,00	8.978.000.000,00	0,00	0,00	15.260.769.613,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	111.818.000,00	0,00	0,00	0,00	111.818.000,00
11	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	342.228.000,00	0,00	0,00	0,00	342.228.000,00
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	190.000.000,00	1.259.631.955,00	0,00	0,00	1.449.631.955,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.287.906.000,00	4.108.824.565,00	0,00	0,00	5.396.730.565,00
14	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	187.778.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	237.778.000,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.137.136.000,00	32.358.681.840,00	0,00	0,00	37.495.817.840,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.525.949.800,03	40.818.267.600,00	0,00	0,00	44.344.217.400,03
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	142.671.413,50	0,00	0,00	0,00	142.671.413,50
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.402.928.733,39	9.700.098.736,01	0,00	0,00	14.103.027.469,40
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	205.018.228,00	54.981.772,00	0,00	0,00	260.000.000,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	UPTD SPAM SIANTAN	826.700.432,70	27.660.567,30	0,00	0,00	854.361.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT METROLOGI LEGAL	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	944.618.000,00	0,00	0,00	0,00	944.618.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
34	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	66.070.000,00	0,00	0,00	0,00	66.070.000,00
35	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	49.781.000,00	0,00	0,00	0,00	49.781.000,00
36	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
37	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	62.127.500,00	0,00	0,00	0,00	62.127.500,00
38	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	527.632.975,00	0,00	0,00	0,00	527.632.975,00
39	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	39.307.500,00	0,00	0,00	0,00	39.307.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
40	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	359.731.418,00	0,00	0,00	0,00	359.731.418,00
41	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	466.648.092,77	0,00	0,00	0,00	466.648.092,77
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	16.326.860,00	0,00	0,00	0,00	16.326.860,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	87.077.500,00	0,00	0,00	0,00	87.077.500,00
44	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	34.806.252,00	239.982.092,00	0,00	0,00	274.788.344,00
45	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	620.715.900,00	0,00	0,00	0,00	620.715.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
46	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	452.358.597,00	397.924.471,00	0,00	0,00	850.283.068,00
47	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	UPT METROLOGI LEGAL	95.363.067,00	0,00	0,00	0,00	95.363.067,00
48	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	637.574.822,00	0,00	0,00	0,00	637.574.822,00
49	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	99.205.800,00	0,00	0,00	0,00	99.205.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
50	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	113.567.931,00	0,00	0,00	0,00	113.567.931,00
51	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	14.559.900,00	0,00	0,00	0,00	14.559.900,00
52	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	1.568.266.901,50	1.733.098,50	0,00	0,00	1.570.000.000,00
53	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	5.022.734.200,00	0,00	0,00	0,00	5.022.734.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
54	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	22.568.516,00	3.431.484,00	0,00	0,00	26.000.000,00
55	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00
56	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	232.400.000,00	0,00	0,00	0,00	232.400.000,00
57	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	80.265.700,00	0,00	0,00	0,00	80.265.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
58	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000.000,00
59	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	551.358.914,00	0,00	0,00	0,00	551.358.914,00
60	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
61	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	283.117.422,00	13.934.032,00	0,00	0,00	297.051.454,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
62	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	48.350.000,00	0,00	0,00	0,00	48.350.000,00
63	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	89.836.045,00	0,00	0,00	0,00	89.836.045,00
64	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	45.400.000,00	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00
65	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	392.853.110,00	0,00	0,00	0,00	392.853.110,00
66	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
67	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	8.981.012.988,52	105.213.314.659,00	114.194.327.647,52
72	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.230.454.400,00	0,00	0,00	0,00	1.230.454.400,00
73	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	542.572.785,00	0,00	0,00	0,00	542.572.785,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
74	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	363.168.733,00	0,00	0,00	0,00	363.168.733,00
75	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00
77	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	49.754.542,00	0,00	0,00	0,00	49.754.542,00
78	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
79	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.556.427.024,96	0,00	0,00	0,00	4.556.427.024,96
80	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	272.050.000,00	0,00	0,00	0,00	272.050.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
81	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	333.640.000,00	0,00	0,00	0,00	333.640.000,00
82	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.245.458,00	0,00	0,00	0,00	180.245.458,00
83	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	581.279.376,01	0,00	0,00	0,00	581.279.376,01
84	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	62.423.424,00	0,00	0,00	0,00	62.423.424,00
87	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	289.687.650,01	0,00	0,00	0,00	289.687.650,01

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
88	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.103.813.453,03	243.615.506,00	0,00	0,00	1.347.428.959,03
89	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	236.176.560,00	0,00	0,00	0,00	236.176.560,00
90	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	548.496.000,00	708.059.105,00	0,00	0,00	1.256.555.105,00
91	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	103.043.707,00	0,00	0,00	0,00	103.043.707,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
92	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	387.170.541,00	0,00	0,00	0,00	387.170.541,00
93	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32.427.894,59	331.735.633,41	0,00	0,00	364.163.528,00
94	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.589.575.061,00	0,00	0,00	0,00	2.589.575.061,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
95	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.477.235.362,20	1.568.204.260,20	0,00	0,00	6.045.439.622,40
96	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	585.383.110,00	0,00	0,00	0,00	585.383.110,00
97	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.104.560.081,00	0,00	0,00	0,00	1.104.560.081,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
98	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	161.627.161,00	0,00	0,00	0,00	161.627.161,00
99	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3.469.924.065,00	53.842.763,00	0,00	0,00	3.523.766.828,00
100	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD SPAM SIANTAN	269.314.448,49	30.685.551,51	0,00	0,00	300.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
101	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	412.320.889,00	4.988.500,00	0,00	0,00	417.309.389,00
102	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.716.380.654,00	15.210.510,00	0,00	0,00	11.731.591.164,00
103	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	168.536.768,00	0,00	0,00	0,00	168.536.768,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
104	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
105	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.179.342.000,00	0,00	0,00	0,00	2.179.342.000,00
106	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28.624.435.447,35	20.369.810.823,60	0,00	0,00	48.994.246.270,95

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
107	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00
108	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	549.901.000,00	0,00	0,00	0,00	549.901.000,00
109	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.096.173.664,06	132.031.849,15	0,00	0,00	10.228.205.513,21

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
110	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
111	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
112	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	27.375.421.057,21	13.212.007.040,54	0,00	0,00	40.587.428.097,75

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
113	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.007.102.517,77	0,00	0,00	0,00	8.007.102.517,77
114	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	815.845.329,00	0,00	0,00	0,00	815.845.329,00
115	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
116	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.040.307.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.307.000,00
117	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	170.710.500,00	0,00	0,00	0,00	170.710.500,00
118	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	185.963.655.562,78	831.504.491,00	0,00	0,00	186.795.160.053,78

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
119	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Jemaja Barat	402.254.000,00	0,00	0,00	0,00	402.254.000,00
120	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jemaja Barat	144.838.600,00	0,00	0,00	0,00	144.838.600,00
121	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Jemaja Timur	430.246.000,00	0,00	0,00	0,00	430.246.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
122	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jemaja Timur	274.032.010,00	50.000.000,00	0,00	0,00	324.032.010,00
123	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kute Siantan	650.271.800,00	19.392.000,00	0,00	0,00	669.663.800,00
124	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kute Siantan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
125	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Letung	481.937.000,00	0,00	0,00	0,00	481.937.000,00
126	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Letung	554.773.474,00	80.787.642,00	0,00	0,00	635.561.116,00
127	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Palmatak	486.301.000,00	0,00	0,00	0,00	486.301.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
128	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Palmatak	938.922.298,00	30.000.000,00	0,00	0,00	968.922.298,00
129	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Siantan Selatan	623.718.000,00	0,00	0,00	0,00	623.718.000,00
130	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Siantan Selatan	619.703.174,44	36.921.036,00	0,00	0,00	656.624.210,44

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
131	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Siantan Tengah	415.790.000,00	0,00	0,00	0,00	415.790.000,00
132	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Siantan Tengah	673.113.963,00	0,00	0,00	0,00	673.113.963,00
133	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Siantan Timur	466.997.000,00	0,00	0,00	0,00	466.997.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
134	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Siantan Timur	368.592.163,00	31.000.000,00	0,00	0,00	399.592.163,00
135	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Siantan Utara	369.499.000,00	0,00	0,00	0,00	369.499.000,00
136	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Siantan Utara	110.212.976,00	11.681.085,00	0,00	0,00	121.894.061,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
137	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Tarempa	597.005.000,00	0,00	0,00	0,00	597.005.000,00
138	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tarempa	1.046.514.000,00	210.391.059,00	0,00	0,00	1.256.905.059,00
139	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Jemaja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
140	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Jemaja	820.980.109,00	100.000.000,00	0,00	0,00	920.980.109,00
141	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Palmatak	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
142	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Palmatak	2.364.700.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.664.700.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
143	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Tarempa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
144	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Tarempa	3.745.556.652,00	320.000.000,00	0,00	0,00	4.065.556.652,00
145	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	626.840.000,00	0,00	0,00	0,00	626.840.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
146	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
147	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	458.103.950,00	0,00	0,00	0,00	458.103.950,00
148	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	175.105.000,00	0,00	0,00	0,00	175.105.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
149	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	68.986.400,00	0,00	0,00	0,00	68.986.400,00
150	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.594.735.950,00	0,00	0,00	0,00	9.594.735.950,00
151	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.198.978.578,00	20.664.632,00	0,00	0,00	1.219.643.210,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
152	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.112.443.317,02	0,00	0,00	0,00	14.112.443.317,02
153	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.607.844.368,00	0,00	0,00	0,00	2.607.844.368,00
154	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.196.339,00	0,00	0,00	0,00	300.196.339,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
155	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.483.563.876,00	0,00	0,00	0,00	12.483.563.876,00
156	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	8.492.544.846,00	0,00	0,00	0,00	8.492.544.846,00
157	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	35.990.336.839,07	0,00	0,00	0,00	35.990.336.839,07

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
158	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.310.884.738,00	0,00	0,00	0,00	12.310.884.738,00
159	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	18.898.774.942,00	0,00	0,00	0,00	18.898.774.942,00
160	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	26.393.820,00	0,00	0,00	26.393.820,00
161	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	379.967.017,80	0,00	0,00	0,00	379.967.017,80

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
162	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	51.276.829,08	5.874.661,62	0,00	0,00	57.151.490,70
164	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	151.888.000,00	186.700.000,00	0,00	0,00	338.588.000,00
165	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	46.412.000,00	0,00	0,00	0,00	46.412.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
166	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	180.620.025,15	0,00	0,00	0,00	180.620.025,15
168	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
169	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	512.450.000,00	0,00	0,00	0,00	512.450.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
170	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	253.266.680,00	0,00	0,00	0,00	253.266.680,00
171	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13.922.611.309,00	33.578.079,42	0,00	0,00	13.956.189.388,42
172	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	14.502.352.046,00	129.680.409,00	0,00	0,00	14.632.032.455,00
173	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT PENGELOLAAN SAMPAH	522.265.477,00	410.000.000,00	0,00	0,00	932.265.477,00
174	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI	592.046.538,62	16.024.665,96	0,00	0,00	608.071.204,58

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
175	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT PENGELOLAAN SAMPAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.814.301.440,00	0,00	0,00	0,00	1.814.301.440,00
177	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4.673.699.675,00	231.457.400,00	0,00	0,00	4.905.157.075,00
178	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	584.466.659,00	0,00	0,00	0,00	584.466.659,00
179	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23.676.714.387,99	168.430.464,00	0,00	0,00	23.845.144.851,99

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
180	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.544.817.315,00	0,00	0,00	0,00	4.544.817.315,00
181	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	816.363.635,13	0,00	0,00	0,00	816.363.635,13
182	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.809.114.613,00	0,00	0,00	0,00	1.809.114.613,00
183	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.006.284.905,12	534.697.149,00	0,00	0,00	11.540.982.054,12
184	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.371.867.200,00	0,00	0,00	0,00	2.371.867.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
185	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	393.682.420,37	0,00	0,00	0,00	393.682.420,37
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	934.942.143,00	70.452.082,00	0,00	0,00	1.005.394.225,00
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.765.143.516,00	0,00	0,00	0,00	4.765.143.516,00
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT DAERAH	11.477.928.642,87	374.935.542,00	0,00	0,00	11.852.864.184,87

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	2.222.269.634,13	0,00	0,00	0,00	2.222.269.634,13
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH	1.246.690.964,87	15.176.567,13	0,00	0,00	1.261.867.532,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	1.166.546.272,93	0,00	0,00	0,00	1.166.546.272,93
				TOTAL	**579.883.847.159,61**	**139.129.086.540,35**	**8.981.012.988,52**	**105.213.314.659,00**	**833.207.261.347,48**

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		20				1	1	22
Golongan IV/b		7	15			5	1	28
Golongan IV/a		2	34	1		28	4	69
Golongan III/e								
Golongan III/d			64	59		112	12	247
Golongan III/c			5	48		244	14	311
Golongan III/b				45		298	48	391
Golongan III/a				8		165	171	344
Golongan II/e								
Golongan II/d						87	84	171
Golongan II/c						77	46	123
Golongan II/b							19	19
Golongan II/a						13	4	17
Golongan I/e								
Golongan I/d							2	2
Golongan I/c							2	2
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						676		676

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	Piutang Lain - Lain PAD yang SAH	2024	590.980.517,00	0,00	419.906.381,32	171.074.135,68
2	Piutang Lainnya	2024	214.473.933,32	0,00	214.473.933,32	0,00
3	Piutang Pajak Restoran	2024	14.345.634,00	0,00	1.434.563,00	12.911.071,00
4	Piutang PBB-P2 (Pokok)	2024	1.513.474.900,00	0,00	633.069.028,69	880.405.871,31
5	Piutang Transfer	2024	12.454.416.671,00	0,00	0,00	12.454.416.671,00
		Total	14.787.691.655,32	0,00	1.268.883.906,33	13.518.807.748,99

Kab. Kepulauan Anambas, 31 Desember 2024

Bupati

ABDUL HARIS